

Lampiran III Peraturan Daerah

Nomor : 3 Tahun 2014

Tanggal : 20 Agustus 2014

Tentang : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2011-2016**

## BAB V

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

#### 5.2. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan misi sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bontang yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan masing-masing misi, tujuan dan sasaran dimaksud secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.

Tujuan dan Sasaran Misi I RPJMD Kota Bontang Tahun 2011–2016

No.	Tujuan	Sasaran
1.	<b>Mewujudkan Masyarakat Kota Bontang Yang Berakhlak Mulia, Memiliki Nilai-nilai luhur, Cinta Kebenaran, Kesabaran, Kasih Sayang, Kedermawanan dan Keberanian</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Berkembangnya penyelenggaraan pendidikan masyarakat, yang ditandai :<ol style="list-style-type: none"><li>1. Angka Partisipasi Murni SD/MI menjadi 100 %</li><li>2. Angka Partisipasi Murni SMP/MTS menjadi 73,38%</li><li>3. Angka Partisipasi Murni SMA/MAN/SMK menjadi 63,26 %</li></ol></li><li>2. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan, yang ditandai:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedianya Kualitas Prasarana &amp; Sarana Pendidikan menjadi 60%</li><li>2. Angka Kelulusan Sekolah Dasar Hingga Menengah menjadi 100 %</li><li>3. Kualifikasi Pendidikan Guru menjadi 100 %</li><li>4. Guru Bersertifikat mejadi 100%</li></ol></li><li>3. Meningkatnya kurikulum mata pelajaran yang terintegrasi dengan pendidikan karakter pada satuan pendidikan, Bobot Kurikulum Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Pada Sekolah Negeri maupun swasta menjadi 100%</li></ol>
2.	<b>Mewujudkan Masyarakat Kota Bontang Yang Sehat</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terwujudnya masyarakat Kota Bontang yang Sehat, yang ditandai:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kelangsungan Hidup Bayi menjadi 994,2 per 1000 kelahiran hidup</li><li>2. Angka Harapan Hidup menjadi 72,85 tahun</li><li>3. Meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang sesuai standar pelayanan menjadi 80 %</li></ol></li><li>2. Pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan, yang ditandai :<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tercukupinya tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan 100 % (<i>baik kualitas maupun kuantitas</i>)</li><li>2. Prosentase SDM kesehatan yang berpendidikan minimal D IV / S1 sesuai kompetensinya menjadi 90%</li></ol></li><li>3. Meningkatnya pola hidup sehat masyarakat, yang ditandai :<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah masyarakat yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat menjadi 75%</li></ol></li></ol>

No.	Tujuan	Sasaran
		2. Upaya penyehatan dan pengawasan kesehatan lingkungan menjadi 95%
3.	<b>Mewujudkan Masyarakat Kota Bontang Yang Produktif dan Berdaya Saing</b>	1. Terwujudnya Masyarakat Kota Bontang Yang Produktif dan Berdaya Saing yang ditandai: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penurunan angka pengangguran menjadi 6,83 %</li> <li>2. Meningkatnya angkatan kerja yang masuk pasar kerja menjadi 62,11%</li> </ol>
4.	<b>Meningkatkan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Sumberdaya Manusia</b>	1. Meningkatnya Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Sumberdaya Manusia, yang ditandai: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk terkendali pada tingkat 2%</li> <li>2. Meningkatnya Jumlah Akseptor KB, baik laki-laki dan perempuan menjadi 79%</li> </ol>
5.	<b>Mengembangkan dan Melestarikan Seni Budaya Tradisional</b>	1. Berkembang dan Lestarnya Seni Budaya Tradisional yang ditandai: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Penyelenggaraan festival seni dan budaya mencapai 17 kegiatan</li> <li>2. Meningkatnya pelestarian seni dan budaya masyarakat, yang ditandai:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak 5 paket</li> <li>2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan mencapai 0,42%</li> </ol> </li> </ol>
6.	<b>Meningkatkan Peran Pemudaran Organisasi Kepemudaan Dalam Pembangunan Sumberdaya Manusia Kota Bontang</b>	1. Meningkatnya organisasi dan kegiatan pemuda dalam pembangunan, yang ditandai: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Organisasi Pemuda mencapai 76 organisasi</li> <li>2. Jumlah Kegiatan Kepemudaan mencapai 15 kegiatan</li> </ol> 2. Terlaksananya Pembangunan Balai Remaja (Graha) (selain Milik Swasta) sebanyak 1 unit
7.	<b>Meningkatkan Peran Organisasi Keolahragaan Dalam Prestasi Olahraga Dalam Pembangunan Sumberdaya Manusia Kota Bontang</b>	1. Meningkatnya Peran Organisasi Keolahragaan Dalam Prestasi Olahraga Dalam Pembangunan Sumberdaya Manusia Kota Bontang, yg ditandai : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Jumlah Organisasi Olahraga sebanyak 49 organisasi</li> <li>2. Terlaksananya Kegiatan Olahraga sebanyak 15 kegiatan</li> <li>3. Meningkatnya Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi Mencapai 5 % (acuan nya : perolehan medali pada Porprov)</li> </ol>
8.	<b>Pengembangan Pengarusatamaan Gender Melalui Fasilitas Pengembangan Kelembagaan, Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Serta Perlindungan Anak, Remaja &amp; Perempuan Dalam Segala Bentuk Diskriminasi dan Eksploitasi</b>	1. Berkembangnya Pengarusatamaan Gender Melalui Fasilitas Pengembangan Kelembagaan, Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Serta Perlindungan Anak, Remaja dan Perempuan Dalam Segala Bentuk Diskriminasi dan Eksploitasi, yang ditandai: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian kasus KDRT mencapai 80%</li> <li>2. Peran perempuan dalam lembaga pemerintah hingga mencapai 49,01%</li> </ol>

No.	Tujuan	Sasaran
9.	<b>Pengembangan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</b>	1. Berkembangnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang ditandai : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Penanganan, pelayanan dan Rehabilitasi PMKS menjadi 4,17%</li> <li>2. Meningkatnya PMKS yang mendapatkan bantuan sosial hingga mencapai 3,76%</li> </ol>
10.	<b>Pengembangan Pelayanan dan Aksesibilitas Perpustakaan dan Optimalisasi Minat Baca Masyarakat</b>	1. Berkembangnya Pelayanan dan Aksesibilitas Perpustakaan dan Optimalisasi Minat Baca Masyarakat, yang ditandai : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertambahnya Perpustakaan 14 unit/tahun</li> <li>2. Meningkatnya Prosentase minat baca masyarakat mencapai 10% pertahun</li> <li>3. Meningkatnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah mencapai 10 %/ tahun</li> </ol>
11.	<b>Meningkatkan Peran Serta dan Keberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Wilayah</b>	1. Meningkatnya Peran Serta dan Keberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Wilayah, yang ditandai: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 75 kelompok</li> <li>2. Mempertahankan Posyandu Aktif 100 %</li> <li>3. Meningkatnya jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang berprestasi mencapai 26,70 %</li> <li>4. PKK Aktif meningkat setiap tahunnya mencapai 100 %</li> </ol>

Tabel 5.2.  
Tujuan dan Sasaran Misi II RPJMD Kota Bontang Tahun 2011 – 2016

No.	Tujuan	Sasaran
1.	<b>Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, yang ditandai:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Rencana Aksi Daerah</li> <li>2. Opini BPK terhadap audit Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);</li> <li>3. Pemanfaatan hasil pengawasan dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik mencapai 100 %;</li> <li>4. Pelaksanaan SPIP di lingkungan Pemkot Bontang sesuai diagnostic assessment mencapai 100%</li> <li>5. Terlaksananya system e-Audit</li> </ol> </li> <li>2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah, yang ditandai:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan e-Government yang mencakup e-Budgeting, e-Project Planning, e-Procurement, e-Delivery, e-Controlling, dan e-Performance mencapai 100%</li> <li>2. Pelaksanaan keterbukaan informasi public mencapai 100%</li> </ol> </li> <li>3. Aparatur Pengawas /Pemeriksa yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya mencapai 100 %</li> <li>4. Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti mencapai 100%</li> </ol>
2.	<b>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas pelayanan public yang memenuhi azaz, prinsip dan standar pelayanan public, yang ditandai:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cakupan perijinan melalui pelayanan terpadu satu pintu mencapai 30 jenis perizinan</li> <li>2. Proses pelayanan perizinan dapat diselesaikan dalam kurun waktu maksimum 5 hari kerja</li> <li>3. Jumlah unit pelayanan yang berkatagori baik mencapai 36 SKPD.</li> <li>4. Tersusunnya norma dan standar pelayanan publik 100%.</li> <li>5. Tersusunnya Norma dan Standar prosedur kerja 100%.</li> </ol> </li> </ol>
3.	<b>Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah yang ditandai:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya (standar kompetensi jabatan) mencapai 95 %</li> <li>2. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan mencapai 100 %</li> <li>3. Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugasnya mencapai 100 %</li> <li>4. SKPD yang memiliki akuntabilitas kinerja yang baik mencapai 100 %</li> <li>5. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintahan mencapai nilai B</li> <li>6. Efektifitas peran lembaga korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) mencapai 100%</li> </ol> </li> <li>2. Meningkatnya kedisiplinan pegawai yang mencapai 90 %</li> <li>3. Meningkatnya kinerja birokrasi pemerintahan, yang ditandai</li> </ol>

No.	Tujuan	Sasaran
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelembagaan (organisasi dan tata kerja) yang proporsional, efektif, efisien yang mencapai 100%</li> <li>2. Tersedianya pedoman dan standar pendayagunaan aparatur yang meliputi 45 dokumen Anjab, 31 dokumen ABK, SKJ dan 2 (dua) dokumen Kamus Jabatan</li> <li>4. Meningkatnya manajemen kepegawaian daerah, yang ditandai: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diterapkannya system aplikasi pegawai pada SKPD yang mencapai 95%</li> <li>2. Tersedianya data semua pegawai secara akurat</li> <li>3. Semua dokumen/arsip fisik mudah diakses secara lengkap dan benar</li> </ol> </li> </ol>
4.	<b>Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kinerja lembaga legislative dan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang ditandai: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Raperda yang mendapat persetujuan DPRD sebanyak 75 Raperda</li> <li>2. Program legislasi daerah sebanyak 108 Raperda</li> <li>3. Jumlah Raperda inisiatif DPRD sebanyak 30 raperda</li> <li>4. Efektifnya pelaksanaan tugas kedinasan KDH dan wakil KDH yang mencapai 100%</li> <li>5. Jumlah Perda yang ditetapkan sebanyak 65 Perda</li> <li>6. Peraturan Walikota yang ditetapkan sebanyak 20 peraturan</li> <li>7. Kerjasama antar Pemerintah Daerah bertambah sebanyak 6 MoU</li> </ol> </li> <li>2. Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan, yang ditandai : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektifitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang mencapai 100%</li> <li>2. Efektifitas pemberdayaan masyarakat kecamatan yang mencapai 100%</li> <li>3. Efektifitas peningkatan sarana/prasarana dan lingkungan kecamatan yang mencapai 100%</li> <li>4. Efektifitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang mencapai 100%</li> <li>5. Efektifitas pemberdayaan masyarakat kelurahan yang mencapai 100%</li> <li>6. Efektifnya peningkatan sarana/prasarana dan lingkungan kelurahan yang mencapai 100%</li> </ol> </li> </ol>
5.	<b>Mewujudkan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan daerah yang ditandai : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat menjadi Rp. 123.289.707.827,48</li> <li>2. Opini BPK terhadap audit Laporan Keuangan WTP</li> <li>3. Ketersediaan data aset yang akurat mencapai 100%</li> </ol> </li> </ol>
6.	<b>Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Daerah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya Perencanaan pembangunan daerah Yang Berkualitas, yang ditandai : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA</li> </ol> </li> </ol>

No.	Tujuan	Sasaran
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA</li> <li>3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA</li> <li>4. Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD 100%</li> <li>5. Jumlah Dokumen Rencana Strategis Bidang pemerintahan, sosial dan ekonomi 10 dokumen</li> <li>2. Meningkatnya komitmen dan peran serta swasta dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dimana program CSR yang sinkron dengan program pemerintah daerah mencapai 60%.</li> <li>3. Ketersediaan data untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah mencapai 100 %</li> </ol>
7.	<p><b>Mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat serta kewaspadaan dini terhadap potensi bencana</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat, yang ditandai: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cakupan Patroli Petugas satpol PP 3 kali sehari</li> <li>2. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3(Ketertiban,Ketentraman,Keselamatan) sebesar 100%</li> <li>3. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 10,71%</li> <li>4. Penyelesaian Pelanggaran Perda mencapai 98%</li> <li>5. Rasio Pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan mencapai 486</li> <li>6. Menurunnya Angka Kriminalitas mencapai 18 per 10.000 penduduk</li> <li>7. Meningkatnya Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) mencapai 50 orang per 10.000 penduduk</li> </ol> </li> <li>2. Terwujudnya kewaspadaan dini terhadap potensi bencana, yang ditandai: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya rencana aksi daerah penanggulangan bencana (RAD-PB)</li> <li>2. Tim Reaksi Cepat (TRC) menjadi 15 Regu</li> <li>3. Tertanganinya Penanggulangan Bencana 100%</li> </ol> </li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam masyarakat, yang ditandai: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kader pembaruan mencapai 350 orang</li> <li>2. Forum dialog public yang mencapai yang mencapai 30 kegiatan</li> <li>3. Kegiatan pembinaan terhadap LSM,Ormas dan OKP mencapai 100</li> <li>4. Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah menjadi 60 Kegiatan.</li> </ol> </li> </ol>
8.	<p><b>Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan Daerah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan Daerah yang efektif dan efisien, yang ditandai : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SKPD yang mengelola Arsip secara Baku bertambah menjadi 24,1%</li> <li>2. Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan 13 kegiatan</li> <li>3. Jumlah arsip yang diakuisisi meningkat 598 ML</li> <li>4. Jumlah inventaris arsip mencapai 33.450 berkas</li> </ol> </li> </ol>

No.	Tujuan	Sasaran
9.	<b>Mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang terintegrasi secara nasional dalam rangka penyediaan data dan informasi kependudukan sebagai acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan</b>	1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu, yang ditandai : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua Penduduk memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);</li> <li>2. Semua bayi yang lahir memiliki akte kelahiran</li> <li>3. Semua pasangan penduduk memiliki akte nikah</li> <li>4. Semua masyarakat memiliki KTP</li> <li>5. Semua penduduk memiliki akte kelahiran</li> <li>6. Tersedianya database kependudukan berskala nasional</li> <li>7. Pelaksanaan e-KTP berbasis NIK</li> </ol>

Tabel 5.3.  
Tujuan dan Sasaran Misi III RPJMD Kota Bontang Tahun 2011–2016

No.	Tujuan	Sasaran
1.	<b>Mewujudkan Kota Bontang yang bersih, hijau dan asri</b>	1. Terwujudnya Kota Bontang yang bersih, hijau dan asri, yang ditandai: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya prosentase penanganan sampah menjadi 74,08%</li> <li>2. Memelihara kondisi RTH eksisting dan Meningkatkan luas RTH menjadi 3.330,96 Ha atau 22,5%</li> </ol>
2.	<b>Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan</b>	1. Meningkatnya pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan, yang ditandai <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen AMDAL mencapai 100 %</li> <li>2. Pengawasan pelaksanaan terhadap pelaksanaan dokumen UKL-UPL mencapai 90 %</li> <li>3. Pengawasan terhadap dokumen SPPL mencapai 90%</li> </ol> 2. Meningkatnya pengendalian dan pemantauan mutu sumber air menjadi 90% 3. Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan menjadi 42,5% 4. Meningkatnya penegakan hukum lingkungan, yang ditandai : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup menjadi 60%</li> <li>2. Penyelesaian kasus lingkungan hidup menjadi 100%</li> </ol> 5. Meningkatnya cakupan pelayanan dan pengelolaan air limbah menjadi 10%
3.	<b>Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta penataan ruang</b>	1. Meningkatnya rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta penataan ruang yang ditandai <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya rehabilitasi terumbu karang sebesar 20 ha</li> <li>2. Meningkatnya rehabilitasi hutan mangrove seluas 150 ha</li> <li>3. Meningkatnya rehabilitasi hutan lindung seluas 400 ha</li> <li>4. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW menjadi 78%</li> <li>5. Meningkatnya Pengendalian dan Pemantauan ketersediaan aquifer Kota Bontang, yang ditandai               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya sumur pantau sebanyak 4 sumur</li> <li>2. Tersedianya sumur imbuhan (injeksi) sebanyak 3 sumur</li> </ol> </li> </ol>



Tabel 5.4.  
Tujuan dan Sasaran Misi IV RPJMD Kota Bontang Tahun 2011–2016

No.	Tujuan	Sasaran
1.	<b>Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah</b>	<p>1. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah yang ditandai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana jaringan jalan 2,18%</li> <li>2. Meningkatnya trotoar dan drainase/saluran pembuangan air di sepanjang jalan 24,85%</li> <li>3. Menurunnya kondisi drainase tidak tersumbat menjadi 3%</li> <li>4. Meningkatnya cakupan pelayanan air minum/air bersih menjadi 80%</li> <li>5. Meningkatnya tingkat waktu tanggap daerah layanan menjadi 80%</li> <li>6. Terpenuhinya kebutuhan tempat pemakaman umum (TPU) 32,30%</li> <li>7. Pemugaran rumah tidak layak huni sebesar 32,89%</li> <li>8. Meningkatnya cakupan pelayanan penerangan jalan umum menjadi 45,29%</li> <li>9. Meningkatnya 2 (dua) sarana dan 1 (satu) prasarana perhubungan</li> <li>10. Meningkatnya fasilitas dan pelayanan perhubungan yang ditandai :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya fasilitas pelabuhan Loktuan menjadi 75%</li> <li>2. Bertambahnya traffic light sebanyak 3 unit</li> <li>3. Bertambahnya rambu-rambu jalan sebanyak 126 buah</li> <li>4. Tersedianya peralatan monitor cuaca di bandara umum sebanyak 1 unit</li> </ol> </li> <li>11. Meningkatkan administrasi dan penataan pertanahan, yang ditandai:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertambahnya luas lahan untuk kepentingan umum menjadi 462,35 ha</li> <li>2. Terinventarisir dan meningkatnya status lahan Pemkot menjadi 373,1 ha</li> <li>3. Terinventarisir dan terpeliharanya patok batas daerah sebanyak 253 buah</li> </ol> </li> <li>12. Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan listrik menjadi 90%</li> </ol>
2.	<b>Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya akses pelayanan dan sumber pendanaan UMKM yang ditandai :           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bertambahnya jumlah UMKM menjadi 72 UMKM</li> <li>2. Jumlah penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM menjadi 14.071 %</li> </ol> </li> <li>2. Meningkatnya aktifitas dan kualitas manajemen koperasi menjadi 85 %</li> </ol>

No.	Tujuan	Sasaran
		3. Terwujudnya penataan pasar tradisional sebanyak 3 unit 4. Ketersediaan pangan utama sebesar 100 % 5. Meningkatnya pelayanan, pengawasan dan penertiban di bidang usaha dan sumber daya mineral, yang ditandai: 1. Kelurahan yang memperoleh jaringan gas rumah tangga sebanyak 2. 2. Meningkatnya perusahaan yang mendapat penerangan teknis penambangan berwawasan lingkungan menjadi 17 perusahaan 6. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sebesar 25 % 7. Meningkatnya produksi perikanan 10% 8. Meningkatnya cakupan bina kelompok nelayan, petani & peternak menjadi 20% 9. Meningkatnya nilai ekspor sebesar menjadi US \$ 23.146.383.348,- 10. Meningkatnya jumlah industri kecil menengah sebesar 5 %
3.	<b>Penciptaan iklim berinvestasi dan penanaman modal serta sektor ekonomi basis</b>	1. Penciptaan iklim berinvestasi dan penanaman modal serta sektor ekonomi basis yang ditandai : 1. Meningkatnya nilai investasi 10 % 2. Terbangunnya kawasan industri baru Kota Bontang, yang ditandai: 1. Tersedianya kawasan industri baru di Bontang Lestari seluas 465,4 Ha 2. Tersedianya dokumen perencanaan kawasan industri baru Kota Bontang sebanyak 2 dokumen 3. Tersedianya suatu lembaga pengelola kawasan industri
4.	<b>Penanggulangan masalah kemiskinan</b>	1. Tertanggulangnya permasalahan kemiskinan, yang ditandai: 1. Menurunnya angka kemiskinan menjadi 9%

WALIKOTABONTANG,

  
 ADI DARMA

Lampiran IV Peraturan Daerah

Nomor : 3 Tahun 2014

Tanggal : 20 Agustus 2014

Tentang : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2011-2016**

## **BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi pembangunan daerah merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi pembangunan daerah.

Selanjutnya untuk menjabarkan strategi pembangunan yang telah ditetapkan maka diperlukan arah kebijakan agar dapat menjadi pedoman bagi pemerintah maupun *stakeholder* dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan indikasi program sesuai tugas dan kewenangannya.

Sejalan hal tersebut, sebagai upaya pencapaian visi dan pelaksanaan misi pembangunan daerah, Pemerintah Kota Bontang menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang secara rinci disajikan pada tabel di berikut ini:

Tabel 6.1.  
Strategi dan Arah Kebijakan Misi I RPJMD Kota Bontang Tahun 2011 – 2016

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Mewujudkan Masyarakat Kota Bontang Yang Berakhlak Mula, Memiliki Nilai-nilai luhur, Cinta Kebenaran, Kesabaran, Kasih Sayang, Kedermawanan dan Keberanian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkembangnya Penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat, yang ditandai :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI menjadi 100 %</li> <li>2). Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs menjadi 73,38%</li> <li>3). Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK menjadi 63,26%</li> </ol> </li> <li>2. Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, yang ditandai :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan menjadi 60%</li> <li>2). Angka Kelulusan Sekolah Dasar Hingga Menengah menjadi 100%</li> <li>3). Kualifikasi Pendidikan Guru menjadi 100%</li> <li>4). Guru Bersertifikat Menjadi 100%</li> </ol> </li> <li>3. Meningkatnya kurikulum mata pelajaran yang terintegrasi dengan pendidikan karakter pada satuan pendidikan. Bobot Kurikulum Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Pada Sekolah Negeri maupun swasta menjadi 100%</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Pendidikan Gratis</li> <li>2. Pengembangan Kualitas Layanan Pendidikan</li> <li>3. Peningkatan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis dan Kondusif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Fasilitasi Pembiayaan Pendidikan melalui BOSNAS, DBO, Beasiswa berprestasi dan beasiswa siswa tidak mampu, kuota warga tidak mampu dan Subsidi satuan pendidikan</li> <li>2.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan</li> <li>2.2. Pengembangan Manajemen Berbasis sekolah (MBS)</li> <li>2.3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Tenaga Pendidik dan kependidikan</li> <li>3.1. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Karakter yang terintegrasi dengan semua mata pelajaran kecuali Pendidikan Agama dan PKn (Pendidikan Pancasila)</li> <li>3.2. Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> </ol>

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2.	<b>Mewujudkan Masyarakat Kota Bontang Yang Sehat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Kelangsungan Hidup Bayi 994,2 per 1000 kelahiran hidup</li> <li>2. Meningkatnya Angka Harapan Hidup Menjadi 72,85 tahun</li> <li>3. Meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang sesuai standar pelayanan menjadi 81,67%</li> <li>4. Pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan, yang ditandai : <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Tercukupinya tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan 100% (baik kualitas maupun kuantitas)</li> <li>2). Prosentase SDM kesehatan yang berpendidikan minimal DIV/S1 sesuai kompetensinya 90%</li> </ol> </li> <li>5. Meningkatnya pola hidup sehat masyarakat, yang ditandai :</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Akses dan Cakupan serta mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat</li> <li>2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penerapan pola hidup sehat dan pengembangan lingkungan sehat</li> <li>3. Pemenuhan sarana, prasarana dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Puskesmas</li> <li>4. Pemenuhan kuantitas dan Peningkatan kualitas SDM Kesehatan</li> <li>5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penerapan pola hidup sehat dan pengembangan lingkungan sehat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Fasilitasi Jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat dan peningkatan pemantauan terhadap kelompok rawan terutama ibu dan bayi</li> <li>2.2. Meningkatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, curatif, rehabilitatif dan pengembangan regulasi bidang kesehatan</li> <li>3.1. Revitalisasi peran puskesmas dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan</li> <li>4.1 Rekrutmen tenaga kesehatan sesuai kebutuhan dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan</li> <li>5.1 Meningkatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, curatif, rehabilitatif dan pengembangan regulasi bidang kesehatan</li> </ol>

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		1). Jumlah masyarakat yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat menjadi 75% 2) Upaya penyehatan dan pengawasan kesehatan lingkungan menjadi 95 %		
3.	<b>Mewujudkan Masyarakat Kota Bontang Yang Produktif dan Berdaya Saing</b>	1. Penurunan angka pengangguran menjadi 6,83% 2. Meningkatnya angkatan kerja yang masuk pasar kerja menjadi 62,11%	1. Peningkatan penempatan tenaga kerja 2. Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja	1.1 Fasilitasi pengembangan calon tenaga kerja yang berkualitas dan produktif 2.1. Fasilitasi informasi bursa kerja 2.2. Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan penguatan lembaga / serikat perburuhan
4.	<b>Meningkatkan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Sumberdaya Manusia</b>	1. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk terkendali dibawah 2%	1. Peningkatan cakupan pelayanan keluarga berencana yang berkualitas dan pengendalian kependudukan	1.1. Promosi sampai kepada tingkat kepala keluarga 1.2. Pemantapan dan pemahaman 4 pilar program KB (PUP, Pengaturan Kelahiran, Ketahanan Keluarga, Peningkatan Kesejahteraan Keluarga) 1.3. Sistem pelayanan/pengendalian kependudukan terpadu (terkait Disdukptil)

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2. Meningkatnya Jumlah Akseptor KB, baik laki-laki dan perempuan menjadi 79%	2. Peningkatan kesadaran reproduksi sehat, keluarga berencana dan keluarga sejahtera	2.1. Fasilitasi dan penguatan kelembagaan kelompok-kelompok binaan  2.2 Fasilitasi dan penguatan profesionalisme tenaga penyuluh
5.	<b>Mengembangkan dan Melestarikan Seni Budaya Tradisional</b>	1. Meningkatnya penyelenggaraan festival seni dan budaya mencapai 17 kegiatan  2. Meningkatnya pelestarian seni dan budaya masyarakat, yang ditandai :  1). Sarana penyelenggaraan seni dan budaya menjadi 5 paket  2). Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan mencapai 0,42%	1. Pengembangan pagelaran seni dan kebudayaan lokal  2. Peningkatan sarana dan prasarana pelestarian seni dan budaya tradisional	1.1. Fasilitasi penyelenggaraan pagelaran seni dan kebudayaan lokal  2.1. Pengembangan sarana dan prasarana seni dan kebudayaan
6.	<b>Meningkatkan Peran Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Dalam Pembangunan Sumberdaya Manusia Kota Bontang</b>	1. Meningkatnya organisasi dan kegiatan pemuda dalam pembangunan, yang ditandai :  1). Jumlah Organisasi Pemuda mencapai 76 Organisasi  2). Jumlah kegiatan kepemudaan hingga mencapai 15 kegiatan  2. Terlaksananya pembangunan Balai Remaja (Graha) selain milik swasta sebanyak 1 unit	1. Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan  2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga	1.1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan kegiatan kepemudaan  2.1 Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana olahraga

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
7.	<b>Meningkatkan Peran Organisasi Keolahragaan Dalam Prestasi Olahraga Dalam Pembangunan Sumberdaya Manusia Kota Bontang</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya jumlah organisasi olahraga menjadi 45 organisasi</li> <li>2. Terlaksananya kegiatan olahraga sebanyak 15 kegiatan</li> <li>3. Meningkatnya prestasi olahraga tingkat provinsi mencapai 5 % (acuannya : perolehan medali pada Porprov)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan kelembagaan olahraga</li> <li>2. Pemasyarakatan olahraga</li> <li>3. Pembinaan atlet dan pelaku olahraga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Penguatan organisasi dan manajemen pengelolaan olahraga</li> <li>1.2. Fasilitasi kelompok dan atlet berprestasi</li> <li>2.1. Fasilitasi dan partisipasi event-event olahraga</li> <li>2.2. Fasilitasi pengembangan olahraga masyarakat</li> <li>3.1. Fasilitasi pengkaderan atlet</li> <li>3.2. Fasilitasi kelompok dan atlet berprestasi</li> </ol>
8.	<b>Pengembangan Pengarusutamaan Gender Melalui Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan, Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Serta Perlindungan Anak, Remaja dan Perempuan Dalam Segala Bentuk Diskriminasi dan Eksploitasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkembangnya Pengarusutamaan Gender Melalui Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan, Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Serta Perlindungan Anak, Remaja dan Perempuan Dalam Segala Bentuk Diskriminasi dan Eksploitasi, yang ditandai : <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Penyelesaian kasus KDRT mencapai 80%</li> <li>2). Peran perempuan dalam lembaga pemerintah hingga mencapai 49,01%</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak terhadap eksploitasi dan tindak kekerasan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</li> <li>1.2. Advokasi dan fasilitasi Pengarusutamaan Gender bagi perempuan</li> <li>1.3. Fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi perempuan</li> <li>1.4. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak</li> <li>1.5. Fasilitasi dan advokasi perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)</li> <li>1.6. Fasilitasi upaya perwujudan kota layak anak</li> </ol>



No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				1.7. Fasilitasi dan advokasi perlindungan hak-hak anak 1.8. Fasilitasi dan rehabilitasi anak korban kekerasan
9.	<b>Pengembangan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</b>	1. Berkembangnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), yang ditandai : 1). Meningkatnya Penanganan, pelayanan dan rehabilitasi PMKS menjadi 4,17% 2). Meningkatnya PMKS yang mendapatkan bantuan sosial hingga mencapai 3,76%	1. Peningkatan penanganan pelayanan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1.1. Fasilitasi pengembangan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 1.2. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan HIV AIDS 1.3. Penguatan peran serta masyarakat dan lembaga peduli permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) & masalah sosial lainnya 1.4. Pengembangan rasa kesetiakawanan sosial
10.	<b>Pengembangan Pelayanan dan Aksesibilitas Perpustakaan dan Optimalisasi Minat Baca Masyarakat</b>	1. Berkembangnya pelayanan dan aksesibilitas perpustakaan dan optimalisasi minat baca masyarakat Kota Bontang, yang ditandai : 1). Bertambahnya perpustakaan sebanyak 14 unit per tahun 2). Meningkatnya prosentase minat baca masyarakat mencapai 10% per tahun 3). Meningkatnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah mencapai 10% /Jumlah eks/ tahun	1. Pengembangan budaya baca masyarakat	1.1. Fasilitasi dan pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan berbasis IT 1.2. Pengembangan manajemen perpustakaan modern

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
11.	<b>Meningkatkan Peran Serta dan Keberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Wilayah</b>	1. Meningkatnya peran serta dan keberdayaan Masyarakat dalam pembangunan wilayah, yang ditandai : <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Terbentuknya kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 75 kelompok</li> <li>2). Mempertahankan posyandu aktif 100%</li> <li>3). Meningkatnya jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang berprestasi mencapai 26,7 %</li> <li>4). PKK Aktif meningkat setiap tahunnya mencapai 100 %</li> </ol>	1. Peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1.1. Penguatan kelembagaan masyarakat 1.2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan wilayah 1.3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana wilayah 1.3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana wilayah

**Tabel 6.2.**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Misi II RPJMD Kota Bontang Tahun 2011 – 2016**

No.	Tujuan	Esasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	<p><b>Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme</b></p>	<p>1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN yang ditandai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1). Tersedianya Rencana Aksi Daerah</li> <li>2). Opini BPK terhadap audit Laporan Keuangan Wajar Tanpa Penguculan (WTP);</li> <li>3). Pemanfaatan hasil pengawasan dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik mencapai 100%</li> <li>4). Pelaksanaan SPIP di Lingkungan Perikot Bontang sesuai diagnostic assesment mencapai 100 %</li> <li>5). Terlaksananya system e-Audit</li> </ul> <p>2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, yang ditandai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1). Pelaksanaan e-Government yang mencakup e-Budgeting, e-Project Planning, e-Procurement, e-Delivery, e- controlling, dan e-Performance mencapai 100 %;</li> <li>2). Persentase keterbukaan informasi publik mencapai 100%;</li> </ul> <p>3. Aparatur Pengawas / Pemeriksa yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi mencapai 100%</p>	<p>1. Peningkatan sistem pengawasan intern</p> <p>2. Peningkatan transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah</p> <p>3. Peningkatan kompetensi aparatur pengawas</p>	<p>1.1. Penerapan sistem Pengendalian Internal yang efektif</p> <p>1.2. Implementasi e-Audit</p> <p>2.1. Implementasi e-Government</p> <p>2.2. Penyebarluasan informasi melalui media cetak dan elektronik</p> <p>3.1. Fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pengawas</p>

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		4. Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti mencapai 100 %	4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat	4.1 Pengembangan akses masyarakat dalam penyampaian pengaduan
2.	<b>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</b>	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang memenuhi azas, prinsip dan standar pelayanan publik, yang ditandai: <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Cakupan perijinan melalui pelayanan terpadu satu pintu mencapai 30 jenis perizinan;</li> <li>2). Proses pelayanan perizinan dapat diselesaikan dalam kurun waktu maksimum 5 hari kerja;</li> <li>3). Jumlah unit pelayanan yang berkatagori baik mencapai 36 SKPD;</li> <li>4). Tersusunnya norma dan standar pelayanan publik hingga mencapai 100%</li> <li>5). Tersusunnya norma dan standar prosedur kerja publik hingga mencapai 100%</li> </ol>	1. Peningkatan kinerja pelayanan yang memenuhi azas, prinsip dan standar pelayanan Publik	1.1. Pengembangan pelayanan terpadu s21atu pintu 1.2. Pengembangan norma dan standar pelayanan publik 1.3. Penataan norma dan standar prosedur kerja
3.	<b>Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi</b>	1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah yang ditandai dengan:	1. Pengembangan SDM aparatur yang berakhlak mulia dan profesional	1.1. Pengembangan kecakapan, ketrampilan dan kompetensi SDM aparatur yang berakhlak mulia dan profesional melalui pendidikan dan pelatihan sesuai analisis kebutuhan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1). Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya (standar kompetensi jabatan) mencapai 95%</li> <li>2). Pejabat yang telah memenuhi persyaratan Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan mencapai 100%</li> <li>3). Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugasnya mencapai 100%</li> <li>4). SKPD yang memiliki akuntabilitas kinerja yang baik mencapai 100%</li> <li>5). Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah mencapai nilai B</li> <li>6). Efektifitas peran Lembaga Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) mencapai 100%</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatnya kedisiplinan pegawai yang mencapai 90%</li> <li>3. Meningkatnya kinerja birokrasi pemerintah, yang ditandai dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Kelembagaan (organisasi dan tata kerja) yang proporsional, efektif, efisien yang mencapai 100%</li> <li>2). Tersedianya pedoman dan standar pendayagunaan aparatur yang meliputi 45 dokumen Anjab, 31 dokumen ABK, SKJ dan 2 dokumen Kamus Jabatan</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peningkatan Komitmen Moral Aparatur</li> <li>3. Peningkatan kinerja Birokrasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.2. Pengembangan Akuntabilitas Kinerja</li> <li>1.3. Optimalisasi Peran Lembaga Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dalam peningkatan profesionalisme Aparatur</li> <li>2.1. Pengembangan Budaya Kerja dan Karakter Aparatur</li> <li>3.1. Penataan kelembagaan</li> <li>3.2. Pengembangan pedoman dan standar pendayagunaan aparatur yang meliputi Anjab, ABK, SKJ dan Kamus Jabatan</li> </ol>

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>4. Meningkatnya manajemen kepegawaian daerah, yang ditandai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Diterapkannya sistem aplikasi pegawai pada SKPD yang mencapai 95%</li> <li>2). Tersedianya data pegawai secara akurat</li> <li>3). Semua dokumen / arsip fisik mudah diakses secara lengkap dan benar</li> </ol>	<p>4. Pengembangan Manajemen Kepegawaian Daerah</p>	<p>4.1. Pengembangan Pelayanan yang dapat diakses cepat, tepat dan akurat berbasis teknologi informasi</p>
<p>4.</p>	<p><b>Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efektif</b></p>	<p>1. Meningkatnya kinerja lembaga legeslatif dan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditandai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Raperda yang mendapat persetujuan DPRD sebanyak 75 Raperda</li> <li>2). Program legeslasi daerah sebanyak 108 Raperda</li> <li>3). Jumlah Raperda inisiatif DPRD sebanyak 30 Raperda</li> <li>4). Efektifitas pelaksanaan tugas Kedinasan KDH &amp; Wakil KDH yang mencapai 100%</li> <li>5). Jumlah Peraturan Daerah yang telah ditetapkan sebanyak 65 Perda</li> <li>6). Peraturan Walikota yang ditetapkan sebanyak 20 peraturan</li> <li>7). Kerjasama antar pemerintah daerah bertambah sebanyak 6 MoU</li> </ol>	<p>1. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Fasilitasi peran dan fungsi lembaga legislatif;</li> <li>1.2 Fasilitasi dan penguatan pelayanan kebijakan kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah;</li> <li>1.3 Pengembangan peraturan perundang-undangan dan kerjasama pemerintah daerah</li> </ol>

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>2. Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan yang ditandai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Efektifitas penyelenggaran pemerintahan kecamatan yang mencapai 100%</li> <li>2). Efektifitas pemberdayaan masyarakat kecamatan yang mencapai 100%</li> <li>3). Efektifitas peningkatan sarana / prasarana dan lingkungan kecamatan yang mencapai 100%</li> <li>4). Efektifitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang mencapai 100%</li> <li>5). Efektifitas pemberdayaan masyarakat kelurahan yang mencapai 100%</li> <li>6). Efektifitas peningkatan sarana / prasarana dan lingkungan kelurahan yang mencapai 100%</li> </ol>	<p>2. Peningkatan kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan</p>	<p>2.1. Optimalisasi Peran dan fungsi pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan</p>
5.	<p>Mewujudkan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah</p>	<p>1. Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan daerah yang ditandai :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat menjadi Rp. 123.289.707.827,48</li> <li>2). Opini BPK terhadap audit Laporan Keuangan WTP</li> <li>3). Ketersediaan data aset yang akurat mencapai 100 %</li> </ol>	<p>1. Peningkatan Efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah serta aset daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1.. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;</li> <li>1.2. Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah terpadu;</li> <li>1.3. Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan Aset daerah secara terpadu</li> </ol>

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
6.	<b>Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Daerah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya Perencanaan pembangunan daerah Yang Berkualitas, yang ditandai :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA</li> <li>2). Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA</li> <li>3). Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA</li> <li>4). Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD 100%</li> <li>5). Jumlah Dokumen Rencana Strategis Bidang pemerintahan, sosial dan ekonomi 10 dokumen</li> </ol> </li> <li>2. Meningkatnya komitmen dan peran serta swasta dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dimana program CSR yang sinkron dengan program pemerintah daerah mencapai 60%</li> <li>3. Ketersediaan data untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah mencapai 100 %</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah yang integratif, partisipatif dan komprehensif</li> <li>2. Peningkatan Kemitraan dengan Swasta dalam penyelenggaraan pembangunan</li> <li>3. Pengembangan data dan informasi yang akurat dan terkini</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Fasilitasi perencanaan pembangunan daerah</li> <li>1.2. Fasilitasi perencanaan strategis bidang pemerintahan, sosial, ekonomi, pengembangan wilayah dan infrastruktur</li> <li>2.1. Pembentukan Forum Corporate Social Responsibility (CSR)</li> <li>3.1. Pengembangan data dan informasi daerah</li> </ol>
7.	<b>Mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat serta kewaspadaan dini terhadap potensi bencana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ditandai dengan:</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Optimalisasi Penegakan Perda, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat</li> </ol>



No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1). Cakupan Patroli Petugas satpol PP 3 kali sehari</li> <li>2). Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keselamatan)</li> <li>3). Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 10,71</li> <li>4). Penyelesaian pelanggaran perda mencapai 98%</li> <li>5). Rasio Pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan mencapai 486</li> <li>6). Menurunnya Angka Kriminalitas mencapai 18 per 10.000 penduduk</li> <li>7). Meningkatnya Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) mencapai 50 orang per 10.000 penduduk</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Terwujudnya kewaspadaan dini terhadap potensi bencana yang ditandai :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana (RAD-PB);</li> <li>2). Tim Reaksi Cepat (TRC) menjadi 15 Regu</li> <li>3). Tertanganinya Penanggulangan Bencana 100%</li> </ol> </li> <li>3. Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam masyarakat yang ditandai :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Kader Pembauran mencapai 350 orang;</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peningkatan kemampuan dan kesiapsiagaan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana</li> <li>3. Pembinaan Kesatuan Bangsa dan politik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Fasilitasi Pencegahan dini dan penanggulangan Bencana</li> <li>3.1. Fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan peran organisasi politik dan kemasyarakatan</li> </ol>

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2). Jumlah Forum dialog publik mencapai 30 kegiatan ; 3). Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP mencapai 100; 4). Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah 60 kegiatan.		
8.	<b>Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kearsipan Daerah</b>	1. Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan Daerah yang efektif dan efisien yang ditandai :  1). SKPD yang mengelola Arsip secara Baku menjadi 24,1% 2). Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan mencapai 13 kegiatan 3). Jumlah arsip yang diakuisisi meningkat 598 ML 4). Jumlah inventaris arsip mencapai 33.450 berkas	1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan Daerah secara efektif dan efisien	1.1. Pembinaan dan penyelenggaraan akuisisi, pengolahan dan pelestarian serta pelayanan arsip sebagai sumber informasi.
9.	<b>Mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang terintegrasi secara nasional dalam rangka penyediaan data dan informasi kependudukan sebagai acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan</b>	1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu, yang ditandai :  1). Semua penduduk memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK); 2). Semua bayi yang lahir memiliki akte kelahiran	1. Pemantapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) terpadu	1.1. Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) Terpadu

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"><li>3). Semua pasangan penduduk memiliki akte nikah</li><li>4) Semua masyarakat memiliki KTP</li><li>5). Semua penduduk memiliki akte kelahiran</li><li>6). Tersedianya data base kependudukan yang berskala nasional</li><li>7). Pelaksanaan e-KTP berbasis NIK</li></ul>		

Tabel 6.3.  
Strategi dan Arah Kebijakan Misi III RPJMD Kota Bontang Tahun 2011 – 2016

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	<b>Mewujudkan Kota Bontang yang bersih, hijau dan asri</b>	1. Meningkatnya penanganan sampah menjadi 74,08%  2. Memelihara kondisi RTH eksisting dan meningkatkan luas RTH menjadi 3.330,96 ha atau 22,5%	1. Pengembangan manajemen pengelolaan sampah  2. Pengembangan ruang terbuka hijau	1.1. Peningkatan pengelolaan sampah di TPA yang berkelanjutan 1.2. Pemenuhan sarana prasarana persampahan 1.3. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan 2.1. Gerakan "Bontang Green" dan "one man five tree" 2.2. Peningkatan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas dan kuantitas RTH 2.3. Pembangunan dan revitalisasi taman kota dan RTH 2.4. Penanaman pohon di "catchment area" Kota Bontang 2.5. Perumusan kebijakan RTH
2.	<b>Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan</b>	1. Meningkatnya pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan, yg ditandai : 1). Pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen Amdal mencapai 100% 2). Pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen UKL-UPL mencapai 90%	1. Peningkatan pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan	1.1. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dokumen lingkungan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		3). Pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen SPPL mencapai 90% 2. Meningkatnya pengendalian dan pemantauan mutu sumber air menjadi 90% 3. Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan menjadi 42,5% 4. Meningkatnya ketepatan penegakan hukum lingkungan, yang ditandai : 1). Ketepatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup menjadi 60% 2). Penyelesaian kasus lingkungan hidup menjadi 100% 5. Meningkatnya cakupan pelayanan dan pengelolaan air limbah menjadi 10%	2. Pengendalian dan pemantauan status mutu air 3. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 4. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan 5. Peningkatan pengelolaan air limbah	2.1. pemantauan mutu air di kawasan permukiman dan industri 3.1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 4.1. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan secara adil 5.1. Fasilitasi pengelolaan air limbah bagi masyarakat tidak mampu
3.	<b>Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta penataan ruang</b>	1. Meningkatnya rehabilitasi terumbu karang sebesar 20 ha 2. Meningkatnya rehabilitasi hutan mangrove seluas 150 Ha 3. Meningkatnya rehabilitasi hutan lindung seluas 400 Ha	1. Peningkatan rehabilitasi terumbu karang 2. Peningkatan rehabilitasi hutan mangrove 3. Peningkatan rehabilitasi hutan lindung	1.1. Fasilitasi rehabilitasi terumbu karang 1.2. Peningkatan kapasitas kelembagaan 2.1. Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove 2.2. Peningkatan kapasitas kelembagaan 3.1 Fasilitasi rehabilitasi hutan lindung 3.2 Peningkatan kapasitas kelembagaan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>4. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW menjadi 78%</p> <p>5. Meningkatkan pengendalian dan pemantauan ketersediaan aquifer kota Bontang yang ditandai :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1). Tersedianya sumur pantau sebanyak 4 sumur</li> <li>2). Tersedianya sumur imbuhan sebanyak 43 sumur</li> </ul>	<p>4. Pengendalian pemanfaatan ruang berdasar pada Rencana Tata Ruang</p> <p>5. Mengendalikan pemanfaatan air bawah tanah</p>	<p>4.1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Rinci dan Zonas</p> <p>4.2. Peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang</p> <p>5.1. Pengkajian potensi air bawah tanah dan recharge dan discharge area</p> <p>5.2. Pemantauan penurunan air muka bawah tanah</p> <p>5.3. Pembuatan sumur pantau</p> <p>5.4. Pembuatan sumur imbuhan (injection well)</p>

Tabel 6.4.  
Strategi dan Arah Kebijakan Misi IV RPJMD Kota Bontang Tahun 2011 – 2016

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah	<p>1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana jaringan jalan 2,18%</p> <p>2. Meningkatnya trotoar dan drainase saluran pembuangan air sepanjang jalan 34,85%</p> <p>3. Menurunnya kondisi drainase tidak tersumbat menjadi 3%</p> <p>4. Meningkatnya cakupan pelayanan air minum/air bersih menjadi 80%</p> <p>5. Meningkatnya tingkat waktu tanggap daerah layanan menjadi 80%</p>	<p>1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana &amp; prasarana jaringan jalan</p> <p>2. Peningkatan penanganan sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir</p> <p>3. Peningkatan penanganan sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir</p> <p>4. Peningkatan pelayanan air minum/air bersih</p> <p>5. Peningkatan cakupan pelayanan bencana kebakaran</p>	<p>1.1. Peningkatan Jalan dan Jembatan</p> <p>1.2. Pembangunan Jalan dan Jembatan</p> <p>1.3. Rehab / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</p> <p>2.1. Normalisasi saluran drainase perkotaan</p> <p>2.2. Pengembangan waduk dan Dam Pengendali</p> <p>3.1. Normalisasi saluran drainase perkotaan</p> <p>3.2. Penurunan sungai</p> <p>3.3. Pembuatan Drainase</p> <p>4.1. Fasilitasi pembangunan dan optimalisasi Water Treatment Plan (WTP)</p> <p>4.2. Fasilitasi Penyediaan air minum/air bersih bagi masyarakat tidak mampu</p> <p>5.1. Fasilitasi pengadaan mobil pemadam kebakaran</p> <p>5.2. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kebakaran</p>

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>6. Terpenuhinya kebutuhan tempat pemakaman umum (TPU) 32,30%</p> <p>7. Pemugaran rumah tidak layak huni sebesar 32,89%</p> <p>8. Meningkatnya cakupan pelayanan penerangan jalan umum menjadi 45,29%</p> <p>9. Bertambahnya 2 (dua) sarana dan 1 (satu) prasarana perhubungan</p> <p>10. Meningkatnya fasilitas dan pelayanan perhubungan yang ditandai :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1). Tersedianya fasilitas perbaikan loktuam menjadi 75%</li> <li>2). Bertambahnya traffic light sebanyak 3 unit</li> <li>3). Bertambahnya rambu-rambu jalan sebanyak 126 buah</li> <li>4). Tersedianya peralatan monitor cuaca di bandara umum sebanyak 1 unit</li> </ul> <p>11. Meningkatnya administrasi dan penataan pertanahan yang ditandai :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1). Bertambahnya luas lahan untuk kepentingan umum menjadi 462,35 ha</li> </ul>	<p>6. Pembangunan tempat pemakaman umum (TPU)</p> <p>7. Peningkatan pemugaran rumah tidak layak huni</p> <p>8. Peningkatan pelayanan penerangan jalan umum</p> <p>9. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan</p> <p>10. Peningkatan fasilitas dan pelayanan perhubungan</p> <p>11. Peningkatan administrasi dan penataan pertanahan</p>	<p>6.1. Fasilitas Pengembangan TPU Masyarakat</p> <p>6.2. Fasilitas dan Pembangunan TPU Baru</p> <p>7.1. Fasilitas perbaikan rumah dengan bantuan aladin (Atap, Lantai dan Dinding)</p> <p>7.2. Bedah Kampung</p> <p>7.3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah tidak layak huni</p> <p>8.1. Pemasangan Tiang dan Jaringan Lampu Jalan</p> <p>9.1. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan</p> <p>10.1. Pengadaan prasarana dan fasilitas perhubungan</p> <p>11.1. Pembangunan sistem informasi pertanahan</p> <p>11.2. Peningkatan administrasi pertanahan</p>



No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2). Terinventarisir dan meningkatnya status lahan Pemkot menjadi 373,1 ha 3). Terinventarisir dan terpeliharanya patok batas daerah sebanyak 253 buah 12. Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan listrik menjadi 90%	12. Peningkatan penyediaan energi listrik	11.3. penataan administrasi pertanahan  12.1. Fasilitasi peningkatan penyediaan energi listrik 12.2. Pengembangan energi listrik alternatif
2.	<b>Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan</b>	1. Meningkatnya akses pelayanan dan sumber pendanaan UMKM, yang ditandai : 1). Bertambahnya jumlah UMKM menjadi 72 UMKM 2). Jumlah penyerapan tenaga kerja pada sector UMKM menjadi 14,071% 2. Meningkatnya aktifitas dan kualitas manajemen koperasi menjadi 85%  3. Terwujudnya penataan pasar tradisional sebanyak 3 unit  4. Ketersediaan pangan utama sebesar 100%	1. Pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan UMKM  2. Pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi  3. Pengembangan dan penataan pasar tradisional  4. Ketahanan dan keamanan pangan	1.1. Fasilitasi permodalan UMKM 1.2. Peningkatan akses permodalan usaha  2.1. Penerapan manajemen modern pada koperasi 2.2. Penyehatan koperasi 2.3. Fasilitasi permodalan koperasi 2.4. Pendampingan usaha produktif koperasi 3.1. Revitalisasi pasar-pasar tradisional 3.2. Penataan PKL 4.1. Ketersediaan dan cadangan pangan 4.2. Distribusi dan akses pangan 4.3. Pengembangan pangan lokal (non beras)

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>5. Meningkatnya pelayanan, pengawasan dan penertiban dibidang usaha energi dan sumberdaya mineral, yang ditandai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Kelurahan yang memperoleh jaringan gas rumah tangga sebanyak 2</li> <li>2). Meningkatnya perusahaan yang mendapatkan penerangan teknis penambangan berwawasan lingkungan menjadi 17 perusahaan</li> </ol> <p>6. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan 25%</p> <p>7. Meningkatnya produksi perikanan 10%</p>	<p>5. Peningkatan pelayanan dan pengawasan usaha energy dan sumber daya mineral</p> <p>6. Pengembangan kuantitas dan kualitas obyek dan even-even pariwisata</p> <p>7. Pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya</p>	<p>4.4. Penanganan kerawanan pangan</p> <p>4.5. Meningkatkan konsumsi bahan pangan yang seimbang</p> <p>5.1. Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi gas untuk rumah tangga</p> <p>5.2. Pengawasan kegiatan penambangan galian C</p> <p>5.3. Monitoring eksplorasi air bawah tanah</p> <p>6.1. Fasilitas pengembangan jenis dan obyek wisata unggulan</p> <p>6.2. Pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan</p> <p>6.3. Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata</p> <p>6.4. Pengembangan event wisata unggulan</p> <p>7.1. Pengembangan teknologi penangkapan tangkap dan budidaya perikanan yang efektif</p> <p>7.2. Pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan secara optimal dan lestari</p> <p>7.3. Penguatan pasar produk hasil perikanan dan kelautan</p>

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>8. Meningkatnya cakupan bina kelompok nelayan, petani &amp; peternak menjadi 20%</p> <p>9. Meningkatnya nilai ekspor menjadi US\$ 23.146.383.348,46</p> <p>10. Meningkatnya Jumlah Industri kecil menengah sebesar 5%</p>	<p>8. Peningkatan ekonomi masyarakat pesisir</p> <p>9. Pengembangan iklim usaha</p> <p>10. Pengembangan produk industri unggulan dan peningkatan kemampuan pemanfaatan teknologi</p>	<p>7.4. Penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap dan budidaya skala menengah dan besar</p> <p>8.1. Fasilitas pemberdayaan masyarakat pesisir</p> <p>8.2. Fasilitas pengembangan sumberdaya manusia</p> <p>9.1. Fasilitas usaha peningkatan ekspor</p> <p>10.1. Pengembangan potensi ekonomi local berbasis klaster</p> <p>10.2. Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi</p>
3.	<b>Penciptaan iklim berinvestasi dan penanaman modal serta sektor ekonomi basis</b>	<p>1. Nilai investasi meningkat 10%:</p> <p>2. Terbangunnya kawasan industry baru Kota Bontang, yang ditandai :</p> <p>1). Tersedianya Kawasan Industri baru di Bontang Lestari seluas 465,4 ha</p>	<p>1. Pengembangan kebijakan dan infrastruktur investasi</p> <p>2. Pengembangan kawasan industri baru Kota Bontang</p>	<p>1.1. Pengembangan pelayanan perijinan Investasi</p> <p>1.2. Pengembangan kewirausahaan dan produk unggulan yang berdaya saing</p> <p>1.3. Fasilitas kerjasama dan promosi antar pelaku usaha</p> <p>2.1. Penyediaan lahan untuk kawasan industri baru</p> <p>2.2. Perencanaan kawasan industri baru Bontang Lestari</p>

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2). Tersedianya dokumen perencanaan kawasan industri baru Kota Bontang sebanyak 2 dokumen 3). Tersedianya suatu lembaga pengelola kawasan industri		2.3. Fasilitasi pembentukan kelembagaan pengelola kawasan industri.
4.	Penanggulangan masalah kemiskinan	1. Menurunkan angka kemiskinan menjadi 9%	1. Bantuan Langsung, Pelatihan dan Bantuan Penguatan Permodalan Usaha Mikro & Kecil	1.1. Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Bantuan Sosial Berbasis Keluarga (Bantuan Langsung) 1.2. Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Pelatihan) 1.3. Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil (Permodalan)

WALIKOTA BONTANG,

  
 ADI DARMA

Lampiran V Peraturan Daerah

Nomor : 3 Tahun 2014

Tanggal : 20 Agustus 2014

Tentang : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2011-2016**

## **BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN**

Kebijakan umum pembangunan Kota Bontang tahun 2011-2016 berfungsi sebagai pedoman bagi SKPD dan instansi yang terkait di dalam merumuskan kebijakan dan program sesuai dengan fungsi masing-masing.

Program yang dituangkan ini diderivasi dari kebijakan yang telah dituangkan pada bab sebelumnya. Penyusunan program didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Program pembangunan di Kota Bontang dalam RPJMD tahun 2011-2016 terdiri dari program pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Secara rinci, kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kota Bontang disajikan pada tabel berikut ini.



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		5	6	7	8	9
3.	Meningkatnya kurikulum mata pelajaran yang terintegrasi dengan pendidikan karakter pada satuan pendidikan, Bobot Kurikulum Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Pada Sekolah Negeri maupun swasta menjadi 100%	<p>3. Penciptaan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis dan Kondusif</p> <p>3.1. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Karakter yang terintegrasi dengan semua mata pelajaran sesuai Pendidikan Agama dan PAU (Pendidikan dan Karakter)</p> <p>3.2. Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <p>3.2. Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p>	1. Persentase bobot Kurikulum Pendidikan Agama dan Budi Pekerti pada satuan pendidikan	0%	100%	<p>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</p> <p>Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan</p> <p>Program Pembinaan Olahraga sebagai bagian fungsi pendidikan</p> <p>Program Pembinaan kesenian dan keagamaan sebagai bagian fungsi pendidikan</p>	<p>Pendidikan</p> <p>Pendidikan</p> <p>Pendidikan</p> <p>Pendidikan</p>	<p>Dinas Pendidikan</p> <p>Dinas Pendidikan</p> <p>Dinas Pendidikan</p> <p>Dinas Pendidikan</p>

**Tujuan 2 : Merujudkan Masyarakat Kota Bontang Yang Sehat**

1.	Meningkatnya Kelangkaan Mortal Bayi 2 per 1000 kelahiran hidup	<p>1. Meningkatkan Akses dan cakupan serta mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat</p> <p>1.1. Meningkatkan kesadaran masyarakat bagi perilaku masyarakat dan meningkatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat, serta tenaga kesehatan bayi</p>	1. Kelangsungan Hidup Bayi per 1000 kelahiran	992,2	994,2	<p>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</p> <p>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular</p> <p>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</p> <p>Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak</p>	<p>Kesehatan</p> <p>Kesehatan</p> <p>Kesehatan</p> <p>Kesehatan</p> <p>Kesehatan</p> <p>Kesehatan</p>	<p>Dinas Kesehatan, RSUD, Setda</p> <p>Dinas Kesehatan</p> <p>Dinas Kesehatan, RSUD, Setda</p> <p>Dinas Kesehatan</p> <p>Dinas Kesehatan</p> <p>Dinas Kesehatan</p>
2.	Meningkatnya Angka Harapan Hidup menjadi 72, 85 tahun	<p>2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penerapan pola hidup sehat dan pengembangan lingkungan sehat</p> <p>2.1. Meningkatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, curatif, rehabilitatif dan pengembangan regulasi bidang kesehatan</p>	1. Angka Harapan Hidup	72,25 Tahun	72,85 Tahun	<p>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</p> <p>Program obat dan perbekalan kesehatan</p> <p>Program pengembangan lingkungan sehat</p> <p>Program penanggulangan masalah kesehatan, wabah dan bencana</p> <p>Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia</p> <p>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita</p>	<p>Kesehatan</p> <p>Kesehatan</p> <p>Kesehatan</p> <p>Kesehatan</p> <p>Kesehatan</p> <p>Kesehatan</p> <p>Kesehatan</p>	<p>Dinas Kesehatan, RSUD, Setda</p> <p>Dinas Kesehatan</p> <p>Dinas Kesehatan</p> <p>Dinas Kesehatan, RSUD, Disperindagkop, Kecamatan</p> <p>Dinas Kesehatan</p> <p>Dinas Kesehatan</p> <p>Dinas Kesehatan</p>

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		5	6	7	8	9
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan yang sesuai standar pelayanan menjadi 80%	<p>3. Pemenuhan sarana, prasarana dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Puskesmas</p> <p>3.1. Revitalisasi peran puskesmas dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan</p>	1. Persentase capaian sasaran mutu Puskesmas	54%	80%	<p>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>Program Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Puskesmas Pemukiman dan Lingkungan</p> <p>Program pengembangan manajemen kesehatan</p> <p>Program Peningkatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jawa/Kabupaten/Kota Peningkatan Rumah Sakit</p> <p>Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jawa/Kabupaten/Kota Peningkatan Rumah Sakit</p> <p>Program Rencana dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan</p> <p>Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)</p> <p>Program pengembangan manajemen kesehatan</p> <p>Program Pelayanan Kesehatan Perilaku Hidup Bersih</p> <p>Program Peningkatan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>Program Pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLUD</p>	<p>Kesehatan</p> <p>Kesehatan</p> <p>Kesehatan</p> <p>Kesehatan</p> <p>Kesehatan</p> <p>Kesehatan</p> <p>Kesehatan</p> <p>Kesehatan</p> <p>Kesehatan</p> <p>Kesehatan</p> <p>Kesehatan</p> <p>Kesehatan</p>	<p>Dinas Kesehatan, RSUD, Setda</p> <p>Dinas Kesehatan</p> <p>Dinas Kesehatan, RSUD</p> <p>Dinas Kesehatan, RSUD</p> <p>RSUD</p> <p>Dinas Kesehatan, RSUD</p> <p>Dinas Kesehatan</p> <p>Dinas Kesehatan</p> <p>Dinas Kesehatan</p> <p>Dinas Kesehatan, RSUD</p> <p>RSUD</p>
4.	<p>Pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan, yang ditandai :</p> <p>1. Tercukupinya tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan 100% (baik kualitas maupun kuantitas)</p> <p>2. Prosentase SDM kesehatan yang berpendidikan minimal DiV/S1 sesuai kompetensinya</p>	<p>4. Pemenuhan kuantitas dan Peningkatan kualitas SDM Kesehatan</p> <p>4.1. Rekrutmen tenaga kesehatan sesuai kebutuhan dan peningkatan kapasitas SDM kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan</p>	<p>1. Jumlah puskesmas dan UPT yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar (jumlah, jenis dan kompetensi)</p> <p>2. Prosentase SDM kesehatan yang berpendidikan minimal DiV/S1 sesuai kompetensinya</p>	0	5 Unit	<p>Program peningkatan kualitas sumber daya manusia</p> <p>Program pengembangan manajemen kesehatan</p> <p>Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia</p>	<p>Kesehatan</p> <p>Kesehatan</p> <p>Kesehatan</p>	<p>Dinas Kesehatan</p> <p>Dinas Kesehatan, RSUD</p> <p>Dinas Kesehatan</p>



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		1	2	7	8	9
5.	Meningkatnya pola hidup sehat masyarakat, yang ditandai :  1. Jumlah masyarakat yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat menjadi 75%  2. Upaya penyehatan dan pengawasan kesehatan lingkungan menjadi 95 %	5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penerapan pola hidup sehat dan pengembangan lingkungan sehat  5.1 Meningkatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan melalui upaya promotif, preventif, curatif, rehabilitatif dan pengembangan regulasi bidang kesehatan	1. Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat  2. Persentase tempat - tempat umum memenuhi syarat kesehatan	10%	75%	Program pengembangan lingkungan sehat  Program Upaya Kesehatan Masyarakat  Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin  Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat  Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular  Program pengembangan lingkungan sehat  Program Pengawasan Obat dan Makanan  Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan  Program penanggulangan masalah kesehatan, wabah dan bencana	Kesehatan  Kesehatan  Kesehatan  Kesehatan  Kesehatan  Kesehatan  Kesehatan	Dinas Kesehatan, RSUD, Disperindagkop, Kecamatan  Dinas Kesehatan  RSUD  Dinas Kesehatan  Dinas Kesehatan  Dinas Kesehatan, RSUD, Disperindagkop, Kecamatan  Dinas Kesehatan, RSUD  RSUD  Dinas Kesehatan

**Tujuan 3 : Mewujudkan Masyarakat Kota Bontang Yang Produktif dan Berdaya Saing**

1.	Persentase angka pengangguran menjadi 6,83%	1. Peningkatan peminatan tenaga kerja  1.1. Fasilitas pengembangan keterampilan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif	1. Persentase angka pengangguran terbuka	7,43%	6,83%	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
2.	Siap sahnya angkatan kerja yang memiliki pasar kerja menjadi 62,11%	2. Peningkatan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja  2.1. Fasilitas informasi bursa kerja  2.1.1. Fasilitas penyelesaian permasalahan hubungan industrial dan pengujian lembaga/instansi perburuh	1. Angka Partisipasi Angkatan Kerja	57,18%	62,11%	Program Peningkatan kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja  Program Peningkatan Kesempatan Kerja  Program Penataan Kebijakan Ketenagakerjaan  Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan  Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja  Tenaga Kerja  Tenaga Kerja  Tenaga Kerja	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja  Dinas Sosial dan Tenaga Kerja  Dinas Sosial dan Tenaga Kerja  Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		5	6	7	8	9
<b>Tujuan 4 : Meningkatkan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Sumberdaya Manusia</b>								
1.	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk terkendali di bawah 2%	<p>Peningkatan cakupan pelayanan keluarga berencana yang berkualitas dan pengendalian kependudukan</p> <p>1.1. Promosi sampai kepada tingkat kepala keluarga</p> <p>1.2. Pemantapan dan pemahaman 4 pilar program KB (PUP, Pengaturan Kelahiran, Ketahanan Keluarga, Peningkatan Kesejahteraan Keluarga)</p> <p>1.3. Sistem pelayanan/pengendalian kependudukan terpadu (terkait disdukpti)</p>	1. Persentase laju pertumbuhan penduduk terkendali	1,59%	1,55%	<p>Program Keluarga Berencana</p> <p>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</p> <p>Program Pelayanan Kontrasepsi</p> <p>Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat</p> <p>Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak</p> <p>Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri</p>	<p>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</p> <p>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</p> <p>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</p> <p>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</p> <p>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</p>	<p>Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB</p> <p>Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB</p> <p>Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB</p> <p>Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB</p> <p>Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB</p>
2.	Meningkatnya Jumlah Akseptor KB, baik laki-laki dan perempuan menjadi 79%	<p>2. Peningkatan Kesadaran Reproduksi sehat, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</p> <p>2.1. Fasilitasi dan penguatan kelembagaan kelompok-kelompok binaan</p> <p>2.2. Fasilitasi dan penguatan profesionalisme tenaga penyuluh</p>	1. Rasio Akseptor KB	76,53%	79%	<p>Program Keluarga Berencana</p> <p>Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah</p> <p>Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU</p> <p>Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri</p> <p>Program Pelayanan Kontrasepsi</p>	<p>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</p> <p>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</p> <p>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</p> <p>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</p> <p>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</p>	<p>Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB</p> <p>Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB</p> <p>Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB</p> <p>Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB</p> <p>Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB</p>

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		5	6	7	8	9
<b>Tujuan 5 : Mengembangkan dan Melestarikan Seni Budaya Tradisional</b>								
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang mencapai 17 kegiatan	1. Pengembangan Pagelaran seni dan kebudayaan lokal 1.1. Fasilitasi Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Kebudayaan Lokal	1. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Meningkat	7 kali	17 kali	Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.	Meningkatnya Pelestarian seni dan budaya masyarakat, yang ditanda :  1. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya menjadi 5 paket  2. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan mencapai 0,42%	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelestarian Seni dan Budaya Tradisional 2.1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Seni dan Kebudayaan	1. Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya  2. Persentase Kelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	1 paket  0,07%	5 paket  0,42%	Program Pengembangan Kerja sama Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata Program Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan Kebudayaan Kebudayaan Kebudayaan Kebudayaan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
<b>Tujuan 6 : Meningkatkan Peran Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Dalam Pembangunan Sumberdaya Manusia Kota Bontang</b>								
1.	Meningkatnya organisasi dan kegiatan pemuda dalam pembangunan, yang ditandai :  1. Jumlah Organisasi Pemuda mencapai 76 organisasi  2. Jumlah kegiatan kepemudaan mencapai 15 kegiatan	1. Penguatan Kualitas Kegiatan Pemuda dan Organisasi 1.1. Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Kegiatan Kepemudaan	1. Organisasi Pemuda  2. Jumlah Kegiatan Kepemudaan	71 organisasi  5 kegiatan	76 organisasi  15 kegiatan	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Program Peningkatan Upaya Pertumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Pemuda dan Olah Raga Pemuda dan Olah Raga Pemuda dan Olah Raga Pemuda dan Olah Raga	Dinas Pemuda Dan Olah Raga Dinas Pemuda Dan Olah Raga Dinas Pemuda Dan Olah Raga Dinas Pemuda Dan Olah Raga
2.	Terlaksananya Pembangunan Balai Remaja (Graha) Selain Milik Swasta sebanyak 1 unit	2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Olahraga 2.1. Fasilitasi Pengembangan sarana dan prasarana olahraga	1. Jumlah Balai Remaja (Graha Pemuda)	0	1 bangunan	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Pemuda dan Olah Raga Pemuda dan Olah Raga	Dinas Pemuda Dan Olah Raga Dinas Pemuda Dan Olah Raga



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		5	6	7	8	9
	2. Peran perempuan dalam lembaga pemerintah hingga mencapai 49,01%		2. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	48,00%	49,01%	Program Gerakan Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak di Permukiman	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan & KB
<b>Tujuan 9 : Pengembangan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</b>								
1.	Melaksanakan Kegiatan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdapat:	1. Peningkatan penanganan pelayanan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)						
	1. Meningkatkan Pelayanan, pelayanan dan rehabilitasi PMKS yang mencapai 4,17%	1.1. Fasilitas penanganan penanganan, pelayanan dan rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Persentase Penanganan, pelayanan dan Rehabilitasi PMKS	3,86%	4,17%	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & PMKS Lainnya	Sosial	Dinas Sosial & Tenaga Kerja, KPM
		1.1.1. Peningkatan layanan terpadu untuk di lain upaya penghapusan penyakit-penyakit NAPZA dan HIV/AIDS				Program Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosial & Tenaga Kerja
		1.1.2. Peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga sosial yang sehubungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masalah sosial lainnya				Program Pembinaan Para Penyandang Cacat & Trauma	Sosial	Dinas Sosial & Tenaga Kerja
		1.1.4. Pengembangan dan rehabilitasi sosial				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosial & Tenaga Kerja
	2. Meningkatkan PMKS yang mendapatkan bantuan sosial hingga mencapai 3,76%		2. Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan sosial	3,18%	3,76%	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) & PMKS Lainnya	Sosial	Dinas Sosial & Tenaga Kerja, KPM
						Program Pelayanan & Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosial & Tenaga Kerja, KPM
						Program Pembinaan Para Penyandang Cacat & Trauma	Sosial	Dinas Sosial & Tenaga Kerja
						Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosial & Tenaga Kerja
						Program Pembinaan Anak Terlantar	Sosial	Dinas Sosial & Tenaga Kerja
						Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo	Sosial	Dinas Sosial & Tenaga Kerja
						Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial	Sosial	Dinas Sosial & Tenaga Kerja
						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
						Program Pengembangan Data/Informasi Daerah	Sosial	Dinas Sosial & Tenaga Kerja

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3		5	6	7	8	9
<b>Tujuan 10 : Pengembangan Pelayanan dan Aksesibilitas Perpustakaan dan Optimalisasi Minat Baca Masyarakat</b>								
1.	Berkembangnya pelayanan dan aksesibilitas perpustakaan dan optimalisasi minat baca masyarakat Kota Bontang, yang ditandai :	1. Pengembangan budaya baca masyarakat						
1.	Bertambahnya perpustakaan sebanyak 14 unit per tahun	1.1. Fasilitasi dan pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan berbasis IT	1. Jumlah Jenis Perpustakaan (perpustakaan umum, khusus di perusahaan /SKPD)	144 Perpustakaan	214 Perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi
2.	Meningkatnya prosentase minat baca masyarakat mencapai 10 % per tahun	1.2. Pengembangan manajemen perpustakaan modern	2. Persentase minat baca masyarakat	46.843 Orang	93.654 Orang	Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi
3.	Meningkatnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah mencapai 10 % /jumlah eks / tahun		3. Persentase koleksi buku di Perpustakaan Daerah	69.596 Eks	536.976 Eks	Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi
						Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		
						Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Perpustakaan	Kantor Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi
<b>Tujuan 11 : Meningkatkan Peran Serta dan Keberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Wilayah</b>								
1.	Meningkatnya peran serta dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan wilayah, yang ditandai :	1. Peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan						
1.	Terbentuknya kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 75 kelompok	1.1. Penguatan kelembagaan masyarakat	1. Jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	0	75 Kelompok	Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
2.	Mempertahankan Posyandu Aktif 100 %	1.2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan wilayah	2. Persentase Posyandu Aktif	100,00%	100,00%	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
3.	Meningkatnya jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang berprestasi mencapai 26,7%	1.3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana prasarana wilayah	3. Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang berprestasi	0	26,70%	Program Keberdayaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
4.	PKK aktif sepanjang tahunnya mencapai 100 %		4. Persentase PKK Aktif	100%	100%	Program Peningkatan Keberdayaan masyarakat	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
						Program Keberdayaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
						Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan/kelurahan	Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM)

**Tabel 7.2**  
**Kebijakan Umum dan Program Pembangunan**

Misi 2 : Meningkatkan kualitas tata pemerintahan yang baik

No	Isi	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Tujuan 1 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme</b>								
I.	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	1. Peningkatan sistem Pengawasan intern						
	1. Tersedianya Rencana Aksi Daerah	1.1. Penerapan sistem Pengendalian Internal yang efektif	1. Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK);	Belum Ada	Ada	1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Inspektorat
	2. Opini BPK terhadap audit Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)		2. Opini BPK terhadap audit Laporan Keuangan	WDP;	WTP	1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Inspektora
	3. Pemanfaatan hasil pengawasan dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik mencapai 100 %		3. Persentase hasil pengawasan yang ditindaklanjuti;	100%	100%	1. Program Menginsentifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Inspektorat
	4. Pelaksanaan SPIP di Lingkungan Pemkot Bontang sesuai diagnostic assesment mencapai 100 %		4. Persentase penerapan SPIP di Lingkungan Pemkot Bontang sesuai diagnostic assesment	10%	100%	1. Program Penyelenggaraan (sistem Pengendalian Intern Pemerintah)SPIP	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Inspektorat
	5. Terlaksananya sistem e-Audit	1.2. Implementasi e-Audit	5. Penerapan e-Audit	Belum Ada	Ada	1. Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Inspektorat
II.	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah, yang ditandai :	2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah						
	1. Pelaksanaan e-Government yang mencakup e-Budgeting, e-Project Planning, e-Procurement, e-Delivery, e-controlling, dan e-Performance mencapai 100%	2.1. Implementasi e-Government	1. Penerapan e-Budgeting, e-Project Planning, e-Procurement, e-Delivery, e-controlling, dan e-Performance	50%	100%	1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Inspektorat

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik mencapai 100%	2.2. Penyebarluasan Informasi melalui media cetak dan elektronik	2. Persentase keterbukaan Informasi publik	-	100%	1. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Inspektorat
3.	Aparatur Pengawas/ Pemeriksa yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya mencapai 100%	3. Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengawasan  3.1. Fasilitasi Pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Pengawas	1. Persentase Aparatur Pengawas/Pemeriksa yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi	Jabatan Fungsional Auditor 12.5 % (3 orang)	Jabatan Fungsional Auditor 100 % (24 orang)	1. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Inspektorat
4.	Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti mencapai 100%	4. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat  4.1. Pengembangan akses masyarakat dalam menyampaikan pengaduan	1. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	1. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat ;	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Inspektorat

**Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik**

1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang memenuhi azas, prinsip dan standar pelayanan publik yang diamanatkan	1. Peningkatan Kinerja pelayanan yang memenuhi azas, prinsip dan standar pelayanan Publik  1.1. Pengembangan pelayanan terpadu satu pintu	1. Cakupan perijinan melalui pelayanan terpadu satu pintu  2. Proses pelayanan perizinan dapat diselesaikan dalam kurun waktu maksimum 5 hari kerja.  3. Jumlah Unit Pelayanan yang berkategori baik;	17 Jenis Perijinan  12 Hari  12 SKPD	30 Jenis Perijinan  5 Hari  24 SKPD	1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  1. Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi  1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  2. Program Peningkatan Tata Pemerintahan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah  Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah  Sekretariat Daerah  Sekretarian Daerah
----	--	---	---	--	---	---	--	--



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4. Tersusunnya Norma dan standar pelayanan Publik	1.2. Pengembangan Norma dan Standar Pelayanan Publik	4. Jumlah Norma dan standar pelayanan minimal	-	100%	1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Minimal	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Seluruh SKPD
	5. Tersusunnya Norma dan standar prosedur kerja	1.3. Penataan Norma dan Standar Prosedur Kerja	5. Jumlah Norma dan standar operasional prosedur (SOP)	-	45 SKPD	1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Seluruh SKPD

**Tujuan 3 : Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi**

1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja instansi pemerintahan yang ditandai :  1. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya (standar kompetensi jabatan) mencapai 95 %  2. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan mencapai 100 %  3. Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugasnya mencapai 100 %  4. SKPD yang memiliki akuntabilitas kinerja yang baik mencapai 100%  5. Nilai evaluasi akuntabilitas Kinerja Pemerintah mencapai nilai B	1. Pengembangan SDM aparatur yang berakhlak mulia dan profesional  1.1. Pengembangan kecakapan, ketrampilan dan kompetensi SDM aparatur yang berakhlak mulia dan profesional melalui pendidikan dan pelatihan sesuai analisis kebutuhan  1.2. Pengembangan Akuntabilitas Kinerja	1. Presentase Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya (standar kompetensi jabatan)  2. Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan  3. Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugas  4. Persentase SKPD dengan akuntabilitas kinerja yang baik  5. Hasil nilai evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	75%  80%  60%  60%  Nilai D	95%  100%  100%  100%  Nilai B	1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur  1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur  1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur  1. Program Pengembangan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Kinerja dan Keuangan  2. Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BKD  BKD  Seluruh SKPD  Inspektorat, Sekretariat Daerah  Inspektorat, Sekretariat Daerah
----	---	--	--	---	--	--	--	--

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6. Efektifitas peran Lembaga Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) mencapai 100 %	1.3. Optimalisasi Peran Lembaga Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dalam peningkatan profesionalisme Aparatur	6. Efektifitas peran Lembaga Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	-	100%	1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Daerah
2.	Meningkatnya kedisiplinan pegawai yang mencapai 90%	2. Peningkatan Komitmen Moral Aparatur 2.1. Pengembangan Budaya Kerja dan Karakter Aparatur	1. Persentase tingkat disiplin pegawai	70%	90%	1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BKD
3.	Meningkatnya kinerja birokrasi pemerintahan, yang ditandai : 1. Kelembagaan (organisasi dan tata kerja) yang proporsional, efektif, efisien yang mencapai 100% 2. Tersedianya pedoman dan standar pendayagunaan aparatur yang meliputi ANjab, ABK, SKJ dan Kamus Jabatan	3. Peningkatan kinerja Birokrasi 3.1. Penataan kelembagaan 3.2. Pengembangan pedoman dan standar pendayagunaan aparatur yang meliputi ANjab, ABK, SKJ dan Kamus Jabatan	1. Persentase kelembagaan (organisasi dan tata kerja) yang proporsional, efektif dan efisien 2. Tersedianya pedoman dan standar pendayagunaan aparatur yang meliputi :  ABK ANJAB Dok Kamus Jabatan	- SKJ 559 Struktural  14 Dok ABK - -	100%  SKJ Struktural  45 Dok ABK 45 Dok Anjab 2 Dok Kamus Jabatan	1. Program Penataan Kelembagaan  1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BKD, Sekretariat Daerah  Sekretariat Daerah
4.	Meningkatnya manajemen kepegawaian Daerah, yang ditandai : 1. Diterapkannya sistem aplikasi pegawai pada SKPD yang mencapai 95%. 2. Tersedianya data semua pegawai secara akurat. 3. Semua Dokumen/arsip fisik mudah diakses secara lengkap dan benar	4. Pengembangan Manajemen Kepegawaian Daerah 4.1. Pengembangan Pelayanan yang dapat diakses cepat, tepat dan akurat berbasis teknologi Informasi	1. Penerapan sistem aplikasi kepegawaian 2. Persentase Data Kepegawaian yang terkini dan akurat 3. Persentase dokumen/arsip fisik kepegawaian yang mudah diakses secara lengkap dan benar	0% 80% 70%	100% 100% 100%	1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur  1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur  1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	BKD  BKD  BKD

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Tujuan 4 : Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif</b>								
1.	Meningkatnya kinerja lembaga legislatif dan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang ditandai :	1. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						
	1. Raperda yang mendapat persetujuan DPRD sebanyak 75 Raperda	1.1. Fasilitasi peran dan fungsi lembaga legislatif	1. Jumlah Raperda yang disetujui DPRD;	61 Raperda	136 Raperda	1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Dewan
	2. Program legislasi daerah bertambah sebanyak 108 Raperda		2. Jumlah Program Legislasi daerah;	57 Raperda	165 Raperda	1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Dewan
	3. Raperda Inisiatif DPRD bertambah sebanyak 30 raperda		3. Jumlah Raperda Inisiatif DPRD;	6 Raperda	36 Raperda	1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Dewan
	4. Efektifnya pelaksanaan tugas kedinasan KDH dan Wakil KDH yang mencapai 100%	1.2. Fasilitasi dan penguatan pelayanan kebijakan kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	4. Efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan KDH dan Wakil KDH	100%	100%	1. Program Peningkatan Pelayanan Kadinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Daerah
	5. Jumlah perda yang ditetapkan sebanyak 65 perda	1.3. Pengembangan peraturan perundang-undangan dan kerjasama pemerintah daerah	5. Jumlah Perda yang telah ditetapkan	61 Perda;	126 Perda;	1. Program Penataan Perundang-undangan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Daerah
	6. Peraturan Walikota yang ditetapkan sebanyak 20 peraturan.		6. Jumlah Peraturan Walikota yang telah ditetapkan;	180 Perwali;	200 Perwali;	1. Program Peningkatan Kerjasama antar pemerintah Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Daerah
	7. Kerjasama antar pemerintah daerah bertambah sebanyak 6 MoU.		7. Jumlah MoU Kerjasama antar Pemerintah daerah;	64 MoU	70 MoU	1. Program Peningkatan Kerjasama antar pemerintah Daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Daerah
						2. Program Penataan Daerah Otonomi	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Sekretariat Daerah

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Meningkatnya Kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan, yang ditandai :  1. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang mencapai 100%  2. Efektivitas pemberdayaan Masyarakat Kecamatan yang mencapai 100%  3. Efektivitas peningkatan sarana/prasarana dan lingkungan kecamatan yang mencapai 100%  4. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang mencapai 100%	2. Peningkatan kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan  2.1. Optimisasi Peran dan fungsi pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	1. Persentase efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;  2. Persentase efektivitas pemberdayaan Masyarakat kecamatan;  3. Persentase efektivitas peningkatan sarana / prasarana dan lingkungan kecamatan  4. Persentase efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;	95,63%	100%	1. Program Fasilitas/ Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;  2. Program Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan  3. Program Peningkatan Pembinaan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan  4. Evaluasi dan Pembinaan Perangkat Kecamatan dan Kelurahan  1. Program Fasilitas pemberdayaan Masyarakat Kecamatan;	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	3 Kecamatan  Sekretariat Daerah  Sekretariat, Daerah, Kecamatan dan Kelurahan  Sekretariat, Daerah, Kecamatan dan Kelurahan  3 Kecamatan
				98,24%	100%	1. Program Fasilitas Peningkatan sarana/ Prasarana dan lingkungan Kecamatan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	3 Kecamatan
				93,75%	100%	1. Program Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	15 Kelurahan

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5. Efektifitas pemberdayaan Masyarakat kelurahan yang mencapai 100%		5. Persentase efektifitas pemberdayaan Masyarakat kelurahan;	93%	100%	1. Program Fasilitas pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	15 Kelurahan
	6. Efektifnya peningkatan sarana/ prasarana dan lingkungan kelurahan yang mencapai 100%		6. Persentase efektifitas peningkatan sarana / prasarana dan lingkungan kelurahan	84,70%	100%	2. Program Fasilitas partisipasi Masyarakat  1. Program Fasilitas Peningkatan sarana/ Prasarana dan lingkungan Kelurahan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	15 Kelurahan  15 Kelurahan

**Tujuan 5 : Mewujudkan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah**

1.	Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan daerah yang ditandai:  1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat menjadi Rp. 123.289.707.827,48  2. Opini BPK terhadap audit Laporan Keuangan WTP  3. Ketersediaan data aset yang akurat mencapai 100%	1. Peningkatan Efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah serta aset daerah  1.1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;  1.2. Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah terpadu;  1.3. Peningkatan dan pengembangan sistem pengelolaan Aset daerah secara terpadu	1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp);  2. Opini BPK terhadap audit Laporan Keuangan  3. Ketersediaan data aset yang akurat	60.467.849.778,27  Wajar Dengan Pengecualian (WDP)  85%	123.289.707.827,48  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  100%	1. Program Peningkatan Penerimaan Pendapatan daerah;  1. Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;  1. Program Peningkatan Manajemen Informasi Kekayaan/Aset daerah	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	DPPKA  DPPKA, Inspektorat  DPPKA
----	--	---	--	---	--	---	---	--

**Tujuan 6 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pembangunan Daerah**

	Terwujudnya Perencanaan pembangunan daerah Yang Berkualitas, yang ditandai:  1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	1. Pengembangan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Integratif, partisipatif dan komprehensif  1.1. Fasilitasi perencanaan pembangunan daerah	1. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Tidak Ada	Ada	1. Program Perencanaan Pembangunan	Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
--	--	---	---	-----------	-----	------------------------------------	--------------------------------	---------

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		2. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	2. Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
	3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		3. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	3. Program Pengembangan data/ Informasi	Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
	4. Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD		4. Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD	95%	100%	4. Program <del>Dukungan Perencanaan Pembangunan Daerah</del>	Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
	5. Jumlah Dokumen Rencana Strategis Bidang pemerintahan, sosial dan ekonomi	1.2. Fasilitasi perencanaan strategis bidang pemerintahan, sosial, ekonomi, pengembangan wilayah dan infrastruktur	5. Jumlah Dokumen Rencana Strategis Bidang pemerintahan, sosial dan ekonomi	2 dokumen	10 dokumen	1. Program Perencanaan Pembangunan	Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
						2. Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
						1. Program Perencanaan Pembangunan	Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
						2. Program Pengembangan data/ Informasi	Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
						1. Program Perencanaan Pembangunan	Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
						2. Program Pengembangan data/ Informasi	Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
						1. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar;	Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang Kota
						2. Program Perencanaan Pembangunan ekonomi	Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum
						3. Program Perencanaan Sosial dan Budaya;	Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
						4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam;	Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
						5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
						6. Program Perencanaan Tata Ruang	Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda, Dinas Tata Ruang Kota
						7. Program Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda, Dinas Tata Ruang Kota



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6. Menurunnya Angka Kriminalitas mencapai 18 per 10.000 penduduk		6. Angka Kriminalitas	20	18	1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	Kesbang dan Politik dalam Negeri	Badan Kesbangpol-linmas; Kantor Satpol PP
	7. Meningkatnya Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) mencapai 50 orang per 10.000 penduduk		7. Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk	49	50	1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kesbang dan Politik dalam Negeri Kesbang dan Politik dalam Negeri	Badan Kesbangpol-linmas; Kantor Satpol PP Badan Kesbangpol-linmas; Kantor Satpol PP
2.	Terwujudnya kewaspadaan dini terhadap potensi bencana yang ditandai dengan:  1. Tersedianya Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana (RAD-PB);  2. Tim Reaksi Cepat (TRC)  3. Tertanganinya Penanggulangan Bencana	2. Peningkatan kemampuan dan kesiapsiagaan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana  2.1. Fasilitasi Pencegahan dini dan penanggulangan Bencana	1. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana (RAD-PB);  2. Tim Reaksi Cepat (TRC)  3. Optimalisasi Penanggulangan Bencana	-  1 regu  100%	Ada  15 regu  100%	1. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam 2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal  1. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam 2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan  1. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri  Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri  Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol- linmas  Badan Kesbangpol- linmas  Badan Kesbangpol- linmas
3.	Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam masyarakat yang ditandai dengan :  1. Kader Pembauran mencapai 350 orang.;  2. Forum dialog publik yang mencapai yang mencapai 30 kegiatan.;  3. Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP mencapai 100;  4. Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah.	3. Pembinaan Kesatuan Bangsa dan politik  3.1. Fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan peran organisasi politik dan kemasyarakatan	1. Jumlah Kader Pembauran;  2. Jumlah Forum dialog publik;  3. Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP;  4. Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah.	60 orang  9 kegiatan  3 kegiatan  10 kegiatan	350 orang  30 kegiatan  100 kegiatan  60 kegiatan	1. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;  1. Program Pengembangan Wawasan pembangunan  1. Program Pendidikan Politik Masyarakat;  1. Program Pendidikan Politik Masyarakat;	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri  Kesbang dan Politik dalam Negeri  Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri  Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol- linmas  Badan Kesbangpol-linmas; Kantor Satpol PP  Badan Kesbangpol- linmas  Badan Kesbangpol- linmas





Tabel 7.3  
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bontang

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Tujuan 1 : Mewujudkan Kota Bontang yang bersih, hijau dan seri</b>								
1.	Meningkatkan persentase tempat sampah 70%	1. Pengembangan manajemen pengelolaan sampah  1.1. Meningkatkan pengelolaan sampah diTPA yang berkelanjutan 1.2. Pemertahan sarana persampahan 1.3. Membenarkan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan pemanfaatan teknologi rumah lingkungan	1. Persentase penanganan sampah	71,29%	74,08%	1. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup; Dinas Kebersihan Pertamanan & PMK; Dinas Pekerjaan Umum
2.	Membudaya kembali RTH melalui dan meningkatkan luas RTH menjadi 3.330,96 ha atau 22,5%	1. Pengembangan ruang terbuka hijau  2.1. Benda "Bentang Green" dan "kota man hijau kota"  2.2. Peningkatan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas dan kuantitas RTH  2.3. Pembangunan dan revitalisasi taman kota dan RTH  2.4. Penanaman pohon di "catchment area" Kota Bontang	1. Luas taman kota/RTH	2.961,46 ha (20%)	3.330,96 Ha (22,5%)	1. Program pengelolaan ruang terbuka hijau  2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang  3. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan  4. Program peningkatan sarana prasarana aparatur dan administrasi pertanian  5. Program Perencanaan Penataan Ruang	Lingkungan Hidup; Penataan Ruang; Kehutanan  Lingkungan Hidup; Penataan Ruang; Kehutanan  Lingkungan Hidup; Penataan Ruang; Kehutanan  Lingkungan Hidup; Penataan Ruang; Kehutanan  Lingkungan Hidup; Penataan Ruang; Kehutanan	Badan Lingkungan Hidup; Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian; Dinas Kebersihan Pertamanan & PMK; Sekretariat Daerah  Badan Lingkungan Hidup; Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian; Dinas Kebersihan Pertamanan & PMK; Sekretariat Daerah  Badan Lingkungan Hidup; Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian; Dinas Kebersihan Pertamanan & PMK; Sekretariat Daerah  Badan Lingkungan Hidup; Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian; Dinas Kebersihan Pertamanan & PMK; Sekretariat Daerah

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2.5 Perumusan kebijakan ruang terbuka hijau				6. Program Pemanfaatan Ruang	Lingkungan Hidup; Penataan Ruang; Kehutanan	Badan Lingkungan Hidup; Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian; Dinas Kebersihan Pertamanan & PMK; Sekretariat Daerah
<b>Tujuan 2 : Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan</b>								
1.	Meningkatnya pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan, yang ditandai :  1. Pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen AMDAL mencapai 100%  2. Pengawasan Pelaksanaan terhadap pelaksanaan dokumen UKL-UPL mencapai 90%  3. Pengawasan terhadap dokumen SPPL mencapai 90%	1. Peningkatan pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan  1.1. Peningkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dokumen lingkungan	1. Persentase pengawasan AMDAL  2. Persentase pengawasan UKL-UPL  3. Persentase pengawasan SPPL	100%  70%  55%	100%  90%  90%	1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup  2. Program peningkatan pengendalian polusi  3. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan  1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup  2. Program peningkatan pengendalian polusi  3. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan  1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup  2. Program peningkatan pengendalian polusi  3. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan	Lingkungan Hidup  Lingkungan Hidup  Lingkungan Hidup  Lingkungan Hidup  Lingkungan Hidup  Lingkungan Hidup  Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup; Dinas Kesehatan; Disperindagkop; Dinas Perhubungan dan Informatika  Badan Lingkungan Hidup; Dinas Perhubungan dan Informatika  Badan Lingkungan Hidup  Badan Lingkungan Hidup  Badan Lingkungan Hidup  Badan Lingkungan Hidup  Badan Lingkungan Hidup
2.	Meningkatnya pengendalian dan pemantauan mutu sumber air menjadi 90%	2. Pengendalian dan pemantauan status mutu air  2.1. Pemantauan mutu air di kawasan permukiman dan Industri	1. Persentase sumber air yang dipantau	71%	90%	1. Program pengembangan kherja pengelolaan air minum dan air limbah	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup; Dinas Pekerjaan Umum
3.	Menurunnya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan menjadi 42,5%	3. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan  3.1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	1. Persentase pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	45%	42,5%	1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup  2. Program peningkatan pengendalian polusi	Lingkungan Hidup  Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup; Dinas Kesehatan; Disperindagkop; Dinas Badan Lingkungan Hidup;

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Meningkatnya penegakan hukum lingkungan, yang ditandai :  1. Ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup menjadi 60%  2. Penyelesaian kasus lingkungan hidup menjadi 100%	4. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan  4.1. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan secara adil	1. Persentase ketaatan terhadap peraturan Undang Undang Bidang Lingkungan Hidup  2. Presentase Penegakkan Hukum Lingkungan	50%  83,0%	60%  100%	1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup  2. Program peningkatan pengendalian polusi  3. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan  1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup  2. Program peningkatan pengendalian polusi  3. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan	Lingkungan Hidup  Lingkungan Hidup  Lingkungan Hidup  Lingkungan Hidup  Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup  Badan Lingkungan Hidup  Badan Lingkungan Hidup  Badan Lingkungan Hidup  Badan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan Informatika  Badan Lingkungan Hidup
5.	Meningkatnya cakupan pelayanan dan pengelolaan air limbah menjadi 10%	5. Peningkatan pengelolaan air limbah  5.1. Fasilitasi pengelolaan air limbah bagi masyarakat tidak mampu	1. Persentase penyediaan pengelolaan air limbah di perumahan	4,8%	10%	1. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup

**Tujuan 3 : Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta penataan ruang**

1.	Meningkatnya rehabilitasi terumbu karang sebesar 20 ha	1. Peningkatan rehabilitasi terumbu karang  1.1. Fasilitasi rehabilitasi terumbu karang  1.2. Peningkatan kapasitas kelembagaan	1. Meningkatnya Luasan Terumbu Karang Yang Baik	3.231,8 Ha (86,71%)	3.251,8 Ha (87,25%)	1. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam  2. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan  3. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut  4. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	Lingkungan Hidup  Kelautan dan perikanan  Kelautan dan perikanan  Kelautan dan perikanan	Badan Lingkungan Hidup; Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian  Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian  Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian  Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian
----	--	---	---	---------------------	---------------------	---	--	--

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Meningkatnya rehabilitasi hutan mangrove seluas 150 ha (666.600 pohon)	2. Peningkatan rehabilitasi hutan mangrove  2.1. Fasilitasi rehabilitasi hutan mangrove  2.2. Peningkatan kapasitas kelembagaan	1. Meningkatnya Luasan Hutan Mangrove Yang Baik	1.522 H (73,46%)	1.672 Ha (80,69%)	1. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam  2. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakliraan iklim laut  3. Program rehabilitasi hutan dan lahan  4. Program pemanfaatan potensi Sumber daya hutan	Lingkungan Hidup  Kelautan dan perikanan  Kehutanan  Kehutanan	Badan Lingkungan Hidup; Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian  Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian  Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian  Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian
3.	Meningkatnya rehabilitasi hutan lindung seluas 400 ha (8,54%)	3. Peningkatan rehabilitasi hutan lindung  3.1. Fasilitasi rehabilitasi hutan lindung  3.2. Peningkatan kapasitas kelembagaan	1. Meningkatnya Luas hutan lindung yg baik	3.298 Ha (70,33%)	3.698 Ha (78,87%)	1. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam  2. Program rehabilitasi hutan dan lahan  3. Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan  4. Program pemanfaatan potensi Sumber daya hutan  5. Program Peningkatan Kualitas dan akses Informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup  6. Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan	Lingkungan Hidup  Kehutanan  Kehutanan  Kehutanan  Lingkungan Hidup, Kehutanan  Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup; Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian  Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian  Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian  Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian  Badan Lingkungan Hidup; Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian  Dinas Pekerjaan Umum
4.	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW menjadi 78%	4. Pengendalian pemanfaatan ruang berdasar pada Rencana Tata Ruang  4.1. Penyusunan Rencana Tata Ruang Rinci dan Zonasi	1. Prosentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW	75%	78%	1. Program perencanaan tata ruang  2. Program pemanfaatan ruang  3. Program pengendalian pemanfaatan ruang	Penataan Ruang  Penataan Ruang  Penataan Ruang	Dinas Tata Ruang Kota, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda  Dinas Tata Ruang Kota; Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian  Dinas Tata Ruang Kota; Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						<p>4. Program lingkungan sehat perumahan</p> <p>5. Program perencanaan dan pengelolaan wilayah laut pesisir dan pulau-pulau kecil</p>	<p>Penataan Ruang</p> <p>Kelautan dan Perikanan</p>	<p>Dinas Tata Ruang Kota; Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian</p> <p>Dinas Tata Ruang Kota; Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian</p>
5.	<p>Meningkatnya Pengendalian dan Pemantauan ketersediaan aquifer Kota Bontang, yang ditandai :</p> <p>1. Tersedianya sumur pantau sebanyak 4 sumur</p> <p>2. Tersedianya sumur imbuhan (injeksi) sebanyak 3 sumur</p>	<p>5. Mengendalikan pemanfaatan air bawah tanah</p> <p>5.1. Pengkajian potensi air bawah tanah dan recharge dan discharge area</p> <p>5.2. Pemantauan penurunan air muka bawah tanah</p> <p>5.3. Pembuatan sumur pantau</p> <p>5.4. Pembuatan sumur imbuhan (injection well)</p>	<p>1. jumlah sumur pantau untuk sumur dalam</p> <p>2. jumlah sumur imbuhan (injeksi)</p>	<p>2 sumur</p> <p>belum ada</p>	<p>4 sumur</p> <p>3 sumur</p>	<p>1. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam</p> <p>2. Program rehabilitasi hutan dan lahan</p>	<p>Lingkungan Hidup, Kehutanan</p> <p>Lingkungan Hidup, Kehutanan</p>	<p>Badan Lingkungan Hidup</p> <p>Badan Lingkungan Hidup; Dinas Perikanan dan Kelautan</p>

**Tabel 7.4**  
**Kebijakan Umum dan Program Pembangunan**  
**Sesuai Misi 4 RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016**

**Misi 4 : Memperkuat struktur ekonomi dan mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik, air bersih serta infrastruktur lainnya**

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Output)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Tujuan 1 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah</b>								
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pemenuhan sarana jaringan jalan 7,10%	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jaringan jalan 1.1. Perbaikan jalan dan jembatan 1.2. Pembangunan Jalan dan Jembatan 1.3 Rehab / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1. Persentase Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Jaringan Jalan	82,82%	85,00%	1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 3. Program Rehab/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keleptakaryaan 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
2.	Meningkatnya trotoar dan drainase/saluran pembuangan air disepanjang jalan 24,85%	2. Peningkatan penanganan sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir 2.1 Normalisasi saluran drainase perkotaan 2.2 Pengembangan waduk dan Dam Pengendali	1. Persentase trotoar dan drainase dengan kondisi baik	13,77%	38,62%	1. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 2. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 3. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 4. Program Pengendali Banjir	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
3.	Menurunnya kondisi drainase tidak tersumbat menjadi 3%	3. Peningkatan penanganan sistem jaringan drainase dan pengendalian banjir 3.1 Normalisasi saluran drainase perkotaan 3.2 Penurapan sungai 3.3 Pembuatan Drainase	1. Persentase drainase dalam kondisi tidak tersumbat	6,00%	3,00%	1. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 3. Program Pengendalian Banjir 4. Program Perbaikan dan Rehabilitasi Saluran Drainase/ Gorong-gorong 5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya.	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
4.	Meningkatnya cakupan pelayanan air minum/air bersih menjadi 80%	4. Peningkatan pelayanan air minum/air bersih 4.1 Fasilitas pembangunan dan optimalisasi Water Treatment Plan (WTP) 4.2 Fasilitas Penyediaan air minum/air bersih bagi masyarakat tidak mampu	1. Persentase cakupan pelayanan air bersih untuk rumah tangga	52,30%	80,00%	1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Meningkatnya tingkat waktu tanggap daerah layanan menjadi 80%	5. Peningkatan cakupan pelayanan bencana kebakaran  5.1. Fasilitasi pengadaan mobil pemadam kebakaran 5.2. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan kebakaran	1. Tingkat waktu tanggap wilayah manajemen kebakaran	80,00%	80,00%	1. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Perumahan	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran
6.	Terpenuhinya kebutuhan tempat pemakaman umum (TPU) 32,30%	6. Pembangunan tempat pemakaman umum (TPU)  6.1. Fasilitasi Pengembangan TPU Masyarakat 6.2. Fasilitasi dan Pembangunan TPU Baru	1. Persentase daya tampung TPU per jumlah penduduk	32,30%	32,30%	1. Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Perumahan	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran
7.	Pemugaran rumah tidak layak huni sebesar 32,89%	7. Peningkatan pemugaran rumah tidak layak huni  7.1. Fasilitasi perbaikan rumah dengan bantuan aladin (Atap, Lantai dan Dinding) 7.2. Bedah Kampung 7.3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Rumah tidak layak huni	1. Persentase terbangunnya rumah layak huni	17,40%	50,29%	1. Program Penataan Permukiman Lingkungan  2. Program Pengembangan Perumahan  3. Program Lingkungan Sehat Perumahan  4. Program Peningkatan Infrastruktur Permukiman  5. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat Tumbuh	Perumahan  Perumahan  Perumahan  Pekerjaan Umum  Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja  Dinas tata Ruang Kota; Dinas Pekerjaan Umum  Dinas Kebersihan, Pertamanan dan PMK, Dinas tata Ruang Kota dan Dinas Pekerjaan Umum  Dinas Pekerjaan Umum  Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum
8.	Meningkatnya cakupan pelayanan penerangan jalan umum menjadi 45,29%	8. Peningkatan pelayanan penerangan jalan umum  8.1. Pemasangan Tiang dan Jaringan Lampu Jalan	1. Persentase cakupan pelayanan penerangan jalan umum	30,59%	45,29%	1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum (PJU)  2. Program Pemeliharaan/Pengembangan Sistem Kelistrikan dan Penerangan Jalan	Perumahan  Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran  Dinas Kebersihan, Pertamanan dan PMK; Dinas Pekerjaan Umum
9.	Bertambahnya 2 (dua) sarana dan 1 (satu) prasarana perhubungan.	9. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan  9.1. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan	1. - Sarana perhubungan  - Prasarana perhubungan	7  0	9  1	1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan  2. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Perhubungan  Perhubungan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika



No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Meningkatnya fasilitas dan pelayanan perhubungan yang ditandai :  1. Tersedianya fasilitas pelabuhan Loktuau menjadi 75%  2. Bertambahnya traffic light sebanyak 3 Unit  3. Bertambahnya rambu-rambu jalan menjadi 126 buah  4. Tersedianya peralatan monitor cuaca di bandara umum sebanyak 1 unit.	10. Peningkatan fasilitas dan pelayanan perhubungan  10.1 Pengadaan prasarana dan fasilitas perhubungan	1. Persentase Ketersediaan Fasilitas pelabuhan loktuau  2. Jumlah traffic light  3. Jumlah rambu-rambu jalan  4. Fasilitas perhubungan udara	55%  12 Unit  624 buah  0	75%  15 Unit  750 buah  1 Unit	1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan  1. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ  1. Program Pengendalian dan pengamanan Lalu lintas  1. Program pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan  Program Sosialisasi KKOP dan Pembinaan Bidang Postel	Perhubungan  Perhubungan  Perhubungan  Perhubungan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
11.	Meningkatnya administrasi dan penataan pertanahan, yang ditandai :  1. Bertambahnya luas lahan untuk kepentingan umum menjadi 462,35 ha  2. Terinventarisir dan meningkatnya status lahan pemkot menjadi 373,1 ha  3. Terinventarisir dan terpeliharanya patok batas daerah sebanyak 253 buah	11. Peningkatan administrasi dan penataan pertanahan  11.1 Pembangunan sistem Informasi pertanahan  11.2 Peningkatan administrasi pertanahan  11.3 Penataan administrasi pertanahan	1. Lahan yang tersedia utk kepentingan umum  2. Inventarisasi dan peningkatan status lahan pemkot  3. Inventarisasi dan pemeliharaan patok batas daerah	433,35 ha  20,6 ha  13 buah	889,05 ha  373,1 ha  253 buah	1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Sistem Administrasi Pertanahan  1. Program Peningkatan Administrasi Pertanahan  1. Program Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kawasan Perbatasan  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah  3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintah Daerah	Pertanahan  Pertanahan  Pertanahan  Pekerjaan Umum  Pekerjaan Umum	Bagian Pemerintahan Setda  Bagian Pemerintahan Setda  Bagian Pemerintahan Setda  Dinas Pekerjaan Umum  Dinas Pekerjaan Umum
12.	Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan listrik menjadi 90%	12. Peningkatan penyediaan energi listrik  12.1 fasilitasi peningkatan penyediaan energi listrik  12.2 Pengembangan energi listrik alternatif	1. Prosentase cakupan pemanfaatan, pengembangan dan pengendalian energi listrik	77,00%	90,00%	1. Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Energi  2. Program Fasilitasi Peningkatan Cakupan Pelayanan Listrik Masyarakat	Energi dan Sumberdaya Mineral  Energi dan Sumberdaya Mineral	Disperindakop, Sekretariat Daerah  Disperindakop, Sekretariat Daerah

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Tujuan 2 : Meningkatkan pengembangan usaha ekonomi kerakyatan</b>								
1	Meningkatnya akses pelayanan dan sumber pendanaan UMKM, yang ditandai:  1. Bertambahnya Jumlah UMKM menjadi 70 Usaha  2. Jumlah penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM menjadi 14,07%	1. Promosi peran aksisi pelayanan dan sumber pendanaan UMKM  1.1. Fasilitas pemantauan UMKM  1.2. Peningkatan akses permodalan usaha	1. Jumlah UMKM yang dibina  2. Penyerapan tenaga kerja pada sektor UMKM	67  13,40%	72  14,07%	1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yg Kondusif 2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 3. Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi Dan Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM  1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yg Kondusif	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Disperindakop Disperindakop Disperindakop  Disperindakop
2	Meningkatnya aktifitas dan kualitas manajemen koperasi menjadi 85%	1. Pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi  1.1. Penerapan manajemen modern pada koperasi  1.2. Peningkatan koperasi  1.3. Fasilitasi permodalan koperasi  1.4. Pedampingan usaha produktif koperasi	1. Prosentase koperasi aktif	74,56%	85%	1. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah 3. Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi Dan Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM 4. Program Pengembangan Kewirusahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Dan Menengah 5. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yg Kondusif	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Disperindakop Disperindakop Disperindakop Disperindakop Disperindakop
3.	Peningkatnya pelayanan pasar tradisional di kota	1. Pengembangan dan penataan pasar tradisional  1.1. Revitalisasi pasar-pasar tradisional  1.2. Penataan PKL	1. Jumlah pasar tradisional yang ditata ulang	1	3	1. Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan 2. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Disperindakop Disperindakop
4.	Membuktikan angka utama sebesar 100%	1. Ketahanan dan keamanan pangan  1.1. Ketersediaan dan cadangan pangan	1. Kebutuhan pangan utama terpenuhi	100%	100%	1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Pertanian Pertanian	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian, Bagian Ekonomi Setda Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian, Bagian Ekonomi Setda

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4.2 Distribusi dan akses pangan 4.3 Pengembangan pangan lokal (non beras) 4.4 Penanganan kerawanan pangan 4.5 Meningkatkan konsumsi bahan pangan yang seimbang				3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 5. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan 6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 7. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 10. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 11. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 12. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 13. Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Pertanian Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Perdagangan	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Disperindakop
5.	Meningkatnya pelayanan, pengawasan dan penertiban di bidang usaha energi dan sumber daya mineral, yang ditandai :  1. Bertambahnya jumlah keurahan yang memperoleh jaringan gas rumah tangga  2. Meningkatnya perusahaan yang mendapat penerangan teknis penambangan berwawasan lingkungan menjadi 17 perusahaan	5. Peningkatan pelayanan dan pengawasan usaha energi dan sumberdaya mineral  5.1 Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi gas untuk rumah tangga  5.2 Pengawasan kegiatan penambangan gallan C	1. Prosentase kelurahan yang telah dibangun instalasi gas rumah tangga  2. Jumlah perusahaan yang telah mendapatkan penerangan teknis penambangan yang berwawasan lingkungan	0  3	13,3%  17	1. Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Energi  1. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan	Energi dan Sumberdaya Mineral  Energi dan Sumberdaya Mineral	Disperindakop  Disperindakop

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sebesar 25%	5.3 Monitoring eksplorasi air bawah tanah 6. Pengembangan kuantitas dan kualitas obyek dan even-event pariwisata 6.1 Fasilitasi dan pengembangan Jenis dan obyek wisata unggulan 6.2 Pengembangan sarana prasarana kepariwisataan 6.3 Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata 6.4 Pengembangan event wisata unggulan	1. Jumlah kunjungan wisatawan	3.915	4.895	2. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3. Program Pengembangan Kemitraan	Energi dan Sumberdaya Mineral Pariwisata Pariwisata Pariwisata	Disperindakop Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
7.	Meningkatnya produksi perikanan 10%	7. Pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya 7.1 Pengembangan teknologi penangkapan dan budidaya perikanan yang efektif 7.2 Pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan secara optimal dan lestari 7.3 Penguatan pasar produk hasil perikanan dan kelautan 7.4 Penyediaan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap dan budidaya skala menengah dan besar	1. Prosentase produksi perikanan	79,73%	89,73%	1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 3. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat 4. Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan 5. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
8.	Meningkatnya cakupan bina kelompok nelayan, petani & peternak menjadi 20%	8. Peningkatan ekonomi masyarakat pesisir 8.1 Fasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir 8.2 Fasilitasi pengembangan sumber daya manusia	1. Prosentase cakupan bina kelompok nelayan, petani & peternak	6,54%	20,00%	1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 3. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat 4. Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan 5. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian
9	Meningkatnya nilai ekspor sebesar menjadi US\$ 23.146.383.348,-	9. Pengembangan iklim usaha 9.1 Fasilitasi dalam upaya peningkatan ekspor	1. Nilai ekspor (US \$)	8.564.144.536	23.146.383.348	1. Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor 2. Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan 3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Perdagangan Perdagangan Perdagangan	Disperindakop Disperindakop Disperindakop

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Meningkatnya jumlah industri kecil menengah sebesar 5%	10. Pengembangan produk industri unggulan dan peningkatan kemampuan pemanfaatan teknologi 10.1 Pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis kluster 10.2 Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi	Jumlah industri kecil menengah	961	1.009	1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Industri	Disperindakop Disperindakop
<b>Tujuan 3 : Penciptaan iklim berinvestasi dan penanaman modal serta sektor ekonomi base</b>								
1.	Meningkatnya nilai investasi 30%	1. Pengembangan kebijakan dan infrastruktur investasi 1.1 Pengembangan pelayanan perijinan investasi 1.2 Pengembangan levi rekayasa dan produk unggulan yang bernilai tinggi 1.3 Fasilitas kerjasama dan promosi antar pelaku usaha	1. Nilai Investasi :  - PMDN (Rp)  - PMA (US\$)	560.393.856.000	886.110.456.135	1. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 2. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi 3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 4. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya sarana dan Prasarana Daerah	Penanaman Modal	BPPM, Setda
2.	Terbentuknya kawasan industri baru 4000 hektar yang produktif 1. Tersedianya kawasan industri baru di Bontang Lestari seluas 600,4 Ha 2. Tersedianya dokumen perencanaan kawasan industri baru Kota Bontang seluas 2 Ha kawasan 3. Tersedianya suatu lembaga pengelola kawasan industri	1. Pengembangan kawasan industri baru Kota Bontang 1.1 Penyediaan lahan untuk kawasan industri baru 1.2 Perencanaan Kawasan industri baru Bontang Lestari 1.3 Fasilitas pendirian dan keberlangsungan pengelola kawasan industri	1. Luas lahan yang tersedia untuk kawasan industri baru 2. Dokumen perencanaan kawasan industri 3. Lembaga/badan pengelola kawasan industri baru	64 Ha	465,4 Ha	1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Sistem Administrasi Pertanahan 1. Program Perencanaan Penataan Ruang 1. Program Penataan Struktur Industri	Pertanahan Penataan Ruang Industri	Bagian Pemerintahan Setda Dinas Tata Ruang Kota Disperindakop
<b>Tujuan 4 : Pemengulangan masalah kemiskinan</b>								
1.	Mengurangi angka kemiskinan menjadi 9%	1. Bantuan Langsung Bersifat dan Bantuan Pengantar Periode dan Usaha Milik Ujicob 1.1 Mengurangi Angka Kemiskinan Melalui Bantuan Sosial Bersifat Sekang (Bantuan Langsung) 1.2 Mengurangi Angka Kemiskinan Melalui Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Pekertan) 1.3 Mengurangi Angka Kemiskinan Melalui Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Milik dan Kecil (Pemukil)	1. Persentase Angka Kemiskinan	19%	9%	1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 3. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 4. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Pertanian Pertanian Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan	DPKP DPKP DPKP DPKP

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						5. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Kelautan dan Perikanan	DPKP
						6. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Kelautan dan Perikanan	DPKP
						7. Program Pelatihan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Disperindakop
						8. Program Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Dan Kecil	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Disperindakop
						9. Program Pendidikan Nonformal	Pendidikan	Dinas Pendidikan
						10. Program Pelatihan Bagi Rumah Tangga Miskin	Pemberdayaan Masyarakat Desa	KPM
						11. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
						12. Program Keluarga Berencana	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPPKB
						13. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya	Sosial	Dissosnaker
						14. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Ketenagakerjaan	Dissosnaker
						15. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Ketenagakerjaan	Dissosnaker

WALIKOTA BONTANG,

  
ADI DARMA

Lampiran VI Peraturan Daerah

Nomor : 3 Tahun 2014

Tanggal : 20 Agustus 2014

Tentang : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2011-2016**

## **BAB VIII INDIKASI PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHANPENDANAAN**

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, disusun program-program pembangunan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan selama periode lima tahun. Penyusunan program prioritas tersebut dibuat dengan memperhatikan kebijakan pembangunan RPJPD Kota Bontang Tahap II, Kajian terhadap RTRW Kota Bontang Tahun 2010-2030 dan program prioritas Walikota Terpilih.

Visi dan Misi RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016 merupakan Visi dan Misi Walikota terpilih. Dalam Visi dan Misi tersebut, program unggulan yang diusung Walikota Terpilih dapat disampaikan sebagai berikut :

- a) Membangun infrastruktur yang mencakup listrik dan instalasi air bersih.
- b) Pendidikan dan kesehatan
- c) Program Rp. 50 juta per RT
- d) Kesempatan bekerja/berusaha
- e) Lingkungan hidup
- f) Membangun komitmen bersama yang mencakup infrastruktur, ekonomi (penanggulangan kemiskinan), pelayanan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan,

Berdasarkan data-data tersebut di atas, maka disusunlah program prioritas pada RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016. Agar lebih terarah, maka pemerintah perlu menetapkan program-program prioritas tahunan yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan pemerintah (RKPD). Program prioritas setiap tahun dapat disampaikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 8.1  
Indikasi Rencana Program Prioritas serta Kebutuhan Pendanaan  
Kota Bontang Tahun 2011 - 2015

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Bontang yang Berkualitas Mulia dan Profesional

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Masa Tensei		SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016						
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	01	Pendidikan		-	61.227.402.500	-	118.802.218.150	-	-	-	103.374.845.000	-	95.162.602.000	-	485.678.630.350	-	99.888.130.248	-		
1	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	9.413.467.000	100%	6.212.881.000	100%	6.926.884.500	100%	6.799.840.000	100%	6.813.257.000	100%	38.166.329.500	100%	7.153.919.650	Dinas Pendidikan
1	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	493.515.000	100%	1.144.303.000	100%	483.065.000	100%	521.225.000	100%	521.225.000	100%	3.163.333.000	100%	547.286.250	Dinas Pendidikan
1	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	200.000.000	100%	99.325.000	100%	50.900.000	100%	50.900.000	100%	115.900.000	100%	517.025.000	100%	121.695.000	Dinas Pendidikan
1	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	255.000.000	100%	160.000.000	100%	369.750.000	100%	369.750.000	100%	369.750.000	100%	1.524.250.000	100%	388.237.500	Dinas Pendidikan
1	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tersejadinya Informasi Kinerja Pembangunan	100%	100%	57.350.000	100%	53.975.000	100%	112.220.000	100%	72.600.000	100%	71.900.000	100%	368.045.000	100%	75.495.000	Dinas Pendidikan
1	01	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1. Meningkatkan APK PAUD sebesar 75 % 2. Penerapan sistem pembelajaran berkarakter (Penerapan Sistem Pendidikan Karakter yang terintegrasi dengan kurikulum PAUD)	46,31%	52%	689.188.000	60%	3.196.850.000	67%	2.459.484.000	74%	2.540.000.000	81%	2.600.000.000	81%	11.465.502.000	88%	6.475.000.000	Dinas Pendidikan
1	01	16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1. Mempertahankan (Meningkatkan) Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD menjadi 100% 2. Mempertahankan (Meningkatkan) Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SMP menjadi 73,38% 3. Meningkatkan kualitas peserta Murni MP didik dan kelulusan SD 100 %, SMP 100 % 4. Meningkatkan kualitas ruang kelas SD 5. Meningkatkan kualitas ruang kelas SMP menjadi 94,91% 6. Meningkatkan jumlah sekolah terakreditasi SD 100 %; SMP 100. % 7. Jumlah SD SBI (1 sekolah)	APK 113,54% APM 98,14%	112% 98,14%	23.938.986.200	113,07% 98,14%	30.382.100.650	114,11% 98,64%	21.886.187.800	115,12% 99,51%	18.237.430.000	116,10% 100%	17.568.220.000	116,10% 100%	112.012.924.650	116,10% 100%	15.770.984.148	Dinas Pendidikan
					APK 107,67% APM 71,76%	106,22% 71,76%	-	107,23% 71,76%	-	108,22% 72,12%	-	109,17% 72,76%	-	110,11% 73,38%	-	110,11% 73,38%	-	110,11% 73,38%	Dinas Pendidikan	
					SD 100% SMP 95,89%	100% 96,00%	-	100% 97,00%	-	100% 98,00%	-	100% 99,00%	-	100% 100%	-	100% 100%	-	100% 100%	Dinas Pendidikan	
					87,18% 84,91%	87,18% 84,91%	-	89,68% 87,41%	-	92,18% 89,91%	-	94,68% 92,41%	-	97,18% 94,91%	-	97,18% 94,91%	-	97,18% 94,91%	Dinas Pendidikan	
					SD 93,22% SMP 93,10%	94,24% 94,10%	-	95,59% 95,48%	-	96,96% 96,86%	-	98,29% 98,24%	-	100,00% 100,00%	-	100% 100%	-	100% 100%	Dinas Pendidikan	
					1	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Dinas Pendidikan	



Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Mesa Transisi		SKPD Penanggung Jawab			
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016							
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		8. Jumlah SMP SBI (2 Sekolah)	2	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	Dinas Pendidikan		
1	01	17	Program Pendidikan Menengah	1. Mempertahankan (Meningkatkan) Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SMA/SMK menjadi 63,26%	APK 108,26%	106,79%	13.591.945.300	107,81%	39.695.637.000	108,81%	26.949.997.000	109,77%	20.882.600.000	110,71%	12.331.000.000	110,71%	113.451.179.300	110,74%	13.000.000.000	Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum	
				APM 61,86%	61,86%	-	61,86%	-	62,17%	-	62,72%	-	63,26%	-	63,26%	-	63,26%	-	63,26%	Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum	
				2. Meningkatkan kualitas peserta didik dan kelulusan SMA/SMK 100%	99,81%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum	
				3. Meningkatkan (Mempertahankan) jumlah SMA terakreditasi sebesar 100%	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum	
				4. Meningkatkan jumlah SMK terakreditasi sebesar 100%	66,87%	66,67%	-	75,0%	-	83,33%	-	91,66%	-	100,00%	-	100%	-	100%	-	100%	Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum
				5. Jumlah sekolah SMK ber ISO 9001-2008 (6 sekolah)	16,67%	-	-	33,34%	-	16,67%	-	16,67%	-	16,67%	-	100%	-	100%	-	100%	Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum
1	01	18	Program Pendidikan Non Formal	1. Terbentuknya 40 lembaga kursus	77,50%	77,50%	778.996.000	83,12%	5.091.246.000	88,74%	1.879.614.400	94,41%	3.985.000.000	100%	3.985.000.000	100%	15.729.856.400	100%	4.150.000.000	Dinas Pendidikan	
				2. Terakreditasinya 40 lembaga	10,00%	10%	-	20%	-	30%	-	40%	-	50%	-	50%	-	50%	-	50%	Dinas Pendidikan
				3. Pengembangan 40 PKH	15,00%	15,00%	-	25,00%	-	35,00%	-	45,00%	-	55,00%	-	55%	-	55%	-	55%	Dinas Pendidikan
				4. Tercapainya 120 dari 994 pengembangan nilai di program PKH bersertifikat kompetensi nasional	17,86%	17,86%	-	38,38%	-	59,92%	-	79,45%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	Dinas Pendidikan
				5. Terbentuknya kelembagaan SKB (1 lembaga)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	Dinas Pendidikan
1	01	20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Persentase guru SD berkeualifikasi S1 menjadi 100%	73,05%	78,89%	3.378.573.000	84,81%	4.037.738.000	90,34%	27.635.998.000	93,45%	13.775.000.000	100%	13.775.000.000	100%	62.502.307.900	100%	15.000.000.000	Dinas Pendidikan; KPAD	
				2. Persentase guru SD berkeualifikasi S2 menjadi 9,98%	1,26%	2,23%	-	4,17%	-	6,10%	-	8,04%	-	9,98%	-	9,98%	-	9,98%	-	9,98%	Dinas Pendidikan
				3. Persentase guru SMP berkeualifikasi S1 menjadi 100%	81,97%	86,53%	-	91,08%	-	96,64%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	Dinas Pendidikan
				4. Persentase guru SMP berkeualifikasi S2 menjadi 22,77%	5,31%	9,48%	-	11,39%	-	15,18%	-	18,89%	-	22,77%	-	22,77%	-	22,77%	-	22,77%	Dinas Pendidikan
				5. Persentase guru SMA/SMK berkeualifikasi S1 menjadi 100%	86,17%	89,67%	-	93,17%	-	96,67%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	Dinas Pendidikan
				6. Persentase guru SMA/SMK berkeualifikasi S2 menjadi 21,5%	5,00%	9,83%	-	11,50%	-	14,83%	-	18,17%	-	21,50%	-	21,50%	-	21,50%	-	21,50%	Dinas Pendidikan

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Masa Transisi		SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2015				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1 01 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya penyediaan data dan informasi bidang pendidikan	100%	100%	5.370.793.000	100%	8.392.050.000	100%	10.991.039.000	100%	1.660.000.000	100%	1.731.260.000	100%	28.145.132.000	100%	1.877.812.500	Dinas Pendidikan
1 01 24	Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan	Meningkatnya APK dan APM	83%	84%	884.607.000	84%	14.277.839.000	89%	23.429.725.000	89%	28.780.500.000	86%	29.570.700.000	100%	96.942.771.000	100%	35.383.700.000	Dinas Pendidikan
1 01 25	Program Pembinaan Olahraga Sebagai Bagian Fungsi Pendidikan	Meningkatnya prestasi atlet pelajar	100%	100%	1.589.975.500	100%	-	100%	-	100%	-	-	-	1.589.975.500	100%	-	Dinas Pendidikan	
1 01 26	Program Peningkatan Manajemen Pendidikan	Meningkatnya bakat seni dan akademik siswa	100%	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	-	-	-	100%	-	Dinas Pendidikan	
1 01 26	Program Peningkatan Manajemen Pendidikan	Meningkatnya Mutu dan Kualitas Pendidikan	-	-	-	-	1.691.223.000	100%	1.733.729.000	100%	5.700.000.000	100%	5.700.000.000	100%	14.814.952.000	100%	5.945.000.000	Dinas Pendidikan
1 01 27	Program Pengembangan Bontang Technopark	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Dinas Pendidikan
1 01 28	Program Pemerataan Mutu Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	-	-	-	-	-	-	2.728.979.000	100%	-	100%	-	100%	2.728.979.000	100%	-	Dinas Pendidikan	
1 01 29	Program Kebermaknaan Pendidikan Berkeadilan	-	-	-	-	-	-	1.822.888.000	100%	-	100%	-	100%	1.822.888.000	100%	-	Dinas Pendidikan	
1 01 30	Program Pengembangan Tata Kelola Lembaga Pendidikan	-	-	-	-	-	-	601.154.000	-	-	-	-	100%	601.154.000	-	-	Dinas Pendidikan	
1 01 31	Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	-	-	-	-	-	-	2.953.698.000	-	-	-	-	100%	2.953.698.000	-	-	Dinas Pendidikan	
1 01 32	Program Pendidikan Inklusif	-	-	-	-	-	-	361.402.000	100%	-	100%	-	100%	361.402.000	100%	-	Dinas Pendidikan	
1 01 33	Program Pengembangan Akademi Komunitas Bontang	-	-	-	-	-	-	1.514.520.000	100%	-	100%	-	100%	1.514.520.000	100%	-	Dinas Pendidikan	
1 01	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	-	100%	606.006.500	100%	2.272.982.500	100%	1.125.475.000	-	-	-	-	100%	4.003.064.000	-	4.003.064.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
1 01	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	-	-	-	100%	104.470.000	100%	107.000.000	-	-	-	-	100%	211.470.000	-	211.470.000	Dinas Pendidikan	
1 02	<b>Kesehatan</b>	-	-	<b>95.692.291.200</b>	-	<b>102.961.546.726</b>	-	<b>118.845.339.900</b>	-	<b>74.780.536.000</b>	-	<b>67.962.588.000</b>	-	<b>525.259.461.826</b>	-	<b>83.162.971.750</b>	-	
1 02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	11.549.846.000	100%	11.206.086.500	100%	9.754.089.500	100%	9.887.360.000	100%	7.555.000.000	100%	49.952.362.000	100%	7.932.750.000	Dinas Kesehatan, RSUD
1 02 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	5.542.952.000	100%	6.775.507.000	100%	9.207.118.000	100%	6.000.000.000	100%	4.750.000.000	100%	32.275.577.000	100%	4.987.500.000	Dinas Kesehatan, RSUD
1 02 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	309.695.000	100%	141.000.000	100%	-	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	747.695.000	100%	157.500.000	Dinas Kesehatan, RSUD

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Masa Transisi		SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	02	05	Kegiatan/Program/Struktur Organisasi yang optimal	100%	100%	2.412.790.000	100%	2.461.211.000	100%	2.343.386.000	100%	1.867.690.000	100%	1.942.990.000	100%	11.047.578.000	100%	2.039.719.500	Dinas Kesehatan, RSUD
1	02	06	Keperawatan/Program/Program/Struktur Organisasi yang optimal	100%	100%	118.125.000	100%	103.125.000	100%	176.145.000	100%	131.870.000	100%	64.500.000	100%	593.785.000	100%	67.725.000	Dinas Kesehatan, RSUD
1	02	08	Program/Program/Struktur Organisasi yang optimal	90%	100%	158.580.000	100%	263.900.000	88%	235.603.000	100%	281.806.000	100%	281.806.000	100%	1.211.895.000	100%	295.896.300	Dinas Kesehatan, RSUD
1	02	12	Program/Program/Struktur Organisasi yang optimal	95%	82%	2.115.533.000	85%	3.483.733.000	87%	3.799.814.000	90%	3.200.000.000	93%	4.350.000.000	95%	16.889.080.000	98%	17.235.000.000	Dinas Kesehatan, RSUD
1	02	19	Program/Program/Struktur Organisasi yang optimal	0,82	0,8	15.679.024.200	1	25.104.523.998	1,1	22.062.234.500	1,2	19.782.000.000	1,3	19.024.000.000	1,4	100.651.562.298	1,5	20.150.000.000	Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah (Sosial), RSUD
			1. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat	-	70%	-	75%	-	80%	-	82%	-	85%	-	87%	-	90%	-	
			2. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
			3. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
			4. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat	81%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
			5. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
			6. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
1	02	20	Program/Program/Struktur Organisasi yang optimal	80%	94%	60.952.500	92%	271.241.500	93%	216.825.000	94%	100.000.000	96%	180.000.000	95%	610.619.000	95%	129.750.000	Dinas Kesehatan, RSUD
1	02	21	Program/Program/Struktur Organisasi yang optimal	58,5%	55%	270.892.500	60%	1.127.004.500	66%	1.032.008.000	72%	956.500.000	75%	1.065.000.000	75%	4.474.203.000	78%	1.140.300.000	Dinas Kesehatan, RSUD
			2. Kesehatan Siaga	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
1	02	22	Program/Program/Struktur Organisasi yang optimal	100%	100%	424.677.500	100%	613.173.000	100%	901.209.500	100%	701.000.000	100%	567.500.500	100%	3.807.760.000	100%	1.015.875.000	Dinas Kesehatan
			2. Persentase bafda gizi buruk	2%	2%	-	1,8%	-	1,5%	-	1,5%	-	1,3%	-	1,3%	-	1,20%	-	Dinas Kesehatan
			3. Cakupan pemberian MP-ASI anak umur 9-24 bn bulan	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
1	02	23	Program/Program/Struktur Organisasi yang optimal	81%	83%	255.126.000	87%	861.908.000	89%	1.689.326.000	90%	1.820.882.000	92%	2.052.339.000	94%	6.779.290.000	96%	2.154.355.950	Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, Kecamatan, Kabupaten, Kecamatan, Kecamatan
			2. Persentase tempat-tempat umum (TPU) sehat	85,0%	85,0%	-	88,0%	-	90,0%	-	92,0%	-	93,0%	-	95%	-	95%	-	
			3. Persentase tempat pengolahan makanan (TPM) sehat	88%	80%	-	83%	-	85%	-	85%	-	87%	-	80%	-	92%	-	



Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Masa Transisi		SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016						
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4. Cakupan kunjungan nifas	89%	89%	-	89%	-	89%	-	90%	-	92%	-	94%	-	94%	-			
		5. Cakupan peserta KB aktif	95%	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-	95%	-			
1	02	33	Program Pengembangan Manajemen Kesehatan	32%	32%	1.089.763.500	75%	779.168.000	75%	731.970.000	100%	818.000.000	100%	350.000.000	100%	3.768.901.500	100%	275.000.000	Dinas Kesehatan	
1	02	36	Program Penanggulangan Masalah Kesehatan Wabah dan Bencana	Cakupan KLB yang dilakukan PE kurang dari 24 jam	100%	100%	39.070.000	100%	154.774.500	100%	178.825.000	100%	150.000.000	100%	-	100%	522.669.500	100%	-	Dinas Kesehatan
1	02	37	Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah (LAB(ESDA)	Meningkatnya sarana dan pelayanan laboratorium kesehatan	-	25%	1.145.472.000	40%	1.775.414.500	50%	4.638.291.000	60%	900.000.000	70%	-	100%	8.457.177.500	100%	-	Dinas Kesehatan
1	02	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya penerapan standar pelayanan publik di bidang kesehatan	100%	100%	10.070.000	100%	84.585.000	100%	58.050.000	100%	25.000.000	100%	60.000.000	100%	234.705.000	100%	63.000.000	RSUD
1	02	10	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terpublikasinya informasi pembangua di Bidang kesehatan	100%	100%	73.460.000	100%	77.200.000	100%	77.250.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	377.930.000	-	-	Dinas Kesehatan, RSUD
1	02		Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit BLUD	Terselenggaranya Pelayanan Rumah Sakit BLUD	-	-	29.500.000.000	-	36.000.000.000	100%	31.500.000.000	100%	32.508.580.000	100%	32.508.580.000	100%	162.017.160.000	100%	13.900.000.000	RSUD
1	02		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terselenggaranya administrasi perkantoran	-	-	-	-	100%	254.233.000	-	-	-	-	100%	254.233.000	100%	254.233.000	RSUD	
1	11		<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>																	
						3.584.508.400		5.201.522.770		4.066.520.840		3.872.158.000		3.689.341.000		20.352.915.374		3.966.259.208		
1	11	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	2.329.348.380	100%	2.882.589.850	100%	1.089.787.500	100%	1.202.052.000	100%	1.243.852.000	100%	8.747.429.830	100%	1.305.834.800	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1	11	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	247.225.920	100%	529.842.920	100%	545.742.040	100%	684.314.000	100%	443.500.000	100%	2.450.624.880	100%	465.675.000	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1	11	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	84.915.000	100%	31.115.000	-	0	100%	31.115.000	100%	31.115.000	100%	178.260.000	100%	139.075.283	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1	11	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	269.200.000	100%	347.862.500	100%	130.300.000	100%	130.300.000	100%	130.300.000	100%	1.007.962.500	100%	311.272.500	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1	11	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tersedianya Informasi Kinerja Pembangunan	100%	100%	69.470.000	100%	53.975.000	100%	81.675.000	100%	66.375.000	100%	66.375.000	100%	337.870.000	100%	47.167.313	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1	11	15	Program Keerasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Meningkatnya keerasian terhadap kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	70%	90%	114.700.000	100%	308.014.000	100%	890.380.500	100%	708.750.000	100%	713.149.000	100%	2.418.933.351	100%	553.080.138	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Keo. Blq Utara
1	11	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya penyelesaian kasus KDRT mencapai 80 %	62%	70%	123.515.000	-	-	-	75%	110.000.000	80%	115.000.000	100%	988.090.000	100%	163.900.000	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Masa Transisi		SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2015				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1 11 18	Program Peningkatan Partisipasi dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Peningkatan peran gender di lembaga pemerintah	48%	48,05%	298.134.100	48,07%	221.260.500	48,08%	789.037.000	48,09%	300.000.000	49,01%	298.500.000	49,01%	1.963.519.813	100%	485.254.375	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1 11	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	61,9	-	-	75%	722.343.000	75%	396.143.500	75%	486.500.000	80%	495.000.000	80%	1.860.000.000	85%	465.000.000	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1 11 10	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terpublikasinya informasi pembanguana di Bidang kesehatan	-	100%	30.000.000	100%	74.450.000	100%	95.705.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	370.155.000	100%	30.000.000	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1 11 10	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tersedianya Dokumen Standar Operasional Prosedur	-	-	-	1 Dok	30.070.000	-	-	-	-	-	-	30.070.000	-	-	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	
1	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terselenggaranya Pemanfaatan Teknologi Informasi	-	-	-	-	-	100%	67.750.000	100%	67.750.000	100%	67.750.000	-	-	-	-	-
1 12	Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera	-	-	2.648.492.000	-	3.060.635.000	-	4.042.755.500	-	4.290.372.000	-	4.422.454.000	-	28.058.951.974	-	5.852.899.568	-	-
1 12 15	Program Keluarga Berencana	Pengendalian angka kelahiran	70%	75%	629.570.000	80%	1.008.720.000	85%	1.317.615.500	90%	1.119.805.000	90%	1.119.805.000	90%	8.821.344.750	90%	1.940.812.500	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1 12 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi	60%	65%	401.842.500	70%	372.715.000	75%	611.461.250	80%	369.030.000	85%	347.193.000	90%	1.538.911.388	95%	263.622.625	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1 12 17	Program Pelayanan Kontrasepsi	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman calon dan peserta KB tentang KB	100%	100%	397.725.000	100%	396.940.000	100%	433.891.250	100%	796.968.000	100%	967.500.000	100%	8.880.279.777	100%	913.034.643	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1 12 18	Program Pembinaan Partisipasi masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang KB	60%	62%	965.596.000	63%	904.122.500	65%	1.337.115.000	63%	1.188.055.000	68%	1.188.255.000	70%	7.007.151.060	72%	1.622.857.600	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1 12 19	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan ibu, bayi dan anak	100%	100%	90.951.000	100%	41.770.000	100%	59.207.500	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	580.410.000	100%	132.000.000	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1 12 23	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Meningkatnya pemberdayaan orangtua dan anggota keluarga lainnya sebagai kelompok bina keluarga	100%	100%	78.932.500	100%	57.320.000	100%	48.055.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	294.307.500	100%	520.102.000	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1 12	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Dan Informasi Dan Konseling KRR	Tersedianya pelayanan informasi dan konseling KRR	-	-	-	100%	75.362.500	100%	48.705.000	100%	510.000.000	100%	510.000.000	100%	1.144.067.500	100%	181.780.000	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1 12	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	Meningkatnya upaya-upaya penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	100%	-	-	100%	22.430.000	100%	18.975.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	131.405.000	100%	20.950.000	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Masa Transisi		SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2015				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1 12	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Tersedianya model operasional BKB-Posyandu-PADU	-			100%	53.020.000	100%	50.120.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000	100%	213.140.000	100%	274.475.200	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1 12 22	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Tersedianya informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	-	100%	83.875.000	100%	128.235.000	100%	87.610.000	100%	76.514.000	100%	69.701.000	100%	445.935.000	100%	63.365.000	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1 13	Sosial		-		6.953.683.401		7.337.019.784		9.128.848.900		5.427.050.000		5.158.723.000		42.962.584.784		4.858.487.285	
1 13 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,00%	100%	2.218.241.401	100%	1.630.095.500	100%	1.454.443.500	100%	1.655.500.000	100%	1.726.000.000	100%	15.809.548.100	100%	1.720.000.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja
1 13 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	717.835.000	100%	484.804.000	100%	489.476.000	100%	501.500.000	100%	472.500.000	100%	2.675.915.000	100%	431.571.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja
1 13 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	47.750.000	100%	29.645.000	100%	0	100%	30.000.000	100%	-	100%	337.750.000	100%	64.575.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja
1 13 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	585.715.000	100%	215.000.000	100%	166.950.000	100%	157.000.000	100%	100.000.000	100%	1.999.605.000	100%	278.250.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja
1 13 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tersedianya Informasi Kinerja Pembangunan	100%	100%	58.400.000	100%	53.725.000	100%	74.300.000	100%	81.300.000	100%	98.973.000	100%	437.600.000	100%	76.125.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja
1 13 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan PMKS Lainnya	Presentasi ... Dan Rehabilitasi PMKS	3,86%	3,92%	610.710.100,00	3,98%	1.238.971.000	4,05%	1.952.820.100	4,11%	430.000.000	4,17%	470.000.000	4,17%	4.702.501.200	4,17%	251.500.000,00	Dinas Sosial Tenaga Kerja
1 13 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terpenuhinya kebutuhan PMKS dan Lansia	100%	100%	2.360.605.400,00	100%	2.268.911.784	100%	3.522.900.000	100%	1.301.500.000	100%	1.075.000.000	100%	10.528.917.184	100%	1.637.478.285,00	Dispendagkop, KPM, Dinas Sosial Tenaga Kerja
1 13 18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Terwujudnya SDM penyandang cacat dan trauma yang terampil	100%	100%	31.950.000	100%	106.845.000	100%	45.825.000	100%	60.000.000	100%	50.000.000	100%	294.420.000	100%	120.000.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja
1 13 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya manajemen pengembangan database PMKS	100%	100%	292.456.500	100%	811.647.500	100%	1.167.634.000	100%	852.250.000	100%	852.250.000	100%	3.976.238.000	100%	225.000.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja, Sekretariat Daerah, KPM
1 13	Program Pembinaan Anak Terlantar	Terwujudnya Pembinaan Anak Terlantar	100%	100%	-	100%	-	100%	0	-	-	-	-	100%	-	-	-	Dinas Sosial Tenaga Kerja
1 13	Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo	Terwujudnya Perlindungan Terhadap Anak Terlantar dan Lanjut Usia	100%	100%	-	100%	155.050.000	100%	56.790.000	100%	210.000.000	100%	215.000.000	100%	636.840.000	100%	60.000.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja
1 13	Program Pembinaan Eke Penyandang Penyakit Sosial	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Eke Penyakit Sosial	100%	100%	-	100%	20.255.000	100%	21.995.000	100%	50.000.000	100%	-	100%	92.250.000	100%	64.000.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja
1 13 10	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terpublikasinya informasi pembangunan di Bidang Sosial	-	100%	30.000.000	100%	70.850.000	100%	97.715.300	100%	98.000.000	100%	99.000.000	100%	395.365.300	100%	30.000.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja, Sekretariat Daerah

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2011	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Masa Transisi		SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016						
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	13	10	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tersedianya Dokumen Standar Operasional Prosedur	-	-	1Dok	51.820.000	100%	77.800.000	-	-	-	-	100%	129.820.000	-	-	Dinas Sosial Tenaga Kerja	
1	13		Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya Dokumen Informasi Profil	-	-	-	-	100%	45.995.000	-	-	-	-	100%	45.995.000	-	-	Dinas Sosial Tenaga Kerja	
1	14		Ketnagakerjaan		-	-	1.612.348.200,00	1.785.469.800,00	3.861.554.500,00	3.605.000.000,00	3.680.000.000,00	14.344.372.300,00	4.273.300.000,00							
1	14	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Meningkatnya ketrampilan dan kompetensi tenaga kerja	100%	100%	303.960.200	133.198.000	100%	1.466.296.000	100%	1.250.000.000	100%	1.250.000.000	100%	4.393.454.200	100%	1.750.000.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja	
1	14	16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1. Menurunnya jumlah pengangguran	7,43%	7,31%	662.645.000	7,16%	866.745.000	7,06%	1.276.012.000	6,95%	1.370.000.000	6,83%	1.395.000.000	6,83%	5.570.342.000	100%	1.436.850.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja
				2. Meningkatkan prosentase angkatan kerja	57,16	58,13	-	56,10	-	60,09	-	81,09	-	62,11	-	62,11	-	63,13	-	
1	14	17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketnagakerjaan	Meningkatnya profesionalisme lembaga ketnagakerjaan	57,16	100%	625.373.000	100%	727.059.600	100%	929.246.500	100%	985.000.000	100%	1.035.000.000	100%	4.301.679.100	100%	1.066.050.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja
1	14	18	Program Penataan Kebijakan Ketnagakerjaan	Terpublikasinya peraturan ketnagakerjaan	100%	100%	20.400.000	-	-	0	-	-	-	-	100%	20.400.000	100%	20.400.000	Dinas Sosial Tenaga Kerja	
1	14		Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Ketnagakerjaan	Terselenggaranya pelayanan administrasi ketnagakerjaan	-	-	-	100%	58.497.000	-	-	-	-	-	100%	58.497.000	-	-	Dinas Sosial Tenaga Kerja	
1	17		Kebudayaan		-	-	5.194.913.000	6.799.508.250	7.582.342.100	7.812.991.000	7.290.351.000	34.743.833.350	3.854.738.550							
1	17	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	2.123.449.000	100%	1.402.978.000	100%	942.106.000	100%	910.956.000	100%	910.956.000	100%	6.290.415.000	100%	956.503.800	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1	17	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	482.768.000	100%	660.363.750	100%	852.837.600	100%	840.120.000	100%	504.120.000	100%	3.330.210.350	100%	529.326.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1	17	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	-	100%	29.950.000	100%	-	100%	60.000.000	100%	25.000.000	100%	114.950.000	100%	26.250.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1	17	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	126.000.000	100%	251.200.000	100%	124.050.000	100%	174.050.000	100%	125.000.000	100%	800.300.000	100%	131.250.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1	17	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tersedianya Informasi Kinerja Pembangunan	100%	100%	79.650.000	100%	54.225.000	100%	66.775.000	100%	40.275.000	100%	40.275.000	100%	281.200.000	100%	42.288.750	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1	17	15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya	100%	100%	-	100%	634.277.000	100%	967.381.000	100%	425.000.000	100%	425.000.000	100%	2.451.658.000	100%	446.250.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1	17	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatkan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	1 paket	1 paket	853.160.000	1 paket	3.742.692.500	1 paket	903.155.000	1 paket	2.552.500.000	1 paket	2.445.000.000	5 paket	10.466.507.500	1 paket	567.250.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1	17	17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Meningkatkan kegiatan pelestarian kekayaan budaya	7 kali	14 kali	1.529.915.000	14 kali	-	14 kali	3.607.237.500	15 kali	2.660.000.000	17 kali	2.665.000.000	100%	10.462.152.500	17 kali	788.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1	17	18	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya kegiatan kerjasama pengelolaan kekayaan seni budaya daerah	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	150.000.000	100%	175.000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Masa Transisi		SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016						
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	17	19	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Tertwujudnya pemasaran wisata Bontolag	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
1	17	20	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Berkembangnya Wisata Kota Bontolag	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
1	17	21	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Tersedianya mitra kerja Pemerintah dalam Pengembangan Wisata	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
1	17		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tersedianya Pelayanan Yang Maksimal	-	-	100%	63.820.000	100%	118.800.000	-	-	-	-	100%	182.620.000	100%	182.620.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
1	17		Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terselenggaranya pameran	-	-	100%	63.820.000	-	-	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	213.820.000	-	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
1	18		<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>		-	7.961.480.100	-	57.251.814.000	-	38.037.075.250	-	33.858.099.000	-	18.968.159.000	-	155.872.607.350	-	20.982.005.750		
1	18	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1.792.121.850	100%	2.219.903.500	100%	1.243.325.000	100%	1.243.825.000	100%	1.253.825.000	100%	7.783.000.350	100%	1.316.516.250	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1	18	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	228.116.000	100%	436.065.000	100%	265.585.000	100%	500.585.000	100%	300.585.000	100%	1.730.936.000	100%	315.814.250	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1	18	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	49.980.000	100%	47.870.000	100%	17.380.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	215.030.000	100%	52.500.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1	18	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	189.300.000	100%	382.000.000	100%	170.400.000	100%	110.000.000	100%	120.000.000	100%	951.700.000	100%	126.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1	18	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tersedianya Informasi Kinerja Pembangunan	100%	100%	78.000.000	100%	62.400.000	100%	68.150.000	100%	52.770.000	100%	52.770.000	100%	314.090.000	100%	55.408.500	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1	18	15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	-	100%	88.000.000	100%	203.480.000	100%	517.020.000	100%	87.080.000	100%	90.000.000	100%	985.580.000	100%	613.745.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1	18	16	Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda meningkat 5 organisasi	71	72	3.917.944.750	73	22.705.987.000	74	8.768.862.500	75	12.106.845.000	76	2.111.845.000	76	49.611.283.750	76	2.501.465.988	Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pekerjaan Umum
				Jumlah Balai Remaja	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
1	18	17	Program Peningkatan Upaya Perumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Meningkatnya kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	100%	100%	44.945.000	100%	92.275.000	100%	235.977.500	100%	234.409.000	100%	304.409.000	100%	912.015.500	100%	584.820.770	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1	18	18	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Berkurangnya jumlah pemakai narkoba pada pemuda	-	-	-	100%	37.500.000	100%	56.805.000	100%	160.000.000	100%	160.000.000	100%	414.305.000	100%	199.650.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1	18	19	Program Pengembangan Kebijakan Manajemen Olahraga	Jumlah organisasi olahraga meningkat 5 organisasi	44 Pengkot, 1 Bapopsi	45 Pengkot, 1 Bapopsi, 1 organisasi	64.405.000	46 Pengkot, 1 Bapopsi, 2 organisasi	36.997.500	47 Pengkot, 1 Bapopsi, 3 organisasi	-	48 Pengkot, 1 Bapopsi, 4 organisasi	150.000.000	49 Pengkot, 1 Bapopsi, 5 organisasi	150.000.000	49 Pengkot, 1 Bapopsi, 5 organisasi	401.402.500	49 Pengkot, 1 Bapopsi, 5 organisasi	-	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1	18	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga	59	100%	717.767.500	100%	5.046.601.000	100%	12.439.549.250	100%	16.240.605.000	100%	11.652.745.000	100%	46.097.267.750	100%	3.500.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1	18	21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga	2	100%	748.570.000	100%	25.897.140.000	100%	14.170.534.000	100%	2.829.980.000	100%	2.829.980.000	100%	46.074.204.000	100%	11.500.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pekerjaan Umum

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Masa Transisi		SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016						
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	18	10	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terpublikasinya informasi pembangun di Bidang Pemuda dan Olahraga	100%	100%	44.310.000	100%	51.975.000	-	0	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	216.285.000	100%	216.285.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1	18		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terseleenggaranya pelayanan maksimal	-	-	-	100%	51.820.000	100%	83.687.500	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	195.507.500	-	-	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1	22		Pemberdayaan Masyarakat Desa		-	-	3.844.355.700	-	3.526.383.400		4.563.210.700		3.184.500.000		3.161.000.000		18.279.449.800		4.849.055.000	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
1	22	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1.428.035.200	100%	1.362.855.400	100%	718.326.700	100%	731.000.000	100%	735.000.000	100%	4.975.217.300	100%	650.000.000	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
1	22	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	270.569.500	100%	111.201.000	100%	85.844.000	100%	130.000.000	100%	135.000.000	100%	732.614.500	100%	236.350.000	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
1	22	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	63.250.000	100%	23.245.000	100%	-	100%	40.000.000	100%	-	100%	126.495.000	100%	36.750.000	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
1	22	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	164.530.000	100%	265.000.000	100%	66.000.000	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	635.530.000	100%	85.900.000	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
1	22	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Terseleenggaranya Informasi Kinerja Pembangunan	100%	100%	65.900.000	100%	29.450.000	100%	20.250.000	100%	28.500.000	100%	28.500.000	100%	172.600.000	100%	39.900.000	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
1	22	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	1. Jumlah Posyandu Aktif	100%	100%	1.360.746.500	100%	726.900.000	100%	1.934.970.000	100%	1.870.000.000	100%	1.877.500.000	100%	7.770.116.500	100%	2.160.000.000	Kantor Pemberdayaan Masyarakat; Kec. Btg Utara; Kec. Btg Selatan; Kel. Btg Lestari; Kel. Tanjunglaut
				2. Jumlah LPM Berprestasi	-	-	-	6,70	-	6,70	-	6,70	-	6,70	-	26,70	-	6,70	-	
				3. Jumlah PKK Aktif	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%
1	22	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	1. Jumlah Binaan LPM	-	15	449.924.500	15	932.862.000	15	1.658.435.000	15	250.000.000	15	250.000.000	75	3.541.221.500	15	362.500.000	Kantor Pemberdayaan Masyarakat; Kec. Btg Utara; Kec. Btg Selatan; Kec. Btg Barat; Kel. Tanjunglaut
1	22		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan/Perumahan	Berkembangnya Lembaga Ekonomi Pedesaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950.000.000	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
1	22	10	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terpublikasinya informasi pembangunan di Bidang Pemberdayaan masyarakat	100%	100%	41.400.000	100%	42.550.000	100%	44.410.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	258.360.000	100%	258.360.000	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
1	22		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	tersedianya Dokumen Standar Operasional Prosedur	-	-	-	1 Dok	32.320.000	100%	34.975.000	-	-	-	-	-	67.295.000	-	67.295.000	Kantor Pemberdayaan Masyarakat
1	26		Perpustakaan		-	-	2.376.251.440	-	24.650.041.440		2.292.767.300		3.344.983.000		3.389.683.000		14.738.801.360		2.721.486.728	
1	26	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1.827.521.800	100%	2.442.928.500	100%	1.789.169.300	100%	1.663.658.000	100%	1.663.658.000	100%	9.386.933.600	100%	1.650.000.000	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1	26	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	216.684.540	100%	611.895.140	100%	274.633.000	100%	356.500.000	100%	436.500.000	100%	1.898.212.780	100%	276.550.611	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1	26	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	28.170.000	100%	75.870.000	100%	44.040.000	100%	35.000.000	100%	-	100%	183.080.000	100%	35.952.852	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1	26	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	126.400.000	100%	176.800.000	100%	148.600.000	100%	145.000.000	100%	145.000.000	100%	741.800.000	100%	129.414.950	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Masa Transisi		SKPD Penanggung Jawab		
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016						
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	26	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tersedianya Informasi Kinerja Pembangunan	100%	100%	51.975.000	100%	27.925.000	100%	36.325.000	100%	39.025.000	100%	39.025.000	100%	194.275.000	100%	86.334.734	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1	26	09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya sistem pelayanan masyarakat bersertifikasi ISO 9001-2008	100%	100%	125.500.000	-	-	-	100%	125.000.000	100%	125.000.000	100%	375.500.000	-	-	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
1	26		Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terpublikasinya perencanaan pembangunan SKPD	-	-	-	-	-	-	1 paket	75.000.000	1 paket	75.000.000	1 paket	150.000.000	-	-		
1	26		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tersedianya Sarana Media Informasi Tingkat Kota	-	-	-	1 Paket	21.314.624.800	-	-	-	-	-	-	21.314.624.800	-	-		
1	26	21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1. Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat	100%	100%	-	100%	-	100%	-	980.500.000	100%	980.500.000	100%	1.961.000.000	100%	583.233.581	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
				2. Jumlah Perpustakaan	1	-	-	-	0	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
				3. Prosentase minat baca masyarakat (rata-rata 10% / thn) orang	48.843	49.185	-	51.644	-	54.227	0	56.938	-	59.785	-	318.622	-	-	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
				4. Prosentase koleksi buku di Perpustakaan Daerah (rata-rata 10% / thn) Eks	69.596	69.596	-	76.558	-	84.211	0	101.896	-	112.085	-	536.976	-	-	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	

Tabel 8.2  
 Indikator Rencana Program Prioritas serta Kebutuhan Pendanaan  
 Kota Bontang Tahun 2011 - 2015

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Tata Pemerintahan yang Baik

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RTP/JMD Tahun 2010	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana SKPD		Masa Transisi 2016		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab
				2011		2012		2013		2014		2015		target	Rp	target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01 06	URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN				6.453.147.330	-	13.441.518.220	-	18.338.440.200	-	18.211.302.000	-	15.853.962.000		74.488.368.970		14.409.247.800	
01 06 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran pelayanan administrasi kantor	100%	100%	2.136.250.050	100%	2.516.494.100	100%	1.439.052.700	100%	1.877.940.000	100%	1.886.100.000	100%	9.855.836.850	100%	1.980.405.000	Bappeda
01 06 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran pelayanan administrasi kantor	100%	100%	356.900.000	100%	1.322.416.120	100%	548.310.000	100%	591.000.000	100%	460.000.000	100%	3.278.625.120	100%	483.000.000	Bappeda
01 06 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kelancaran pelayanan administrasi kantor	100%	-	-	100%	43.750.000	100%	-	100%	49.612.000	100%	49.612.000	100%	142.974.000	100%	52.092.600	Bappeda
01 06 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kelancaran pelayanan administrasi kantor	94,44%	100%	245.000.000	100%	820.000.000	100%	401.800.000	100%	500.000.000	100%	600.000.000	100%	2.566.800.000	100%	630.000.000	Bappeda
01 06 06	Program Peningkatan Pengendalian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kelancaran pelayanan administrasi kantor	100%	100%	38.420.000	100%	60.700.000	100%	150.100.000	100%	121.200.000	100%	122.700.000	100%	493.120.000	100%	25.000.000	Bappeda
01 06 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Tidak Ada	Ada	3.399.209.000	Ada	4.260.432.500	Ada	4.678.767.500	Ada	5.555.000.000	Ada	5.685.000.000	Ada	23.578.409.000	Ada	5.798.700.000	Bappeda
		Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPJ yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	
		Perjbaran Program RPJMD dalam RKPJ	95%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
01 06 20	Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Kelembagaan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	-	-	Bappeda
01 20 23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Ketersediaan Teknologi Informasi dalam Perencanaan Pembangunan daerah	-	-	-	100%	90.130.000	100%	79.950.000	100%	95.000.000	100%	95.000.000	100%	360.080.000	1	-	Bappeda
01 05 15	Program Perencanaan Tata Ruang	Ketersediaan pramata tata ruang kota dan wilayah	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	300.000.000	Bappeda
01 05 17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota dengan Tata Ruang Kota	100%	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Bappeda
01 06 18	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Ketersediaan Pembangunan berbasis permukiman	-	-	-	100%	192.275.000	100%	1.070.300.000	100%	-	100%	-	100%	1.262.575.000	100%	750.000.000	Bappeda
01 06 22	Program Perencanaan Ekonomi	Jumlah Dokumen Rencana Strategis Bidang pemerintahan, sosial dan ekonomi	2 Dok	2 Dok	631.165.000	2 Dok	1.088.177.500	2 Dok	1.383.400.000	1 Dok	970.000.000	1 Dok	970.000.000	10 Dok	5.042.742.500	5 Dok	450.000.000	Bappeda; DJPU
01 06 23	Program Perencanaan Sosial Budaya	Ketersediaan perencanaan pembangunan sosial budaya	100%	100%	344.559.500	100%	685.900.000	100%	947.900.000	100%	1.550.000.000	100%	1.575.000.000	100%	5.103.358.500	100%	-	Bappeda
01 06 24	Program Perencanaan prasarana Wilayah dan SDA	Ketersediaan Perencanaan Prasarana wilayah dan SDA dalam program pembangunan	-	-	-	100%	362.004.000	100%	-	100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	712.004.000	-	-	Bappeda
01 06 19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Ketersediaan pramata perencanaan pembangunan kota menengah dan besar	100%	100%	102.455.000	100%	-	100%	934.840.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	1.437.285.000	100%	380.000.000	Bappeda

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RTP,MD Tahun 2010	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencma SKPD		Masa Transisi 2016		Unit Kerja SKPD Penanggung-Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015		target	Rp	target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
01 06 25	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Kelengkapan perencanaan pembangunan untuk daerah rawan bencana	0	-	-	100%	-	100%	966.950.000	100%	380.000.000	100%	575.000.000	100%	1.491.550.000	100%	380.000.000	Bappeda
01 06 15	Program Pengembangan Data/Informasi	Kelengkapan Data dan Informasi Untuk Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan	100%	100%	1.123.210.000	100%	1.255.520.000	100%	5.397.510.000	100%	5.336.000.000	100%	2.620.000.000	100%	19.732.240.000	100%	2.150.000.000	Bappeda
01 06	Program Evakuasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tertindakannya evakuasi perencanaan daerah	-	-	-	2 Software	582.946.000	2 Software	623.510.000	2 Software	390.550.000	1 Software	390.550.000	1 Software	1.587.595.000	2 Software	390.000.000	Bappeda
01 06	Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik	Tersedianya data statistik daerah	3 paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bappeda
01 06 10	Program Perluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terpublikasinya informasi pembangua di Bidang Perencanaan	-	100%	47.500.000	100%	102.100.000	100%	108.900.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	558.500.000	100%	47.500.000	Bappeda
01 06 10	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Terselenggaranya Administrasi	-	100%	28.480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	28.480.000	-	-	Kecamatan Bontang Utara
01 06	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terselenggaranya Dokumen Pelayanan Publik	-	-	-	1Dok%	58.675.000	-	-	1 Dok	65.000.000	1 Dok	65.000.000	3 Dok	196.675.000	100%	196.675.000	Bappeda
01 06	Program Kerjasama Pembangunan	Terselenggaranya Kerjasama dengan Kota/Kab lain	-	-	-	-	-	100%	97.560.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	667.550.000	100%	667.550.000	
01 10	<b>KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>				8.438.987.200	-	6.455.897.300	-	7.035.037.600	-	5.326.852.000	-	5.282.388.000		30.537.222.180		7.821.516.600	
01 10 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2.509.483.900	100%	3.026.056.300	100%	2.449.287.800	100%	2.414.486.000	100%	2.006.236.000	100%	12.408.550.140	100%	2.109.597.600,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
01 10 02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	178.669.900	100%	654.436.000	100%	1.122.899.940	100%	292.000.000	100%	85.000.000	100%	2.533.005.810	100%	89.250.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
01 10 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	26.290.000	100%	79.260.000	-	-	100%	92.540.000	100%	82.863.000	100%	250.973.000	100%	66.027.150,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
01 10 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	105.000.000	100%	203.405.000	100%	265.600.000	100%	265.000.000	100%	265.000.000	100%	1.104.005.600	100%	278.250.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
01 10 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	83.425.000	100%	47.275.000	100%	122.375.000	100%	59.885.000	100%	59.885.000	100%	372.445.000	100%	60.281.850,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
01 10 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio penduduk berKTP per seribu penduduk	0,899	1	3.504.108.310	1	2.245.465.000	1	3.074.874.900	1	2.128.221.000	1	2.725.584.000	100%	13.678.233.210	1	5.188.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kec. Big Utara, Kec. Big Barat, Kec. Big Selatan
		Rasio bayi berakta kelahiran	0,828	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	100%	-	1	-	
		Rasio pasangan berakta nikah	0,767	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	100%	-	1	-	
		Kepuasan KTP	85,96%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
		Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	84%	84%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	
		Ketersediaan Database Kependudukan berskala nasional	Ada	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	Ada	-	
		Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ya	Ya	-	Ya	-	Ya	-	Ya	-	Ya	-	Ya	-	Ya	-	
01 10 10	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Tercapainya informasi pembangunan	-	100%	30.010.000	100%	-	-	-	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	190.010.000	100%	30.010.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
01 19	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI</b>				13.759.317.120	-	18.238.742.140	-	30.126.730.060	-	20.495.467.000	-	20.187.562.000		103.172.866.328		22.334.750.200	
01 19 01	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	4.955.419.875	100%	5.191.473.800,00	100%	3.780.531.000,00	100%	3.780.531.000,00	100%	3.800.531.000,00	100%	21.508.496.675	100%	4.180.584.100	Badan Kesbang Linmas/Satpol PP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RTPJMD Tahun 2010	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Masa Transisi 2016		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab
				2011		2012		2013		2014		2015		target	Rp	target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01 19 02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	606.949.760	100%	1.820.391.840,00	100%	1.250.602.580,00	100%	1.944.153.000,00	100%	1.399.113.000,00	100%	7.021.210.160	100%	1.539.024.300	Badan Kesbang Linmas/Satpol PP
01 19 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	18.530.000	100%	191.320.000,00	100%		100%	203.758.000,00	100%	203.758.000,00	100%	617.368.000	100%	224.133.800	Badan Kesbang Linmas/Satpol PP
01 19 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	145.000.000	100%	974.060.000,00	100%	757.480.000,00	100%	515.000.000,00	100%	515.000.000,00	100%	2.906.540.000	100%	566.500.000	Badan Kesbang Linmas/Satpol PP
01 19 08	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	97.050.000	100%	86.100.000,00	100%	217.525.000,00	100%	185.855.000,00	100%	185.855.000,00	100%	772.385.000	100%	204.440.500	Badan Kesbang Linmas/Satpol PP
01 19 17	Program Pengembangan Wawasan Pembangunan	Jumlah Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP;	3 kegiatan		220.400.000	25 Keg	191.755.000	25 Keg	426.346.000,00	25 Keg	4541.000.000,00	25 Keg	4.365.750.000,00	100%	9.735.251.000	100%	4.791.325.000	Badan Kesbang Linmas; Seldu; Kec. Seluruh kecamatan
01 19 18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Forum dialog publik;	5 kegiatan	5 Keg	3.073.979.991	5 Keg	3.187.231.000	5 Keg	17.841.985.500,00	5 Keg	3.283.700.000,00	5 Keg	3.168.575.000,00	30 Keg	30.535.471.491	100%	3.465.432.500	Badan Kesbang Linmas; Seldu; Kec. Seluruh kecamatan
01 19 20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Jumlah Patugas Perindugan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk	49	49	522.405.000	49,2	1.407.669.000			49,8	150.000.000,00	50	150.000.000,00	50%	2.230.074.000	100%	165.000.000	Badan Kesbang Linmas/Satpol PP
01 19 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah;	10 kegiatan	10 kegiatan	1.061.675.000	10 kegiatan	1.917.007.500	10 kegiatan	2.522.070.000,00	10 kegiatan	2.610.500.000,00	10 kegiatan	2.680.000.000,00	100%	10.791.252.500	100%	2.948.000.000	Badan Kesbang Linmas/Satpol PP
01 19 15	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	1 regu	3 regu	2.480.891.000	3 regu	2.580.626.500	3 regu	2.642.025.000,00	3 regu	2.470.000.000,00	3 regu	2.470.000.000,00	100%	12.643.542.500	100%	2.717.000.000	Badan Kesbang Linmas/Satpol PP
		Tim Reaksi Cepat (TRC)	Tidak Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		
01 19 16	Program Pemeliharaan Kamtibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana (RAD-PB);	348	376	395.866.500	404	345.270.000	432	206.068.000,00	459	710.000.000,00	486	710.000.000,00	486	2.367.202.500	490	781.000.000	Badan Kesbang Linmas/Satpol PP; Kec. Big Selatan
01 19 22	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Jumlah Kader Pembauran;	60 orang					70 orang	165.110.000,00	70 orang	350.000.000,00	70 orang	350.000.000,00	100%	865.110.000	100%	385.000.000	Badan Kesbang Linmas
01 19 19	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tersedianya dokumen profil SKPD	5 buku	5 Buku	8.050.000	5 Buku	132.120.000	5 Buku	94.570.000,00					100%	234.740.000	100%	234.740.000	Satpol PP; Kbadan Kesbanglinmas
01 19 18	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	Angka Kriminalitas	20	100%	145.230.000	100%	106.655.000	100%	85.315.000,00	100%	77.000.000,00	100%	77.000.000,00	18	491.200.000	100%	84.700.000	Satpol PP; Kec. Big Utara; Kec. Big Selatan; Kec. Big Kel. Big Lestari
01 19 10	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terpublikasinya informasi pembangunan		100%	27.870.000	100%	104.062.500	100%	137.104.000,00	100%	92.000.000,00	100%	92.000.000,00	100%	453.036.500	100%	27.870.000	Badan Kesbang Linmas/Satpol PP
01 20	URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM. KEJ. DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN				290.374.508.412		399.670.412.095		218.911.108.430		260.414.538.000		252.617.208.000		1.344.020.167.937		200.747.924.400	
01 20 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	62.594.050.637	100%	79.788.094.075	100%	60.629.610.180,00	100%	57.005.012.000,00	100%	59.865.305.000,00	100%	319.972.071.892	100%	65.851.835.500	Sekretariat DPRD; Sekretariat Daerah; Inspektoriat; BKD; DPPKA; Kecamatan; Kelurahan
01 20 02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	50.947.673.780	100%	201.913.010.572	100%	42.811.632.400,00	100%	34.057.462.000,00	100%	35.081.838.000,00	100%	364.811.616.752	100%	38.590.021.800	Sekretariat DPRD; Sekretariat Daerah; Inspektoriat; BKD; DPPKA; Kecamatan; Kelurahan
01 20 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	811.980.000	100%	4.498.280.000	100%	485.573.000,00	100%	1.582.355.000,00	100%	2.094.698.000,00	100%	9.872.766.000	100%	2.115.543.980	Sekretariat DPRD; Sekretariat Daerah; Inspektoriat; BKD; DPPKA; Kecamatan; Kelurahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RTP/JMD Tahun 2010	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Masa Transisi 2016		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab
				2011		2012		2013		2014		2015		target	Rp	target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01 20 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	80%	100%	5.738.085.000	100%	5.984.352.000	100%	10.448.734.000,00	100%	4.388.500.000	100%	3.505.500.000	100%	30.066.151.000	100%	3.540.555.000	Sekretariat Daerah; Badan Kepegawaian
		Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai bidang tugas	75%	79%	-	83%	-	87%	-	91%	-	95%	-	95%	-	95	-	
01 20 15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD;	61 Raperda	15	28510.352.000	15	20.203.645.000	15	14.639.292.000,00	15	1.005.000.000,00	15	705.000.000,00	136 Raperda	65.063.289.000	15	712.050.000	Sekretariat DPRD
		Jumlah Program Legislasi daerah;	57 Raperda	22	-	22	-	22	-	22	-	20	-	165 Raperda	-	20	-	
		Jumlah Raperda Inisiatif DPRD;	6 Raperda	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-	36 Raperda	-	6	-	
01 20 20	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Persentase Aparatur Pengawas/Pemeriksa yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi	12,5 %	100%	-	100%	138.558.000	100%	48.972.000,00	100%	65.000.000,00	100%	65.000.000,00	100%	317.530.000	100%	68.250.000	Inspektorat Daerah
01 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh	Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK);	Belum Ada	Ada	2.138.440.000	Ada	1.837.237.500	Ada	2.659.759.000,00	Ada	3.488.385.000,00	Ada	3.498.835.000,00	Ada	13.622.656.500	100%	3.533.823.350	Inspektorat Daerah
01 20	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti mencapai 100%	100%	-	-	100%	47.700.000	100%	90.500.000,00	100%	90.000.000,00	100%	92.500.000,00	100%	320.700.000	100%	97.125.000	Inspektorat Daerah
01 20	Program Penyelenggaraan Spip	Opini BPK terhadap audit Laporan Keuangan	WDP	-	-	WTP	298.050.000	WTP	490.050.000,00	WTP	415.000.000,00	WTP	415.000.000,00	WTP	1.618.100.000	100%	435.750.000	Inspektorat Daerah
01 20 26	Program Penetapan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Perda yang telah ditetapkan	61 perda	13 perda	800.019.000	13 perda	1.533.490.000	13 perda	2.076.907.000,00	13 perda	2.557.755.000,00	13 perda	2.484.255.000,00	126 perda	9.452.426.000	100%	2.509.097.550	Sekretariat Daerah ; DPPKA
01 20 31	Program Peningkatan Penatrnaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp milyar) ;	60,468	72,43	1.048.921.900	86,916	3.018.001.200	95,608	3.410.722.000,00	109,949	96.750.000,00	123,289	96.750.000,00	123,289	7.671.145.100	100%	101.587.500	DPPKA
01 20 37	Program Peningkatan Manajemen Informasi Kekeayaan/Ases Daerah	Ketersediaan data aset yang akurat	85%	100%	560.350.000	100%	2.987.228.200	100%	1.546.281.000,00	100%	1.548.211.000,00	100%	1.714.682.000,00	100%	8.356.752.200	100%	1.800.416.100	DPPKA
01 20 28	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Terlaksananya upaya-upaya pengembangan hidup sehat	100%	100%	255.043.000	-	489.475.000	-	305.939.000,00	100%	182.475.000,00	100%	184.800.000,00	100%	1.417.732.000	100%	850.000.000	Kecurahan; Kecamatan; Sekretariat Daerah
01 20	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Terpeliharnya RTH Kota Bontang	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	Kecurahan; Kecamatan
01 20	Program Penataan Pengawasan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	Terlaksananya program penataan pemilikan tanah	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	Kecurahan; Kecamatan
01 20	Program Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	Terlaksananya program pembangunan infrastruktur kelurahan	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	Kecurahan; Kecamatan
01 20	Program Peningkatan Gerakan Penghijauan	Terlaksananya gerakan penghijauan	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	Kecurahan; Kecamatan
01 20	Program Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan	Persentase efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;	95,63%	-	-	100%	4.489.816.200	100%	3.715.839.900,00	-	3.181.821.000,00	100%	3.185.161.000,00	100%	14.572.637.100	100%	3.217.012.610	Kecurahan; Kecamatan; Sekretariat Daerah
		Persentase efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;	96%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RTRW/RKD Tahun 2016	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana SKPD		Masa Transisi 2016		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab		
				2011		2012		2013		2014		2015		target	Rp	target	Rp			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
01 20 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	4.474.888.934	100%	11.053.598.000	100%	10.449.734.000,00	100%	7.055.519.000,00	100%	7.657.481.000,00	100%	40.651.518.934	100%	6.423.229.100	100%	6.423.229.100	Sekretariat DPRD; Sekretariat Daerah; Inspektorat BKD; DPPKA; Kecamatan; Kelurahan
01 20 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.337.580.000	100%	5.644.940.000	100%	2.927.314.000,00	100%	1.849.281.000,00	100%	1.742.721.000,00	100%	8.501.836.300	100%	1.916.993.100	100%	1.916.993.100	Sekretariat DPRD; Sekretariat Daerah; Inspektorat BKD; DPPKA; Kecamatan; Kelurahan
01 20 09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Unit Pelayanan yang berkategori baik; Cakupan penjamin melalui pelayanan terpadu satu pintu	12 SKPD 17 Jenis	16 SKPD	873.037.380	21 SKPD	2.527.203.000	25 SKPD	1.792.884.000,00	31 SKPD	1.955.625.000,00	36 SKPD	1.955.625.000,00	36 SKPD	9.104.374.380	36 SKPD	2.053.406.250	36 SKPD	2.053.406.250	Sekretariat Daerah; BPPA; Bappeda
01 20 18	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Efektifitas pelaksanaan tugas kedinasan KDH dan Wakil KDH	100%	100%	1.579.745.000	100%	2.843.869.000	100%	1.776.969.000,00	100%	1.730.000.000,00	100%	1.730.000.000,00	1	9.960.623.000	100%	1.816.500.000	100%	1.816.500.000	Sekretariat Daerah
01 20 17	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Optimasi BPK terhadap audit Laporan Keuangan	WDP	WDP	2.742.440.000	WTP	9.220.812.000	WTP	10.326.446.000,00	WTP	6.330.990.000,00	WTP	6.519.496.000,00	WTP	38.129.883.000	WTP	6.841.289.750	WTP	6.841.289.750	DPPKA
01 20 23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Penerapan e-Budgeting, e-Project Planning, e-Procurement, e-Delivery, e-controlling, dan e-Performance	50%	100%	7.142.662.000	100%	4.607.624.425	100%	2.652.176.000,00	100%	3.768.498.000,00	100%	3.491.498.000,00	100%	21.660.454.425	100%	3.668.070.800	100%	3.668.070.800	Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; DPPKA
01 20 25	Program Peningkatan Ketjasama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah Peraturan Walikota yang telah ditetapkan;	180 Perwali	4 Perwali	226.981.000	4 Perwali	174.150.000	4 Perwali	142.800.000,00	4 Perwali	120.000.000,00	4 Perwali	120.000.000,00	200 Perwali	783.911.000	4 Perwali	126.000.000	4 Perwali	126.000.000	Sekretariat Daerah
01 20 27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah MOU Ketjasama antar Pemerintah daerah	84 MoU	1 MoU	195.500.000	1 MoU	302.250.000	2 MoU	281.450.000,00	1 MoU	100.000.000,00	1 MoU	100.000.000,00	70 MoU	979.200.000	1 MoU	105.000.000	1 MoU	105.000.000	Sekretariat Daerah
01 20 30	Program Peningkatan Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan		100%	100%	1.384.005.150	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.384.005.150	100%	-	100%	-	Sekretariat Daerah; Kelurahan
01 20 35	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Persentase tingkat disiplin pegawai	70%	75%	4.982.881.500	80%	6.089.925.500	80%	7.067.865.250,00	85%	5.371.380.000,00	90%	6.306.000.000,00	90%	30.427.732.250	90%	6.821.300.000	90%	6.821.300.000	Sekretariat Daerah; SKD
		Tersedianya pedoman dan standar pendayagunaan aparatur yang meliputi:	SKJ SSP Struktural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SKJ Struktural	-	-	-	-	-	
		ABK	14 Dok ABK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 Dok ABK	-	-	-	-	-	
		ANJAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 Dok Anjab	-	-	-	-	-	
		Dok Kamus Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 Dok Kamus Jabatan	-	-	-	-	-	
		Persentase penerapan sistem aplikasi kepegawaian	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	
		Persentase Data Kepegawaian yang terkini dan akurat	60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	
		Persentase dokumentasi fisik kepegawaian yang mudah diakses secara lengkap dan benar	70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	
01 20 35	Program Fasilitas Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan daerah	100%	100%	10.591.284.150	100%	677.596.000	100%	564.995.000,00	-	594.995.000,00	-	549.465.000,00	100%	13.348.374.150	-	-	-	-	Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD
01 20 38	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kerja Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	Efektifitas peran Lembaga Kerja Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	-	100%	1.586.427.800	100%	2.188.988.000	100%	780.718.000,00	-	-	-	-	100%	4.536.133.800	100%	-	-	-	Sekretariat Daerah



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RTP/JMD Tahun 2010	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Masa Transisi 2016		Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab
				2011		2012		2013		2014		2015		target	Rp	target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01 20	Program Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat	Persentase efektivitas pemberdayaan Masyarakat (kelurahan), Kecamatan	98%	-	-	100%	5.119.805.970	100%	9.625.256.200,00	100%	7.197.764.000,00	100%	7.265.119.000,00	100%	29.207.945.170	100%	7.337.770.190	Kelurahan; Kecamatan
		Persentase efektivitas pemberdayaan Masyarakat (kelurahan);	93%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	
01 20	Program Fasilitas Peningkatan Sarana/Prasarana Dan Lingkungan Kecamatan/Kelurahan	Persentase efektivitas peningkatan sarana / prasarana dan lingkungan kelurahan; Kecamatan	94%	-	-	100%	1.176.722.450	100%	1.248.711.500,00	100%	1.218.133.000,00	100%	1.208.462.000,00	100%	4.852.028.950	100%	1.220.546.620	Kelurahan; Kecamatan
		Persentase efektivitas peningkatan sarana / prasarana dan lingkungan kelurahan	85%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	
01 20	Program Fasilitas Partisipasi Masyarakat	Persentase efektivitas peran serta masyarakat di lingkungan kelurahan	0%	-	-	100%	22.177.270.000	100%	25.430.626.000,00	100%	25.562.069.000,00	100%	25.568.045.000,00	100%	98.738.210.000	100%	25.950.000.000	Kelurahan
01 20 22	Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Persentase hasil pengawasan yang difindaklanjuti;	100%	-	35.570.000	100%	-	100%	58.230.000,00	100%	203.500.000,00	100%	203.500.000,00	100%	500.800.000	100%	213.675.000	Inspektorat Daerah
		Penerapan e-Audit	Belum Ada	-	-	Ada	-	Ada	-	-	-	-	-	Ada	-	-	-	Inspektorat Daerah
01 20	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Terbnyanya UKS Kota Bontang	100%	-	-	100%	-	-	-	100%	132.000.000,00	100%	132.000.000,00	100%	264.000.000	100%	138.600.000	Sekretariat Daerah
01 20	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		100%	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	Sekretariat Daerah
01 20	Program Peningkatan Pembinaan Perangkat Kecamatan Dan Kelurahan	Terbnyanya perangkat kecamatan dan kelurahan	100%	-	-	100%	432.650.000	100%	335.600.000,00	100%	605.000.000,00	100%	455.000.000,00	100%	1.828.250.000	100%	477.750.000	Sekretariat Daerah
01 20	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Persentase keterbukaan informasi publik	0%	-	-	100%	-	-	-	100%	6.519.670.000,00	100%	6.216.520.000,00	100%	12.738.190.000	100%	6.278.685.200	Sekretariat Daerah
01 20	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terlaksananya pembinaan kebudayaan semua etnis yang ada	100%	-	-	100%	-	-	-	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	200.000.000	100%	105.000.000	Sekretariat Daerah
01 20	Program Kemitraan Pengembangan Kawasan Kebangsaan	Terlaksananya perayaan hari-hari besar nasional dan HUT Kota	100%	-	-	100%	-	-	-	100%	1.250.000.000,00	100%	1.250.000.000,00	100%	2.500.000.000	100%	1.262.500.000	Sekretariat Daerah
01 20	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Dan Menengah	Terlaksananya promosi produk daerah	100%	-	-	100%	-	-	-	100%	150.000.000,00	100%	150.000.000,00	100%	300.000.000	100%	157.500.000	Sekretariat Daerah
01 20	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Terlaksananya perencanaan, koordinasi, dan pengembangan UKAM	100%	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	Sekretariat Daerah
01 20	Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	Meningkatnya jaringan kerjasama antar lembaga	100%	-	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	Sekretariat Daerah
01 20 10	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terpublikasinya informasi pembangunan	100%	100%	502.320.000	100%	1.338.849.000	100%	1.414.432.000,00	100%	1.258.960.000,00	100%	1.413.060.000,00	100%	5.925.621.000	100%	1.413.060.000	Kelurahan; Kecamatan
01 20 3S	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan dan RT	Meningkatnya pelayanan kelurahan dan RT	100%	100%	4.975.378.650	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	4.975.378.650	-	-	Kelurahan; Kecamatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RTP, RMD Tahun 2010	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Masa Transisi 2016		Unit Kerja SKPD Penanggungjawab
				2011		2012		2013		2014		2015		target	Rp	target	Rp	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01 20 40	Program Pemeliharaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan	Meningkatnya sarana dan oprasana lingkungan	100%	100%	2.920.839.231	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	2.920.839.231	-	-	Kelurahan; Kecamatan
01 20 41	Program Peningkatan Administrasi Pertanahan	Terlaksananya proses administrasi pertanahan	100%	100%	936.082.500	100%	-	-	-	-	65.487.965.000,00	-	65.487.965.000,00	100%	131.922.012.500	100%	450.000.000	Sekretariat Daerah
01 20	Program Kerjasama Pembangunan	Terlaksananya Koordinasi Kerjasama Pembangunan	-	-	-	-	-	-	100%	-	67.550.000,00	100%	67.550.000,00	100%	135.100.000	100%	120.000.000	Sekretariat Daerah
01 20	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Kerjasama Pembangunan	-	-	-	-	-	-	100%	-	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	200.000.000	100%	120.000.000	Sekretariat Daerah
01 20	Program Pendidikan Tinggi	Terlaksananya Koordinasi Kerjasama Pembangunan	-	-	-	-	-	-	100%	-	-	100%	-	100%	-	100%	120.000.000	Sekretariat Daerah
01 20	Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Pelayanan Sarana Peribadatan	Terselenggaranya suasana beragama yang kondusif	-	-	-	-	-	-	100%	-	10.290.000.000,00	100%	10.290.000.000,00	100%	20.580.000.000	100%	120.000.000	Sekretariat Daerah
01 20	Program Peningkatan Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Terselenggaranya suasana beragama yang kondusif	-	-	-	-	547.240.000	100%	394.725.000,00	100%	524.075.000,00	100%	424.843.000,00	100%	1.890.883.000	100%	120.000.000	Sekretariat Daerah
01 20	Program Pengurusan Perencanaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan di masyarakat	-	-	-	100%	233.375.000	-	-	-	-	-	-	100%	233.375.000	-	-	Sekretariat Daerah
01 20	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Meningkatnya pelayanan perizinan di SKPD	-	-	-	100%	189.130.000	-	-	-	-	-	-	100%	189.130.000	-	-	BPPTM
01 20	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	1 tahun	241.580.000,00	1 tahun	150.000.000,00	100%	391.580.000	100%	150.000.000	
01 20	Program Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Perbatasan	Terselenggaranya Perencanaan Wilayah Perbatasan	-	-	-	-	-	1 Dok	185.225.000,00	-	-	-	-	100%	185.225.000	-	-	
01 23	<b>URUSAN STATISTIK</b>				<b>519.040.000</b>	-	<b>553.129.500</b>	-	<b>766.271.906</b>	-	<b>250.000.000</b>	-	<b>161.960.000</b>		<b>2.250.401.406</b>		<b>170.058.000</b>	
01 23 15	Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah	Persentase ketersediaan data untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	519.040.000	100%	553.129.500	100%	766.271.906	100%	250.000.000,00	1,00	161.960.000,00	100%	2.250.401.406	100%	170.058.000	Bappeda
01 24	<b>URUSAN KEARSIPAN</b>				<b>103.280.000</b>	-	<b>539.711.000</b>	-	<b>251.915.000</b>	-	<b>535.400.000</b>	-	<b>393.400.000</b>		<b>1.823.706.000</b>		<b>413.070.000</b>	
01 24 15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Jumlah SKPD yang mengelola Arsip secara Baku	1 SKPD	2 SKPD	38.800.000	2 SKPD	197.820.000	2 SKPD	30.900.000	2 SKPD	235.900.000	2 SKPD	90.900.000	11 SKPD	594.320.000	2 SKPD	95.445.000	Kantor Perpustakaan dan Arsip
01 24 16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	1 Kegiatan	2 Keg	45.780.000	2 Keg	94.701.000	3 Keg	40.415.000	3 Keg	40.500.000	3 Keg	40.500.000	13 Keg	261.896.000	100%	42.525.000	Kantor Perpustakaan dan Arsip
01 24 17	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Jumlah Arsip yang dikuisasi	348 Meter Larf	398 ML	18.700.000	448ML	39.455.000	498ML	117.540.000	548 ML	118.000.000	598ML	118.000.000	598 ML	411.895.000	100%	123.900.000	Kantor Perpustakaan dan Arsip
01 24 18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Jumlah Inventaris Tetap	8450 Berkas	-	14700	207.735.000	20950	63.060.000	27200	141.000.000	33450 Berkas	144.000.000	33450 Berkas	555.795.000	39700 berkas	151.200.000		Kantor Perpustakaan dan Arsip
01 25	<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				<b>3.417.250.000</b>	-	<b>4.714.183.000</b>	-	<b>4.551.182.000</b>	-	<b>9.879.870.000</b>	-	<b>9.911.526.000</b>		<b>32.273.805.000</b>		<b>9.616.835.200</b>	
01 25	Pembinaan pengusaha bidang perhubungan, komunikasi dan informasi	Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Jasa dan Telekomunikasi	-	-	-	100%	-	100%	-	100%	210.000.000	100%	280.000.000	100%	490.000.000	100%	294.000.000	Dinas Perhubungan dan Informatika
01 25	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Terlaksananya pengkajian dan penelitian di bidang informasi dan komunikasi	-	-	-	-	-	100%	103.168.000	-	-	-	-	100%	103.168.000	0%	-	Dinas Perhubungan dan Informatika
01 25 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media				38.650.000	-	-	100%	191.034.000	-	200.000.000	-	200.000.000	100%	629.684.000	0%	-	Dinas Perhubungan dan Informatika; Sekretariat Daerah
01 25 18	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Persentase keterbukaan informasi publik	0%	100%	3.378.600.000	-	4.714.183.000	-	4.256.980.000	-	9.269.670.000	-	9.431.520.000	100%	31.050.953.000	100%	9.525.835.200	Sekretariat Daerah

Tabel 6.3  
Indikasi Rencana Program Prioritas serta Kebutuhan Pendanaan  
Kota Bontang Tahun 2011 - 2015

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang usaha pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2011	Kondisi Kinerja pada setiap periode RPJMD										Masa Transisi 2016		SKPD bertanggung jawab				
				tahun-2011		tahun-2012		tahun-2013		tahun-2014		tahun-2015		Tahun 2016						
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	04	Perumahan			400.000.000		543.896.000		5.470.328.000		175.000.000		218.000.000		6.304.024.000		273.900.000			
1	04	16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Terselenggaranya kegiatan kearsifan dan lingkungan hunian berimbang	belum ada	-	293.696.000	100%	-	100%	175.000.000	100%	218.000.000	100%	583.696.000	100%	273.900.000	100%	Dinas Tata Ruang Kota	
1	04	19	Program Pengembangan Perumahan	Terselenggaranya perencanaan pengembangan permukiman	100%	400.000.000	100%	250.000.000	100%	5.470.328.000	-	-	-	100%	6.120.328.000	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum	
1	05	Perencanaan Ruang			4.624.594.000		7.904.519.020		6.766.540.000		5.588.130.000		5.777.830.000		30.541.609.020		8.086.721.500			
1	05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.810.252.125	100%	1.602.207.000	100%	794.702.000	100%	855.630.000	100%	1.019.130.000	100%	1.086.921.125	100%	1.070.366.500	100%	Dinas Tata Ruang Kota
1	05	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	231.290.000	100%	603.194.250	100%	296.822.000	100%	660.300.000	100%	892.500.000	100%	2.716.108.250	100%	937.125.000	100%	Dinas Tata Ruang Kota
1	05	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	34.540.000	100%	26.269.000	100%	-	100%	25.250.000	100%	25.250.000	100%	110.280.000	100%	26.512.500	100%	Dinas Tata Ruang Kota
1	05	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	251.385.000	100%	351.570.200	100%	472.500.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	1.675.465.000	100%	262.600.000	100%	Dinas Tata Ruang Kota
1	05	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Palapagan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tersedianya informasi kinerja pembangunan	100%	66.350.300	100%	54.650.000	100%	50.900.000	100%	56.200.000	100%	68.200.000	100%	283.900.000	100%	59.010.300	100%	Dinas Tata Ruang Kota
1	05	15	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya peraturan dan Rencana Tata Ruang serta SPM	belum ada, sesuai UU 26/2007	10%	1.411.437.675	10%	3.787.230.270	10%	3.168.242.000	10%	2.133.000.000	10%	2.133.000.000	50%	12.652.610.145	10%	2.239.850.000	Dinas Tata Ruang Kota, Bappeda, DPU
1	05	16	Program Pemanfaatan Ruang	Tersedianya produk rencana pemanfaatan ruang dan meningkatnya partisipasi masyarakat	belum ada, sesuai UU 26/2007	10%	-	15%	72.700.000	15%	473.050.000	15%	471.000.000	15%	270.000.000	78%	1.266.760.000	15%	283.500.000	Dinas Tata Ruang Kota
1	05	17	Program pengendalian pemanfaatan Ruang	Prosentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW	75%	75,6%	784.633.000	76,2%	1.150.673.500	75,6%	1.444.439.000	77,4%	1.921.750.000	78%	1.048.750.000	78%	5.148.256.500	10%	1.099.087.500	Dinas Tata Ruang Kota, BPPH, Bappeda
1	05		Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terselenggaranya publikasi hasil pembangunan	-	1 paket/1%	40.000.000	20%	256.835.000	10%	202.365.000	10%	85.000.000	10%	85.000.000	70%	699.200.000	10%	69.250.000	Dinas Tata Ruang Kota
1	05		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terselenggaranya Sistem Informasi Teknologi	-	-	-	-	100%	152.110.000	-	-	-	-	100%	152.110.000	-	-	Dinas Tata Ruang Kota	
1	06	Lingkungan Hidup			26.895.504.125		37.070.684.000		31.539.892.000		24.827.373.000		24.162.913.000		152.875.447.025		32.496.449.850			
1	06	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	12.171.882.125	100%	10.341.903.050	100%	9.404.366.400	100%	3.149.522.000	100%	2.174.022.000	100%	5.241.386.575	100%	9.632.723.100	100%	Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan Perumahan dan PMK
1	06	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	4.658.752.200	100%	3.891.786.550	100%	6.392.695.500	100%	725.000.000	100%	497.500.000	100%	18.165.707.650	100%	522.375.000	100%	Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan Perumahan dan PMK
1	06	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	360.851.500	100%	18.190.000	100%	365.230.000	100%	112.565.000	100%	112.565.000	100%	967.161.500	100%	118.193.250	100%	Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan Perumahan dan PMK

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJMD Tahun 2010	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		Masa Transisi 2016		SKPD penanggung jawab		
				tahun-2011		tahun-2012		tahun-2013		tahun-2014		tahun-2015		Tahun 2016						
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp			
1	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	189.140.000	100%	634.900.000	100%	285.800.000	100%	244.000.000	100%	269.000.000	100%	1.632.940.000	100%	282.450.000	BLH; Dinas Kebersihan Perumahan dan PMK	
1	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tersedianya informasi kinerja pembangunan	100%	100%	124.860.000	100%	108.537.500	100%	107.700.000	100%	104.950.000	100%	104.950.000	100%	548.997.500	100%	110.197.500	Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan Perumahan dan PMK	
1	08	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Lancarnya pelayanan publik	100%	100%	-	100%	32.320.000	100%	67.200.000	100%	-	100%	-	100%	99.520.000	100%	-	Dinas Kebersihan Perumahan dan PMK	
1	08	16	Program pengendalian pencemaran dan parusakan lingkungan hidup	Meningkatnya pengawasan dokumen lingkungan:		1.504.520.000		1.249.098.000		1.732.784.000		2.116.060.000		2.164.700.000	93%	8.767.163.000	5%	3.962.034.000	Badan Lingkungan Hidup; DPP	
			1. Persentase Pengawasan AMDAL	100%	100%		100%		100%		100%		100%	100%		100%				
			2. Persentase Pengawasan UKL UPL	70%	74%		78%		82%		86%		90%		90%		90%			
			3. Persentase Pengawasan SPPL	55%	62%		69%		76%		83%		90%		90%		90%			
1	08	17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Tersedianya sumur imbuhan (injeksi)	belum ada	1 Dok	145.498.000	1 Dok	316.385.000	1 sumur	659.475.000	1 sumur	662.000.000	1 sumur	662.000.000	3 sumur	2.445.358.000	1	3.055.415.000	Badan Lingkungan Hidup
			Tersedianya sumur pantau untuk sumur dalam	2 sumur	-	-	-	-	-	1 sumur	-	1 sumur	-	4 sumur	-	-	-	-	-	
1	08	19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang Lingkungan Hidup	50%	2%	348.964.000	2%	358.495.000	2%	392.714.000	2%	808.973.000	2%	612.973.000	60%	2.322.119.000	2%	842.062.000	Badan Lingkungan Hidup
1	08	20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Menurunnya tingkat pencemaran udara	45%	0,5%	114.110.000	0,5%	170.422.000	0,5%	166.830.000	0,5%	166.000.000	0,5%	166.000.000	42,5%	783.362.000	0,30%	420.000.000	Badan Lingkungan Hidup
1	08	15	Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Sampah	Meningkatnya penanganan sampah	71%	0,5%	3.760.424.550	0,5%	5.272.910.000	0,5%	2.114.112.000	0,5%	3.975.000.000	1%	3.975.000.000	74%	19.097.446.550	1,00%	5.531.000.000	Dinas Kebersihan Perumahan dan PMK; Kec. Bontang Utara, BLH
1	08	24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Terpeliharanya Ruang terbuka Hijau	20%	20,5%	1.288.591.750	21%	1.171.757.000	21,5%	726.941.000	22%	860.688.000	22,5%	860.688.000	22,5%	4.856.665.750	23%	1.900.000.000	Dinas Perikanan Kelautan dan Perikanan; Dinas Kebersihan Perumahan dan PMK
1	08	10	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terpublikasinya informasi pembangunan	100%	100%	20.000.000	100%	189.130.000	100%	201.940.000	100%	159.650.000	100%	159.650.000	100%	730.370.000	-	-	BLH
1	08	25	Program Pemeliharaan/Pengembangan Sistem Kelistrikan dan Penerangan Jalan	Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana PJU	100%	100%	713.803.000	100%	12.209.073.500	38,47%	3.515.474.000	39,41%	3.855.750.000	42,35%	3.655.750.000	42,35%	23.749.650.500	43%	6.110.000.000	Dinas Kebersihan Perumahan dan PMK
1	08	27	Program Peningkatan Keselamatan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya kesiagaan pencegahan kebakaran	100%	100%	1.061.807.000	100%	506.458.000	100%	2.061.275.000	1 Paket	1.854.000.000	1 Gedung	1.454.000.000	100%	6.937.540.000	-	-	Dinas Kebersihan Perumahan dan PMK
1	08	28	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Areal Pemakaman Terkelola dengan baik	100%	100%	40.090.000	100%	103.857.000	100%	21.770.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	215.717.000	-	-	Dinas Kebersihan Perumahan dan PMK
1	08	18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Tersedianya Cadangan SDA	100%	100%	174.410.000	-	-	100%	208.215.000	20 Kegiatan%	208.215.000	20 Kegiatan%	208.215.000	40 Keg	799.055.000	-	-	Badan Lingkungan Hidup

Kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan	Indikator kinerja program (outcome)	Kondisi kinerja awal RPJ Tahun 2010	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD		Masa Transisi 2016		SKPD penanggung jawab
				tahun-2011		tahun-2012		tahun-2013		tahun-2014		tahun-2015		target		Target		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana PJJ	Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana PJJ	100%	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan PMK
1 08 21	Program Pengembangan Ekowisata Dan Jasa Lingkungan di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan	Terpenuhinya Bumi Perkemahan dan Agrowisata	-	-	100%	500.000.000	100%	3.115.198.000	100%	3.300.000.000	100%	5.400.000.000	100%	12.315.198.000	-	-	Dinas Pekerjaan Umum	
2 02	<b>Kehutanan</b>				<b>1.648.852.500</b>		<b>2.049.930.000</b>		<b>2.428.282.500</b>		<b>4.890.000.001</b>		<b>13.480.065.002</b>		<b>13.423.442.501</b>		<b>2.408.377.500</b>	
2 02 15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Meningkatnya Luasan Hutan Mangrove yang baik	1522 Ha	1552 Ha	667.675.000	1582 Ha	127.650.000	1612 Ha	664.707.500	1642 Ha	650.000.000	1672 Ha	700.000.000	1672 Ha	2.810.032.500	1702 Ha	700.000.000	Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian
2 02 16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Meningkatnya Luasan Hutan Lindung yang baik	3298 Ha	3378 Ha	981.177.900	3458 Ha	1.822.222.000	3538 Ha	1.728.650.000	3618 Ha	1.565.000.000	3698 Ha	1.550.000.000	3698 Ha	7.645.049.500	3778 Ha	1.488.377.500	Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian
2 02 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Meningkatnya perlindungan dan kesadaran masyarakat tlg konservasi SDH	50%	-	-	5%	100.058.000	5%	-	10%	110.000.000	10%	115.000.000	80%	325.058.000	10%	120.000.000	Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian
2 02	Program Pengembangan Bontang Technopark	Terbentuknya kegiatan industri hasil hutan	0%	-	-	100%	-	100%	34.925.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	234.925.000	100%	100.000.000	
2 05	<b>Kelautan dan Perikanan</b>				<b>881.558.500</b>		<b>805.000.000</b>				<b>375.000.000</b>		<b>75.000.000</b>		<b>1.938.558.500</b>		<b>1.115.000.000</b>	
2 05 16	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan	Meningkatnya luasan sumber daya yang baik	3231,8 Ha	3235,8 Ha	405.362.500	3239,8 Ha	75.000.000	3243,8 Ha	-	3247,8 Ha	75.000.000	3251,8 Ha	75.000.000	3251,8 Ha	630.362.500	3255,8 Ha	200.000.000	Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian
2 05 17	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pemanfaatan Sumber Daya Laut	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sumber daya laut	5%	5%	276.196.000	10%	270.000.000	-	-	10%	300.000.000	-	-	50%	846.196.000	10%	715.000.000	Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian
2 05 25	Program Pemetaan Ruang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tersedianya kebijakan perencanaan dan pengelolaan WPK	20%	-	-	100%	460.000.000	100%	-	-	-	-	-	100%	460.000.000	100%	200.000.000	Dinas Perikanan Kelautan dan Pertanian

Tabel 2.4  
Indikator Rencana Program Prioritas serta Kebutuhan Pendanaan  
Kota Bontang Tahun 2011 - 2015

Misi 4 : Memperkuat struktur ekonomi dan mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik, air bersih serta infrastruktur lainnya

Kode	Urusan Pemerintahan dan Program yang Dilaksanakan	Indikator kinerja program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Masa Transisi		SKPD Penanggung Jawab	
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1 03	URUSAN PEKERJAAN UMUM				199.997.211.571		187.061.893.322		308.820.282.280		348.322.447.000		264.937.226.000		1.309.538.240.153		212.234.676.000		
1 03 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	4.140.888.000	100%	4.089.505.700	100%	2.127.012.400	100%	2.129.412.000	100%	2.129.710.000	100%	14.616.526.100	100%	4.862.000.000		Dinas Pekerjaan Umum
1 03 02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	1.774.401.100	100%	1.300.627.900	100%	1.213.399.900	100%	1.565.160.000	100%	1.215.591.000	100%	7.069.179.500	100%	1.467.777.000		Dinas Pekerjaan Umum
1 03 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	142.466.000	100%	51.061.000	100%	-	100%	70.000.000	100%	70.000.000	100%	333.527.000	100%	161.825.000		Dinas Pekerjaan Umum
1 03 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	964.835.000	100%	462.500.000	100%	1.457.950.000	100%	718.950.000	100%	720.000.000	100%	4.314.035.000	100%	1.211.998.000		Dinas Pekerjaan Umum
1 03 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tersedianya informasi kinerja pembangunan	100%	100%	188.200.000	100%	74.800.000	100%	81.462.500	100%	61.925.000	100%	61.925.000	100%	468.312.500	100%	240.194.000		Dinas Pekerjaan Umum
1 03 07	Program Pengembangan Data/Informasi	Tercapainya tata laksana kearsipan	100%	100%	347.550.000	100%	129.931.000	100%	99.525.000	100%	-	100%	-	100%	573.006.000	100%	428.191.000		Dinas Pekerjaan Umum
1 03 08	Program Optimisasi Pemeliharaan Teknologi	Terfaksananya sistem tata usaha yang lebih efektif dan efisien	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	197.681.000		Dinas Pekerjaan Umum
1 03 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik	82,82%	83,26%	35.674.731.666	83,70%	12.061.798.800	84,14%	21.704.640.000	84,16%	70.023.500.000	84,50%	190.600.000.000	84,50%	330.284.670.466	85,00%	39.400.000.000		Dinas Pekerjaan Umum
1 03 16	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong	Prosentase drainase dalam kondisi baik / pembangunan aliran air tidak tersumbat	8,00%	5,40%	4.459.391.510	4,80%	3.554.705.000	4,20%	11.608.882.000	3,60%	31.160.000.000	3,00%	26.000.000.000	3,00%	76.783.178.510	2,80%	4.000.000.000		Dinas Pekerjaan Umum
1 03 17	Program Pembangunan Turep/Tauk/bronjong	Prosentase trotoar dan fase dalam kondisi baik	13,77%	18,77%	4.479.407.400	23,77%	3.945.770.000	28,77%	8.686.378.000	33,77%	1.550.000.000	38,62%	-	38,62%	18.661.555.400	38,62%	40.000.000.000		Dinas Pekerjaan Umum
1 03 18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik	82,82%	83,26%	8.390.292.000	83,70%	13.732.000.000	84,14%	1.500.722.000	84,18%	2.200.000.000	84,50%	-	84,50%	25.823.014.000	85,00%	5.000.000.000		Dinas Pekerjaan Umum
1 03 22	Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan	Tersedianya peta jaringan jalan kota Bontang	-	-	353.000.000	-	-	-	58.620.000	-	-	-	-	1 paket	411.620.000	-	400.000.000		Dinas Pekerjaan Umum
1 03 26	Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya	Tersedianya prasarana pengendalian dan sumber air lainnya yang terpadu mulai dari pedesaan sampai perkotaan, serta jukopnya kapasitas tampungan debit air maksimal dan kelancaran aliran air sungai	-	-	1.750.181.214	8 paket	598.340.000	9 paket	1.457.254.000	7 paket	13.900.000.000	2 paket	7.000.000.000	34 paket	24.703.775.214	4 paket	26.750.000.000		Dinas Pekerjaan Umum
1 03 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	1. Prosentase rumah tangga pengguna air bersih 2. Prosentase ketersediaan pengelolaan air limbah perumahan	82,30%	87,84%	243.778.000	83,38%	4.805.328.000	88,92%	35.639.497.300	74,46%	75.847.500.000	80,00%	4.200.000.000	80,00%	120.738.103.300	82,00%	15.000.000.000		Dinas Pekerjaan Umum
1 03 28	Program Pengendalian Banjir	Menturainya prosentase luas wilayah banjir	0,28%	0,24%	544.837.705	0,21%	2.977.935.000	0,18%	12.732.184.000	0,15%	6.235.000.000	0,14%	-	0,14%	22.489.758.705	0,13%	1.000.000.000		Dinas Pekerjaan Umum
1 03 37	Program Peningkatan Jalan Dari Jembatan	Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik	82,82%	83,26%	-	83,70%	70.465.155.000	84,14%	73.610.356.160	84,16%	69.503.000.000	84,50%	-	84,50%	233.578.511.160	85,00%	44.285.760.000		Dinas Pekerjaan Umum
1 03 32	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keiciptakaryaan	Meningkatnya sarana dan prasarana keiciptakaryaan	-	-	3.729.635.000	1 paket	3.907.265.000	2 paket	1.893.782.000	1 paket	3.255.000.000	1 paket	-	7 paket	12.585.682.000	1 paket	15.225.000.000		Dinas Pekerjaan Umum

Kode	Urusan Pemerintahan dan Program yang Dilaksanakan	Indikator kinerja program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Masa Transisi		SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1 03 35	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Pemerintah Daerah	Terbangunnya gedung kantor yang representatif		13 paket	128.112.466.976	8 paket	-	2 paket	-	8 paket	-	4 paket	-	35 paket	128.112.466.976	2 paket	10.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Sekretariat DPRD
1 03	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Terlaksananya program PNPB Mandiri	2 paket	1 paket	-	2 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	2 paket	-	1 paket	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1 03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum	Meningkatnya sarana dan prasarana umum		5 paket	997.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5 paket	997.000.000	-	-	Dinas Pekerjaan Umum
1 03 10	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terpublikasinya informasi pembangunan	100%	100%	84.250.000	100%	127.000.000	100%	126.265.000	100%	-	100%	-	100%	337.515.000	100%	84.250.000	Dinas Pekerjaan Umum
1 03 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Raya dan Jaringan Pengairan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Saluran Air/Drainase	100%	100%	4.388.970.000	100%	5.150.000.000	100%	505.620.000	100%	2.500.000.000	100%	-	100%	12.542.590.000	100%	2.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1 03 31	Program Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Kelurahan	Terlaksananya Semua Upaya Perbaikan Infrastruktur Kelurahan	100%	100%	147.690.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	147.690.000	-	-	Dinas Pekerjaan Umum
1 03 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh			100%	495.440.000	100%	142.100.000	-	-	-	-	-	-	100%	637.540.000	-	-	Bappeda
1 03 36	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyediaan sarana dan prasarana pendukung	100%	-	-	100%	3.026.590.000	100%	38.261.823.000	100%	11.543.000.000	100%	7.000.000.000	100%	59.831.413.000	-	-	Dinas Pekerjaan Umum
1 03 38	Program Peningkatan Infrastruktur Permukiman	Terlaksananya Semua Upaya Peningkatan Infrastruktur Lingkungan	100%	-	-	100%	36.464.461.000	100%	76.228.270.000	100%	24.810.000.000	100%	2.240.000.000	100%	139.742.731.000	-	-	Dinas Pekerjaan Umum
1 03 39	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebijaksanaan	Terlaksananya pemenuhan sarana prasarana kebijaksanaan	-	-	-	-	1.000.000.000	100%	1.503.969.000	100%	1.900.000.000	100%	2.500.000.000	100%	6.903.969.000	-	-	Dinas Pekerjaan Umum
1 03	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Terselenggaranya Pelayanan Publik secara maksimal	-	-	-	100%	51.820.000	100%	90.670.000	-	-	-	-	100%	142.490.000	-	-	
1 03	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana prasarana pendukung pemerintah daerah	-	-	-	100%	18.928.399.922	100%	18.431.980.000	100%	10.350.000.000	100%	21.000.000.000	100%	68.710.379.922	-	-	
1 04	<b>URUSAN PERUMAHAN</b>				<b>3.305.740.000</b>		<b>6.338.285.000</b>	<b>100%</b>	-		<b>1.650.000.000</b>		<b>5.000.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>47.465.720.000</b>		<b>7.547.600.000</b>	
1 04 19	Program Peningkatan Keselamatan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan	76,92%	78%	-	78%	1.398.765.000	78%	-	0%	-	0%	-	80%	10.299.980.000	80%	3.397.600.000	Dinas Kebersihan Pertamanan dan PMK
1 04 20	Program Pengelolaan Areal Pemukiman	Prosentase daya tampung TPU per Jumlah Penduduk	32,3	32,3	-	32,3	727.500.000	32,3	-	32,3	-	32,3	-	32,3	2.920.000.000	32,3	1.150.000.000	Dinas Kebersihan Pertamanan dan PMK
1 04 21	Program Penataan Permukiman Lingkungan	Prosentase terbangunnya rumah layak huni	17,40%	24,40%	900.000.000	31,40%	-	38,40%	-	45,40%	1.650.000.000	50,29%	5.000.000.000	50,29%	11.900.000.000	62%	3.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1 04	Program peningkatan sarana dan prasarana PUJ	Meningkatnya cakupan pelayanan penanganan jalan umum	30,58%	30,59%	2.405.740.000	33,53%	4.210.000.000	-	-	-	-	-	-	-	22.345.740.000	-	-	Dinas Kebersihan Pertamanan dan PMK
1 07	<b>URUSAN PERHUBUNGAN</b>				<b>17.755.478.200</b>		<b>29.885.709.500</b>		<b>#N/A</b>		<b>#N/A</b>		<b>#N/A</b>		<b>#N/A</b>		<b>35.697.925.000</b>	
1 07 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2.794.797.000	100%	2.877.576.500	100%	2.152.439.200	100%	2.236.040.000	100%	2.258.815.000	100%	12.319.667.700	100%	3.237.161.000	Dinas Perhubungan dan Informatika
1 07 02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	416.647.200	100%	479.869.000	100%	1.117.797.000	100%	1.379.000.000	100%	1.376.000.000	100%	4.768.313.200	100%	521.292.000	Dinas Perhubungan dan Informatika
1 07 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	73.516.000	100%	52.765.000	100%	-	100%	160.500.000	100%	5.500.000	100%	292.280.000	100%	93.823.000	Dinas Perhubungan dan Informatika
1 07 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	383.850.000	100%	543.125.000	100%	420.900.000	100%	60.500.000	100%	60.500.000	100%	1.448.675.000	100%	186.717.000	Dinas Perhubungan dan Informatika

Kode	Urusan Pemerintahan dan Program yang Dilaksanakan	Indikator kinerja program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan										Realisasi Kinerja Pelaksanaan Periode RPJMD		Bulan Triwulan		GMD/Persepsi ang. masyarakat				
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2016						
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1 07 06	Program Penelitian Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tersedianya informasi kinerja pembangunan	100%	100%	49.550.000	100%	53.975.000	100%	70.820.000	100%	50.360.000	100%	50.360.000	100%	50.360.000	100%	50.360.000	100%	50.360.000	Dinas Perencanaan dan Informatika		
1 07 15	Program Pengembangan Bontang Technopark	1. Jumlah pelebuhat laut / udara / terminal 2. Keengkapan fasilitas Peleabuhan Lokutan 3. Ketersediaan peretelan monitor cuaca di bandara umum	7	7	9.484.326.000	7	22.076.311.000	7	#N/A	8	#N/A	9	#N/A	9	#N/A	9	20.840.000.000	9	20.840.000.000	Dinas Perencanaan dan Informatika		
1 07 16	Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAU	Bertambahnya jumlah sarana traffic light	12	13	270.512.000	13	252.188.000	1400%	933.035.000	15	575.000.000	15	575.000.000	15	575.000.000	15	575.000.000	15	575.000.000	Dinas Perencanaan dan Informatika		
1 07 17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Presentase peningkatan pelayanan angkutan umum	80%	80%	50.400.000	80%	524.232.000	85%	240.008.000	85%	1.005.000.000	85%	1.005.000.000	85%	1.005.000.000	85%	1.005.000.000	85%	1.005.000.000	Dinas Perencanaan dan Informatika		
1 07 18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Bertambahnya sarana & prasarana pantunjang lebar peleabuhan Lokutan	-	1 pkt	3.374.272.000	-	1.827.369.000	5%	3.632.198.000	-	15.375.000.000	-	15.375.000.000	-	15.375.000.000	-	15.375.000.000	-	15.375.000.000	Dinas Perencanaan dan Informatika		
1 07 19	Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	Bertambahnya jumlah rambu-rambu jalan	624	624	719.481.000	700	149.705.000	700	571.383.000	750	1.550.000.000	750	1.550.000.000	750	1.550.000.000	750	1.550.000.000	750	1.550.000.000	Dinas Perencanaan dan Informatika		
1 07 20	Program Peningkatan Ketahanan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Tersedianya tempat pengujian kendaraan bermotor	-	-	-	-	340.194.000	100%	1.004.200.000	-	64.850.000	-	64.850.000	-	64.850.000	-	64.850.000	-	64.850.000	Dinas Perencanaan dan Informatika		
1 07 21	Program Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas	-	100%	-	48.736.000	-	-	100%	208.951.000	1 paket	105.000.000	1 paket	105.000.000	100%	105.000.000	-	105.000.000	-	105.000.000	Dinas Perencanaan dan Informatika		
1 07 23	Program Pembinaan dan Pemitrian Pengguna Frekuensi Radio	-	100%	-	38.580.000	100%	49.575.000	-	-	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000	Dinas Perencanaan dan Informatika		
1 07 24	Program Sosialisasi KKOP dan Pembinaan Bidang Posel	-	100%	-	32.905.000	100%	297.230.000	100%	568.586.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	-	130.000.000	-	130.000.000	Dinas Perencanaan dan Informatika		
1 07 10	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Tingkatkasinya informasi pembangunan	100%	-	40.000.000	100%	71.375.000	100%	135.620.000	-	-	-	-	100%	135.620.000	-	135.620.000	-	135.620.000	Dinas Perencanaan dan Informatika		
1 07	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tersedianya Software Aplikasi	-	-	-	1 Paket	79.720.000	100%	21.533.880.000	100%	10.200.000.000	100%	10.200.000.000	100%	10.200.000.000	-	10.200.000.000	-	10.200.000.000	Dinas Perencanaan dan Informatika		
1 07	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tersingkatnya pelaksanaan pelayanan publik	-	-	-	-	-	100%	13.820.000	-	-	-	-	100%	13.820.000	-	13.820.000	-	13.820.000	Dinas Perencanaan dan Informatika		
1 09	<b>URUGAN PERTANAHAN</b>				<b>724.650.000</b>		<b>374.230.000</b>		<b>66.334.275.496</b>		<b>72.827.215.000</b>		<b>66.334.275.496</b>		<b>66.334.275.496</b>		<b>66.334.275.496</b>		<b>66.334.275.496</b>			
1 09	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Sistem Administrasi Pertanahan	1. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, kawasan industri baru dan bandara baru 2. Pempajangan izin pinjam pakse	633,35 ha	-	-	-	213,35 ha	68.753.910.498	121,35 ha	70.020.680.500	121,35 ha	70.020.680.500	121,35 ha	70.020.680.500	121,35 ha	70.020.680.500	121,35 ha	70.020.680.500	121,35 ha	70.020.680.500	Dinas Perencanaan dan Informatika	
0				1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perencanaan dan Informatika		
1 09	Program Peningkatan Administrasi Pertanahan	1. Menugaskan etasue kepemilikan tanah Pemkot 2. Inventarisir dan dokumentasi tanah milik Pemkot 3. Update data aset tanah Pemkot ke SIP 4. Pelatihan tenaga teknis pertanahan	20,6 ha	72,5 ha	724.650.000	70 ha	874.280.000	70 ha	580.385.000	70 ha	2.443.534.500	70 ha	2.443.534.500	70 ha	2.443.534.500	70 ha	2.443.534.500	70 ha	2.443.534.500	70 ha	2.443.534.500	Dinas Perencanaan dan Informatika
			368,35 ha	33,7 ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perencanaan dan Informatika		
			-	-	-	86,5 ha	-	86,5 ha	-	86,5 ha	-	86,5 ha	-	86,5 ha	-	86,5 ha	-	86,5 ha	-	86,5 ha	Dinas Perencanaan dan Informatika	
			1	-	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15	Dinas Perencanaan dan Informatika	



Kode	Urusan Pemerintahan dan Program yang Dilaksanakan	Indikator kinerja program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Masa Transisi		SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		5. Inventarisasi dan mediaasi pemegolahan tanah	11	-	-	5	-	5	-	5	-	5	-	31	-	5	-	Sekretariat Daerah
1	Penyusunan Perencanaan Pengalokasian Kawasan Pertambangan	inventarisasi dan pemeliharaan Patok Batas Daerah	13	-	-	-	-	60	-	60	363.000.000	60	399.300.000	193	762.300.000	60	439.230.000	Sekretariat Daerah
1	<b>URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>				<b>6.645.875.884</b>		<b>9.008.849.200</b>		<b>9.175.885.200</b>		<b>7.689.378.000</b>		<b>7.867.559.000</b>		<b>40.187.547.284</b>		<b>13.328.739.196</b>	
1 15 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	4.472.891.184	100%	5.492.041.800	100%	3.495.288.000	100%	3.408.933.000	100%	3.474.733.000	100%	20.341.886.984	100%	5.016.512.378	Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKMK
1 15 02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	634.114.500	100%	912.711.200	100%	579.768.000	100%	669.768.000	100%	579.768.000	100%	3.376.129.700	100%	481.544.979	Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKMK
1 15 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	97.180.000	100%	163.145.000	100%	-	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	360.325.000	100%	138.767.398	Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKMK
1 15 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	155.000.000	100%	427.000.000	100%	157.500.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	939.500.000	100%	430.000.000	Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKMK
1 15 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tersedianya informasi kinerja pembangunan	100%	100%	64.575.000	100%	53.725.000	100%	38.275.000	100%	38.275.000	100%	38.275.000	100%	263.125.000	100%	136.746.940	Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKMK
1 15 15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yg Kondusif	Jumlah UMKM yang dibina agar menjadi lebih terarah	67	68	318.610.000	69	283.504.000	70	901.191.500	71	716.365.000	72	751.365.000	72	2.971.035.500	73	692.423.000	Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKMK, Sekretariat Daerah
1 15 16	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah w/usaha terlatih	30	30	248.931.800	30	238.896.800	30	327.028.800	30	443.000.000	30	443.000.000	180	1.700.857.400	30	517.638.000	Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKMK, Sekretariat Daerah
1 15 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	1. Jumlah tempat untuk pemasaran produk unggulan 2. Jumlah UMKM yang mendapat dana bergulir	-	1	152.925.000	1	233.670.000	-	1.128.705.000	-	733.662.000	-	608.662.000	2	2.857.624.000	-	2.786.018.500	Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKMK, Sekretariat Daerah
1 15 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1. Jumlah koperasi yang aktif 2. Jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)	74,56%	76,56	44.837.500	78,56%	348.765.200	80,56%	719.291.200	82,56%	686.515.000	85%	726.420.000	95	2.527.928.900	97	383.880.000	Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKMK
1 15 19	Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi Dan Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Jumlah KSP/USP yang telah dinilai kesehatannya	35	40	283.244.700	45	404.690.000	50	867.011.100	55	442.035.000	60	448.035.000	60	2.455.015.800	65	245.208.001	Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKMK
1 15	Program Pelatihan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	1. Jumlah perempuan / KK yang mendapat dana bergulir 2. Jumlah koperasi wanita	-	-	-	200	-	200	-	200	-	200	-	800	-	198	1.260.000.000	Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKMK
1 15	Program Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil	1. Jumlah tempat pemasaran produk RTM 2. RTM yang mendapatkan modal kerja	-	-	-	-	403.670.200	1	-	2	-	3	-	3	403.670.200	1	1.240.000.000	Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKMK

Kode	Urusan Pemerintahan dan Program yang Dilaksanakan	Indikator kinerja program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Masa Transisi		SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3. RTM yang mendapatkan pelatihan		-	-	-	-	150	-	150	-	150	-	450	-	150	-	
1 15 10	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Terpublikasinya Informasi pembangunan		100%	116.666.200	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	116.666.200	-	-	Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM
1 15 09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			100%	16.900.000	100%	46.830.000	100%	212.850.000	100%	100.825.000	100%	100.825.000	100%	478.230.000	-	-	Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM
1 15	Program Penguatan Pemberdayaan Kelompok Usaha Kecil			-	-	-	-	100%	346.476.600	100%	300.000.000	100%	346.476.000	100%	992.952.600	-	-	Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM
1 15	Program Koordinasi Peningkatan Produksi Daerah			-	-	-	-	100%	402.500.000	-	-	-	-	100%	402.500.000	-	-	Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM
1 16	<b>URUSAN PENANAMAN MODAL DAERAH</b>			-	<b>1.055.628.000</b>	-	<b>3.250.664.000</b>	-	<b>7.143.730.250</b>	-	<b>7.138.235.000</b>	-	<b>6.941.620.000</b>	-	<b>25.529.878.250</b>	-	<b>6.846.084.967</b>	
1 16 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	-	-	100%	-	100%	1.854.473.250	100%	1.864.922.000	100%	1.868.320.000	100%	5.587.715.250	100%	2.837.016.967	Badan Perijinan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
1 16 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	-	-	100%	-	100%	505.870.000	100%	812.000.000	100%	632.000.000	100%	1.949.870.000	100%	378.350.000	Badan Perijinan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
1 16 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	-	-	100%	-	100%	-	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	70.000.000	100%	99.548.000	Badan Perijinan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
1 16 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	-	-	100%	-	100%	213.700.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	713.700.000	100%	125.000.000	Badan Perijinan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
1 16 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya informasi kinerja pembangunan	100%	-	-	100%	-	100%	78.600.000	100%	63.300.000	100%	63.300.000	100%	205.200.000	100%	46.150.000	Badan Perijinan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
1 16 15	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	21	21	705.640.000	22	2.938.276.000	23	2.996.818.000	23	2.822.000.000	24	2.697.000.000	24	11.959.734.000	24	2.090.000.000	Badan Perijinan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal; Sekretariat Daerah
1 16 16	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	Nilai investasi :		100%	229.419.000	100%	156.338.000	100%	566.773.000	100%	498.500.000	100%	501.000.000	100%	1.952.030.000	100%	225.000.000	Badan Perijinan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
		1. PMDN (Rp) x 1.000.000	560.394	616.432	-	670.077	745.884	-	805.555	-	886.110	-	886.110	-	945.781	-	-	Badan Perijinan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
		2. PMA (\$) x 1.000	216.314	235.782	-	254.844	275.016	-	297.017	-	323.749	-	323.749	-	345.750	-	-	Badan Perijinan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
1 16	Program Penyediaan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah	Terlaksananya kerjasama pengalihan kawasan industri	100%	-	120.570.000	100%	156.050.000	100%	239.206.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	1.015.826.000	100%	100.000.000	Badan Perijinan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
1 16 17	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Lama proses perijinan	15	-	-	-	-	12	211.140.000	12	347.513.000	12	250.000.000	12	808.653.000	12	945.000.000	Badan Perijinan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
1 16 18	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terpeliharanya perangkat lunak software	-	-	-	-	-	100%	288.350.000	1 paket	245.000.000	100%	245.000.000	100%	778.350.000	-	-	Badan Perijinan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal

Kode	Urusan Pemerintahan dan Program yang Dilaksanakan	Indikator kinerja program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Masa Transisi		SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		RPJMD		Tahun 2016		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1 16 19	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Terpenuhinya data survey	-	-	-	-	-	100%	188.800.000	1 paket	150.000.000	100%	150.000.000	100%	488.800.000	-	-	Badan Perizinan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal
1 21	<b>URUSAN KETAHANAN PANGAN</b>				<b>3.437.186.680</b>		<b>5.522.666.500</b>		<b>333.990.000</b>		<b>4.121.950.000</b>		<b>4.371.950.000</b>		<b>545.890.000</b>		<b>7.420.000.000</b>	
1 21	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Terpenuhinya ketahanan pangan tingkat kota	-	-	-	-	-	100%	333.990.000	100%	105.950.000	100%	105.950.000	100%	545.890.000	100%	500.000.000	DKPP Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 01	<b>URUSAN PERTANIAN</b>				<b>2.158.725.840</b>		<b>3.659.826.500</b>		<b>3.322.066.600</b>		<b>2.428.000.000</b>		<b>2.548.000.000</b>		<b>14.116.716.940</b>		<b>4.305.000.000</b>	
2 01 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah petani yang mendapatkan penyuluhan & pendampingan	140	70	356.805.840	70	556.450.000	70	1.054.166.000	70	1.150.000.000	70	1.150.000.000	490	4.267.421.840	70	770.000.000	Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian
2 01 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Tersedianya data dalam rangka peningkatan ketahanan pangan	-	-	-	4	188.250.000	-	-	-	163.000.000	-	163.000.000	4	514.250.000	-	400.000.000	Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian
2 01 18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Jumlah sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	-	5 unit hand traktor	212.765.000	15 paket sarana pertanian	235.100.000	15 paket sarana pertanian	163.500.000	15 paket sarana pertanian	125.000.000	-	125.000.000	5 unit hand traktor, 45 paket sarana pertanian	661.365.000	-	300.000.000	Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian
2 01 19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1. Tersedianya sarana produksi pertanian dan perkebunan	-	1 paket	600.890.000	1 paket	601.780.000	1 paket	399.890.500	1 paket	-	1 paket	-	5 paket	1.602.560.500	1 paket	495.000.000	Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian
		2. Tersedianya bibit unggul pertanian dan perkebunan	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	5 paket	-	1 paket	-	Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian
2 01 20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Meningkatnya SDM penyuluh	-	12 penyuluh	108.000.000	12 penyuluh, 4 unit sarana penyuluh	45.000.000	12 penyuluh, 4 unit sarana penyuluh	72.000.000	12 penyuluh, 4 unit sarana penyuluh	-	12 penyuluh, 4 unit sarana penyuluh	12 penyuluh, 4 unit sarana penyuluh	225.000.000	12 penyuluh, 4 unit sarana penyuluh	170.000.000	-	Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian
2 01 21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Terselenggaranya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit ternak	-	3 paket	-	3 paket	236.160.000	3 paket	199.470.500	3 paket	150.000.000	3 paket	280.000.000	12 paket	865.630.500	2 paket	480.000.000	Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian
2 01 22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Tersedianya bibit ternak untuk mendukung swasembada daging 1000 ekor	356	20	406.150.000	20	93.990.000	20	137.145.000	20	630.000.000	20	630.000.000	456	1.897.265.000	20	600.000.000	Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian
2 01 23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produk Peternakan	Terbangunnya sarana dan prasarana RPH	-	1	474.115.000	1	1.530.615.500	-	1.092.605.000	-	-	-	-	1	3.097.335.500	-	900.000.000	Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian
2 01 24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Tersedianya sarana dan prasarana teknologi peternakan	-	1 paket	-	1 paket	172.581.000	1 paket	203.289.600	1 paket	210.000.000	1 paket	200.000.000	4 paket	785.870.600	1 paket	190.000.000	Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian
2 03	<b>URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL</b>				<b>62.213.200</b>		<b>6.098.885.400</b>		<b>27.893.342.000</b>		<b>27.166.800.000</b>		<b>27.183.100.000</b>		<b>88.404.120.600</b>		<b>389.348.750</b>	
2 03 15	Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Jumlah perusahaan galian C yang diawasi	3	3	22.251.200	3	41.748.000	3	20.640.000	3	28.600.000	2	28.600.000	17	141.839.200	2	22.251.200	Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM
2 03 16	Program Pengawasan Dan Penerbitan Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan	Bertambahnya jumlah sumbu bor air tanah yang terdapat	20	-	39.962.000	5	89.045.000	5	17.610.000	5	33.000.000	5	49.500.000	40	229.117.000	5	22.500.000	Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM

Kode	Usuran Pemerintahan dan Program yang Dilaksanakan	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan										Realisasi Kinerja Pegawai Tahun 2011		Masa Finansial		Kategori Penyelesaian	
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2011		Tahun 2012			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2 03 19	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Energi	1. Jumlah pelanggan yang dibangun kelengkapan rumah tenaga 2. Jumlah pelanggan listrik tenaga surya (LTS) yang terdistribusi	1000	1000	-	5.514.672.400	-	-	20.357.570.000	-	-	22.050.000.000	-	-	22.050.000.000	2	100%	100%	Dua Perbaikan Perbaikan (100%)
2 03	Program Fasilitas Peningkatan Cakupan Pelayanan Listrik Masyarakat	Cakupan pelayanan listrik masyarakat	100%	100%	-	30%	-	83%	-	-	87%	-	-	90%	-	80%	100%	100%	Perbaikan Listrik
2 03	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Keumahaan	Terwujudnya pembudayaan keumahaan	-	-	-	-	263.500.000	-	-	-	7.497.522.000	100%	5.055.000.000	100%	1.000.000.000	100%	100%	100%	Dua Perbaikan Perbaikan (100%)
2 04	URUSAN PARAWISATA				2.267.914.000		5.184.858.000				6.498.701.000		4.138.000.000		1.000.000.000		100%	100%	
2 04 15	Program Pengembangan Pemukiman Perwisata				518.656.500		1.230.551.000				936.514.000		2.490.000.000		1.000.000.000		100%	100%	Dua Perbaikan Perbaikan (100%)
2 04 16	Program Pengembangan Destinasi Perwisata	Jumlah kunjungan wisata di kota Bonlang	3.915	4.111	1.519.273.500	4.307	3.596.241.000	4.503	4.396.192.000	4.699	4.396.192.000	4.895	700.000.000	4.895	1.000.000.000	100%	100%	100%	Dua Perbaikan Perbaikan (100%)
2 04 17	Program Pengembangan Kemiripan				229.985.000		359.050.000				1.163.995.000		945.000.000		1.000.000.000		100%	100%	Dua Perbaikan Perbaikan (100%)
2 05	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				11.392.315.700		19.856.231.156				22.734.059.740		18.428.724.000		18.000.000.000		100%	100%	
2 05 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	3.712.900.398	100%	4.168.879.800	100%	2.828.267.100	100%	2.904.849.000	100%	2.904.849.000	100%	1.000.000.000	100%	100%	100%	Dua Perbaikan Perbaikan (100%)
2 05 02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	890.963.000	100%	1.320.172.000	100%	1.436.332.000	100%	1.178.000.000	100%	1.178.000.000	100%	1.000.000.000	100%	100%	100%	Dua Perbaikan Perbaikan (100%)
2 05 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	103.500.000	100%	103.700.000	100%	-	100%	115.000.000	100%	-	100%	100.000.000	100%	100%	100%	Dua Perbaikan Perbaikan (100%)
2 05 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	167.112.312	100%	938.630.000	100%	399.550.000	100%	399.000.000	100%	399.000.000	100%	100.000.000	100%	100%	100%	Dua Perbaikan Perbaikan (100%)
2 05 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tersedianya informasi kinerja pembangunan	100%	100%	594.326.000	100%	223.575.000	100%	155.495.000	100%	244.875.000	100%	244.875.000	100%	100.000.000	100%	100%	100%	Dua Perbaikan Perbaikan (100%)
2 05 15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	1. Terbinanya kelembagaan kelompok nelayan 2. Terleaksanya berdirinya asosiasi dan perseorangan bagi masyarakat pesisir 3. Terleaksanya pelatihan budidaya	60 kelompok	30 kelompok	756.262.500	30 kelompok	1.118.326.000	30 kelompok	2.776.988.000	30 kelompok	450.000.000	30 kelompok	450.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	Dua Perbaikan Perbaikan (100%)
2 05 20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1. Terleaksanya pendampingan pada kelompok terdidik budidaya ikan	-	-	2.506.308.000	245	6.279.983.300	218	10.113.356.800	213	7.560.000.000	230	7.916.000.000	100%	100%	100%	100%	100%	Dua Perbaikan Perbaikan (100%)

Kode	Urusan Pemerintahan dan Program yang Dilaksanakan	Indikator kinerja program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Masa Transisi		SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Target	Rp.	Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2. Terlaksananya pembinaan dan pengembangan perikanan		30 orang	-	30 orang, kolam 0,5 ha, 15 UPR	-	30 orang, kolam 0,5 ha, 15 UPR	-	30 orang, kolam 0,5 ha, 15 UPR	-	30 orang, kolam 0,5 ha, 15 UPR	-	150 orang, kolam 2 ha, 60 UPR	-	30 orang, kolam 0,5 ha, 15 UPR	-	Dinas Kelautan Perikanan dan Perikanan
		3. Beroperasinya dan tambahnya sarana dan prasarana BGIP		2 paket	-	2 paket	-	2 paket	-	2 paket	-	2 paket	-	10 paket	-	2 paket	-	Dinas Kelautan Perikanan dan Perikanan
2 05 21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	1. Jumlah nelayan tangkap yang mendapat pelatihan dan bantuan		30	1.692.566.550	30	3.390.315.256	30	2.125.428.840	30	3.845.000.000	30	3.855.000.000	150	14.908.310.546	30	18.390.000.000	Dinas Kelautan Perikanan dan Perikanan
		2. Terbangunnya PPVTPI dan fasilitasnya		1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	5 paket	-	1 paket	-	Dinas Kelautan Perikanan dan Perikanan
		3. Terbangunnya Minapadik perikanan		-	-	Review DED	-	1 paket	-	1 paket	-	1 paket	-	DED dan 5 paket pakjran	-	1 paket	-	Dinas Kelautan Perikanan dan Perikanan
2 05 23	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	1. Tersedianya Sarana dan Pasaran Pengolahan Hasil Perikanan, Perikanan dan Peternakan		-	617.184.000	30	1.182.846.000	30	1.004.628.000	30	880.000.000	30	910.000.000	120	4.594.658.000	30	1.245.000.000	Dinas Kelautan Perikanan dan Perikanan
		2. Terlaksananya pembinaan pengolahan dan promosi hasil perikanan dan kelautan		12	-	15	-	15	-	15	-	15	-	72 pertemuan	-	15	-	Dinas Kelautan Perikanan dan Perikanan
		3. Tersedianya sentra Penempatan hasil produk-produk hasil perikanan		-	-	5	-	2	-	3	-	3	-	13 sentra	-	2	-	Dinas Kelautan Perikanan dan Perikanan
2 05	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan	Terlaksananya pengawasan dan Pengendalian akan kerusakan Sumber Daya Kelautan	100%	100%	276.196.000	100%	1.144.305.000	100%	1.386.350.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	3.906.851.000	-	-	Dinas Kelautan Perikanan dan Perikanan
2 05	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Tersedianya Dokumen Slender Pelayanan	-	-	-	1 Dok	61.820.000	100%	85.550.000	-	-	-	-	100%	117.370.000	-	-	Dinas Kelautan Perikanan dan Perikanan
2 05	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Laut	-	-	-	100%	300.334.000	100%	340.622.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	1.240.956.000	-	-	Dinas Kelautan Perikanan dan Perikanan
2 05	Program Pemetaan Ruang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terselenggaranya Pemetaan Ruang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut	-	-	-	100%	61.210.000	100%	156.050.000	100%	155.000.000	100%	155.000.000	100%	527.260.000	-	-	Dinas Kelautan Perikanan dan Perikanan
2 05	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terselenggaranya penyusunan sistem informasi	0%	-	-	-	-	1 paket	106.742.000	-	-	-	-	100%	106.742.000	-	-	Dinas Kelautan Perikanan dan Perikanan
2 06	<b>URUSAN PERDAGANGAN</b>				<b>4.196.864.011</b>		<b>3.447.832.400</b>		<b>24.266.213.600</b>		<b>10.876.200.000</b>		<b>2.308.516.000</b>		<b>50.095.126.011</b>		<b>12.167.675.200</b>	
2 06 16	Program Perlindungan Konsumen Dan Penguasaan Perdagangan	Pengawasan makanan dan minuman yang beredar dipasaran	5 swelayan, 10 mini market, 20 toko	100%	119.130.000	5 swelayan, 10 mini market, 20 toko	318.530.000	5 swelayan, 10 mini market, 22 toko	447.646.000	5 swelayan, 10 mini market, 20 toko	240.000.000	5 swelayan, 10 mini market, 23 toko	285.375.000	5 swelayan, 10 mini market, 23 toko	1.410.681.000	5 swelayan, 10 mini market, 23 toko	294.073.500	Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM
2 06 17	Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	Keikutsertaan pameran dagang komoditi ekspor nasional dan internasional	-	1 kali	110.406.700	2 kali	230.450.000	2 kali	120.116.500	2 kali	255.000.000	2 kali	255.000.000	9 kali	970.973.200	2 kali	523.767.700	Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM

Kode	Urusan Pemerintahan dan Program yang Dilaksanakan	Indikator kinerja program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2010	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Masa Transisi		SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		RPJMD		Tahun 2016		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2 06 18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Pelaku usaha yang produksinya dipasarkan di tk provinsi & nasional	5	100%	467.559.200	4	1.060.952.400	4	2.432.858.800	4	1.371.200.000	4	1.435.641.000	22	8.768.211.200	4	1.329.834.000	Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM
2 06 19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan	Tersedianya data pedagang yang teratur dan akurat	-	1	17.700.000	-	16.200.000	-	296.012.500	-	85.000.000	-	85.000.000	1	499.912.500	-	20.000.000	Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM
2 06 20	Program Peningkatan Dan Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perdagangan	Terbangunnya sarana perdagangan yang kreatif	1	1	8.481.768.111	0	1.821.500.000	1	20.969.580.000	1	8.925.000.000	0	247.500.000	3	40.445.348.111	-	10.000.000.000	Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM, Dinas Pekerjaan Umum
<b>2 07</b>	<b>URUSAN PERINDUSTRIAN</b>				<b>1.214.968.116</b>		<b>1.545.500.900</b>		<b>1.211.366.700</b>		<b>1.564.022.000</b>		<b>1.680.022.000</b>		<b>7.015.679.716</b>		<b>2.967.262.500</b>	
2 07 16	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Meningkatnya pelaku usaha industri mikro, kecil dan menengah	961	10	1.177.498.116	10	1.271.250.900	10	1.119.234.200	10	1.269.022.000	8	1.085.022.000	1.009	5.922.027.216	10	2.567.647.500	Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM
2 07 17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Terselenggaranya pelaku IKM	120 IKM	50 IKM	37.470.000	50 IKM	74.050.000	50 IKM	92.132.500	50 IKM	95.000.000	50 IKM	95.000.000	370 IKM	393.652.500	50 IKM	219.615.000	Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM
2 07 18	Program Penataan Struktur Industri	1. Study kelayakan kawasan industri	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	-	500.000.000	1 pkt	700.000.000	-	200.000.000	Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM
		2. Meningkatnya jumlah pelaku usaha industri hulu hilir yang terampil	-	-	-	-	-	-	-	2%	-	2%	-	4%	-	2%	-	Dinas Perindustrian Perdagangan dan UKM

WALIKOTA BONTANG,



ADI DARMA

Lampiran VII Peraturan Daerah

Nomor : 3 Tahun 2014

Tanggal : 20 Agustus 2014

Tentang : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2011-2016**

## **BAB IX INDIKATOR KINERJA DAERAH**

### **9.2. Indikator dan Target Kinerja**

Untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja RPJMD sekaligus sebagai acuan penyusunan Renstra dan Renja SKPD, indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada RPJMD ini. Indikator kinerja RPJMD ditampilkan dengan menggambarkan kondisi awal dan target tahunan selama periode 2011 sampai 2016. Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 9.1  
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah  
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan  
Kota Bontang

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2010	2011	2012	2013	2014	
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>								
<b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>								
1.	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawalan dan Persandian</b>							
1.7.	Angka kriminalitas yang tertangani	299	305	315	350	300	345	345
<b>Fokus Kesejahteraan Masyarakat</b>								
1.	<b>Pendidikan</b>							
1.1.	Angka melek huruf	98,96	99,00	99,25	99,50	99,75	100,00	100,00
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	12	12	12	12	12	12	12
1.3.	Angka partisipasi kasar							
1.3.1	SD/MI/Paket A (%)	113,54	112,00	113,07	114,11	115,12	116,10	116,10
1.3.2	SMP/MTs/Paket B (%)	107,67	106,22	107,23	108,22	109,17	110,11	110,11
1.3.3	SMA/SMK/MA/Paket C (%)	108,26	106,79	107,81	108,81	109,77	110,71	110,71
1.4.	Angka pendidikan yang ditamatkan							
1.4.1	SD/MI/Paket A	14,07	13,88	14,02	14,14	14,27	14,39	14,39
1.4.2	SMP/MTs/Paket B	5,80	5,72	5,77	5,82	5,88	5,93	5,93
1.4.3	SMA/SMK/MA/Paket C	5,42	5,35	5,40	5,45	5,50	5,54	5,54
1.5.	Angka Partisipasi Murni							
1.5.1	SD/MI/Paket A	98,14	98,14	98,14	98,64	99,51	100,00	100,00
1.5.2	SMP/MTs/Paket B	71,76	71,76	71,76	72,12	72,76	73,38	73,38
1.5.3	SMA/SMK/MA/Paket C	61,86	61,86	61,86	62,17	62,72	63,26	63,26
2.	<b>Kesehatan</b>							
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi	992,2	992,2	992,7	993,2	993,7	994,2	994,2
2.2.	Angka usia harapan hidup	72,25	72,25	72,40	72,55	72,70	72,85	72,85
2.3.	Persentase balita gizi buruk	2,00	2,00	1,80	1,60	1,50	1,40	1,40
3.	<b>Pertanahan</b>							
3.1.	Persentase penduduk yang memiliki lahan	56,39	57,44	58,5	59,56	60,62	61,68	61,68
4.	<b>Ketenagakerjaan</b>							
<b>Fokus Seni Budaya dan Olahraga</b>								
1.	<b>Kebudayaan</b>							
1.1.	Jumlah grup kesenian	1,81	1,90	2,01	2,12	2,21	2,29	2,29
1.2.	Jumlah gedung	0,14	0,20	0,25	0,30	0,35	0,39	0,39
2.	<b>Pemuda dan Olahraga</b>							
2.1.	a. Jumlah klub olahraga	2	2	2	2	2	2	2
2.2.	b. Jumlah gedung olahraga	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>								
<b>Fokus Layanan Urusan Wajib</b>								
1.	<b>Pendidikan</b>							
1.1.	<b>Pendidikan dasar:</b>							
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah	848,46	836,98	844,95	852,74	860,28	867,64	867,64
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	31,12	29,91	29,08	28,26	27,16	26,08	26,08
1.1.3.	Rasio guru/murid	601,70	654,42	629,49	605,51	582,44	560,25	560,25
1.1.4.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	60,17	65,44	62,95	60,55	58,24	56,03	56,03
1.2.	<b>Pendidikan menengah:</b>							
1.2.1.	Angka partisipasi sekolah	612,49	604,20	609,95	615,58	621,02	626,33	626,33
1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	27,81	26,13	25,12	24,14	23,20	22,28	22,28
1.2.3.	Rasio guru terhadap murid	816,84	959,68	923,12	887,95	854,13	821,59	821,59



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/INDIKATOR KINERJAPEMBANGUNANDERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1.2.4.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	81,68	95,97	92,31	88,80	85,41	82,16	82,16
1.2.5.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	98,96	99,00	99,25	99,50	99,75	100,00	100,00
1.3.	Fasilitas Pendidikan:							
1.3.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	94,55	96,36	96,43	98,21	100,00	100,00	100,00
1.3.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	94,44	94,44	96,30	96,36	96,36	98,18	98,18
1.4.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							
1.4.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	77,70	76,64	77,37	78,09	78,78	79,45	79,45
1.5.	Angka Putus Sekolah:							
1.5.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.5.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.6.	Angka Kelulusan:							
1.6.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.6.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	99,63	95,85	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00
1.6.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA (%)	99,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.6.4.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	95,56	96,48	97,41	98,34	99,29	100,24	100,24
1.6.5.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	109,73	110,79	111,85	112,93	114,01	115,11	115,11
1.6.6.	Guru yang memenuhi kualifikasi S/D-IV	73,05	78,85	84,81	90,34	95,45	100,00	100,00
2.	<b>Kesehatan</b>							
2.1.	Rasio posyandu per satuan balita	6,47	6,47	7,17	7,87	8,57	9,27	9,27
2.2.	Rasio puskesmas, poliklinik, puslu per satuan penduduk	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
2.3.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
2.4.	Rasio dokter per satuan penduduk	0,54	0,54	0,58	0,60	0,60	0,63	0,63
2.5.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	4,47	4,47	4,60	4,70	4,80	4,90	4,90
2.6.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
2.7.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
2.8.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.10.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	28,71	70,00	70,00	70,00	75,00	75,00	75,00
2.11.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.12.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.13.	Cakupan kunjungan bayi (%)	85,00	87,00	90,00	91,00	92,00	95,00	95,00
2.14.	Cakupan puskesmas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.15.	Cakupan pembantu puskesmas	13,00	13,00	60,60	60,60	66,60	66,60	66,60
3.	<b>Pekerjaan Umum</b>							
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	82,82	83,26	83,70	84,14	84,58	85,00	85,00
3.2.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	1,39	1,4	1,43	1,47	1,5	1,54	1,54
3.3.	Persentase rumah tinggal bersantasi	79,02	79,05	79,09	79,13	79,17	79,20	79,20
3.4.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3
3.5.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	2,98	3,38	3,45	3,51	3,59	3,73	3,73
3.6.	Rasio rumah layak huni	0,57	0,60	0,63	0,66	0,69	0,73	0,73
3.7.	Rasio permukiman layak huni	10,84	15,84	20,84	25,84	30,84	35,84	35,84
3.8.	Panjang jalan dilalui Roda 4	0,00110	0,00114	0,00119	0,00124	0,00133	0,00138	0,00138
3.9.	Jalan Penghubung dari Ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (mimal dilalui roda4)	3,85	2,89	1,93	0,97	0,01	0,00	0,00
3.10.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/jam)	87,67	88,14	88,60	89,07	89,53	89,98	89,98



NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
10.	<b>Kependudukan dan Catatan Sipil</b>								
10.1.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	0,69	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
10.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	0,62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
10.3.	Rasio pasangan berakte nikah	0,76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
10.4.	Kepemilikan KTP	85,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10.5.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	64,00	64,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10.6.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
10.7.	Penerapan KTP Nasional berbasis NK	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
11.	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>								
11.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	48,00	48,05	48,07	48,08	48,09	49,01	49,01	
11.2.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	52,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
11.3.	RasioKDRT	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
11.4.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	17,02	18,00	18,00	19,00	19,00	20,00	20,00	
11.5.	Penyediaan pangkutan perumahan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	61,90	70,00	75,00	75,00	80,00	80,00	80,00	
12.	<b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>								
12.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	
12.2.	Rasio akseptor KB	76,53	77,00	77,00	78,00	78,00	79,00	79,00	
12.3.	Cakupan peserta KB aktif	76,53	77,00	77,00	78,00	78,00	79,00	79,00	
12.4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera	43,00	42,90	43,00	44,00	44,00	45,00	45,00	
13.	<b>Sosial</b>								
13.1.	Serana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	6	7	7	7	7	7	7	
13.2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	3,18	3,3	3,43	3,55	3,67	3,76	3,76	
13.3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	3,86	3,92	3,98	4,05	4,11	4,17	4,17	
14.	<b>Ketenagakerjaan</b>								
14.1.	Angka partisipasi angkatan kerja (%)	57,18	58,13	59,10	60,08	61,08	62,11	62,11	
14.2.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	153,85	153,85	138,46	138,46	116,38	115,38	116,38	
14.3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	59,00	57,43	57,85	58,24	58,60	57,43	57,43	
14.4.	Pencari kerja yang ditempatkan	26,77	27,72	28,26	29,44	30,25	30,62	30,62	
14.5.	Tingkat pengangguran terbuka (%)	7,43	7,31	7,18	7,06	6,95	6,83	6,83	
14.6.	Keselamatan dan perlindungan	79,49	73,08	75,38	76,15	77,69	79,23	79,23	
14.7.	Perealisasi buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
15.	<b>Koperasi Usaha Kecil dan Menengah</b>								
15.1.	Persentase koperasi aktif	74,56	76,64	78,72	80,80	82,88	85,00	85,00	
15.2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (KSP/USP)	67	68	69	70	71	72	72	
15.3.	Jumlah BPR/LKM (hanya BPR)	3	3	3	3	3	3	3	
15.4.	Usaha Mikro dan Kecil	13.242	13.342	13.442	13.542	13.642	13.742	13.742	
16.	<b>Penanaman Modal</b>								
16.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	PMDN	10	21	22	23	23	24	24
		PMA	11						
16.2.	Jumlah nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp X (000.000, )	560.394	616.342	670.077	745.884	805.555	886.110	886.110
		\$X(000)	236.314	235.782	254.644	275.016	297.017	323.749	323.749
16.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	1459,00	1459,00	1535,00	1555,00	1597,00	1630,00	1630,00	
16.4.	Kenakan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	55,948	55,948	53,735	75,807	59,671	59,671	59,671	
17.	<b>Kebudayaan</b>								
17.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	7	14	14	14	15	17	17	
17.2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	5 paket	
17.3.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	0,07	0,14	0,21	0,28	0,35	0,42	0,42	

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
18.	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>							
18.1.	Jumlah organisasi pemuda	71	72	73	74	75	76	76
18.2.	Jumlah organisasi olahraga	44	45	46	47	48	49	49
18.3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	5	6	8	10	12	15	15
18.4.	Jumlah kegiatan olahraga	5	6	8	10	12	15	15
18.5.	Batal remaja (selain milik swasta)	0	-	-	1	-	-	1
18.6.	Lapangan olahraga	0,330	0,362	0,368	0,374	0,379	0,385	0,385
19.	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>							
19.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	3	20	20	20	20	20	100
19.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	10	10	10	15	10	15	60
20.	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawalan dan Persandian</b>							
20.1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	6,14	7,07	8,00	8,93	9,86	10,71	10,71
20.2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	49	49	49,2	49,5	49,8	50	50
20.3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan	348	376	404	432	459	486	486
20.4.	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
20.5.	Penegakan PERDA	93,38	94,38	95,38	96,38	97,38	98,38	98,38
20.6.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095
20.7.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, kelenyamanan, keindahan) di Kabupaten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.8.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	40	40	45	50	55	60	60
20.9.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	0,000043	0,000039	0,000038	0,000036	0,000041	0,00004	0,00004
20.10.	Angka waktu tanggap (respons time) daerah layanan Wilayah Manajemen Kabupaten (WMAK)	76,92	78,00	78,00	78,00	80,00	80,00	80,00
20.11.	Cakupan sarana prasarana perkeronloran pemerintahan Kelurahan yang baik	60,00	66,67	73,33	80,00	86,67	93,33	93,33
20.12.	Sistem Informasi Manajemen Pemda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
20.13.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
21.	<b>Ketahanan Pangan</b>							
21.1.	Regulasi ketahanan pangan	Belum ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
21.2.	Ketersediaan pangan utama	100	100	100	100	100	100	100
22.	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>							
22.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0	15	15	15	15	15	75
22.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	1.448	1.448	1.530	1.560	1.580	1.600	1.600
22.3.	Jumlah LSM	42	52	62	77	87	102	102
22.4.	LPM Berprestasi	0	0	0,067	0,067	0,067	0,067	0,267
22.5.	PKK Aktif	100	100	100	100	100	100	100
22.6.	Posyandu aktif	100	100	100	100	100	100	100
22.7.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	100	100	100	100	100	100	100
23.	<b>Statistik</b>							
23.1.	Buku "Daerah dalam angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
23.2.	Buku "PDRB kabupaten"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
24.	<b>Kebersihan</b>							
24.1.	Pengelolaan sampah secara baku	5,60	9,30	13,00	16,70	20,40	24,10	24,10
24.2.	Peningkatan SDM pengelola kebersihan	1	1	3	3	3	3	3
25.	<b>Komunikasi dan Informatika</b>							
25.1.	Jumlah jaringan komunikasi	14	15	16	16	17	17	17
25.2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	9	9	10	11	11	12	12
25.3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	5	5	5	5	6	6	6
25.4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	17	17	17	18	18	19	19
25.5.	Web site milik pemerintah daerah	1	2	2	2	3	3	3

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
26.	Perpustakaan								
26.1.	Jumlah perpustakaan								
26.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	46.843	49.185	51.644	54.227	56.938	59.785	59.785	
26.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	69.596	69.596	76.556	84.211	101.896	112.085	112.085	
<b>Fokus Layanan Urusan Pilihan</b>									
1.	Pertanian								
1.1.	Cakupan bina kelompok petani	43,14	47,06	50,98	58,82	64,71	70,59	70,59	
2.	Kehutanan								
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	0,21	1,19	1,07	0,96	0,87	0,78	0,78	
2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan	21,69	19,52	17,56	15,81	14,23	12,81	12,81	
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral								
3.1.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	Migas 0,12	0,12	0,14	0,18	0,20	0,22	0,22	
4.	Pariwisata								
4.1.	Kunjungan wisata	3.915	4.111	4.307	4.503	4.699	4.895	4.895	
4.2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Migas 0,05	0,21	0,25	0,32	0,37	0,46	0,46	
		Tanpa Migas 0,32	0,38	0,45	0,50	0,57	0,61	0,61	
5.	Kelautan dan Perikanan								
5.1.	Produksi perikanan	79,73	80,13	80,53	81,13	81,73	82,33	82,37	
5.2.	Konsumsi ikan	69,40	183,93	177,73	172,12	166,61	161,23	161,23	
5.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	6,54	12,50	18,75	25,00	31,25	32,26	32,26	
5.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	79,73	80,13	80,53	81,13	81,73	82,33	82,33	
6.	Perdagangan								
6.1.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Migas 1,13	2,63	4,13	5,63	7,13	8,63	10,13	
		Non Migas 8,09	8,27	8,45	8,63	8,81	9,01	9,01	
6.2.	Ekspor Bersih Perdagangan (Million \$)	8.564.144.536,07	10.446.256.334,01	12.746.872.727,49	15.551.184.727,53	18.972.445.367,59	23.146.383.348,46	23.146.383.348,46	
6.3.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	699	719	739	759	779	799	799	
7.	Perindustrian								
7.1.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Migas 95,38	95,38	95,38	95,38	95,38	95,38	95,38	
		Non Migas 66,83	66,83	66,83	66,83	66,83	66,83	66,83	
7.2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri	0,16	0,58	0,96	1,36	1,76	2,16	2,16	
7.3.	Pertumbuhan Industri	Ind. Besar 0,80	20,80	0,00	0,80	0,80	0,00	20,00	
		Ind. Rumah 9,26	10,26	11,26	12,26	13,26	14,26	15,26	
7.4.	Cakupan bina kelompok pengrajin	29,41	34,41	39,41	44,41	49,41	54,41	59,41	
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>									
<b>Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah</b>									
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita								
1.2.	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	54,18	54,29	56,29	58,29	60,29	60,29	60,29	
1.3.	Produktivitas tda daerah								
<b>Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur</b>									
1.	Perhubungan								
1.1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	38	43	45	47	50	53	53	
1.2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	312.890	450.879	467.590	512.890	543.678	576.012	576.012	
1.3.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandar/ terminal per tahun	348.890	486.879	503.590	548.890	579.678	612.012	612.012	
2.	Penataan Ruang								
2.1.	Ketaatan terhadap RTRW	75,80	75,50	76,00	76,50	77,00	77,50	77,50	
2.2.	Luas wilayah produktif	60,80	64,80	67,80	69,80	72,80	76,80	76,80	

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2010	2011	2012	2013	2014	
2.3.	Luas wilayah industri	6,00	6,00	6,00	6,00	6,30	6,30	6,30
2.4.	Luas wilayah kebanjiran	0,28	0,24	0,21	0,18	0,15	0,14	0,14
2.5.	Luas wilayah perkotaan	72,00	73,40	74,80	76,20	77,60	79,00	79,00
3.	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>							
3.1.	Jenis dan jumlah bank dan cabang	10	10	11	12	13	14	14
3.2.	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	4	4	5	5	6	6	6
3.3.	Jenis, kelas, dan jumlah restoran	12	12	17	22	27	32	32
3.4.	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	26	28	30	32	34	35	35
4.	<b>Lingkungan Hidup</b>							
4.1.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	31,68	43,39	54,38	64,87	72,53	80,00	80,00
5.	<b>Komunikasi dan Informatika</b>							
5.3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	22,00	23,00	25,00	28,80	29,00	30,00	30,00
	<b>Fokus Iklim Berinvestasi</b>							
1.	<b>Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian</b>							
1.1.	Angka kriminalitas	20	19,5	19	18,5	18,3	18	18
1.2.	Jumlah demo	10	10	12	20	35	35	35
1.3.	Lama proses perijinan	12	12	12	12	5	5	5
1.4.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	8	8	8	8	8	9	9
1.5.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	7	7	7	8	8	9	9
	<b>Fokus Sumber Daya Manusia</b>							
1.	<b>Ketenagakerjaan</b>							
1.1.	Rasio lulusan S1/S2/S3	54,49	62,08	75,91	88,43	102,94	116,67	132,30
1.2.	Rasio ketergantungan	49,66	51,07	50,64	50,23	49,84	49,48	49,48

WALIKOTA BONTANG,

  
ADIDARMA